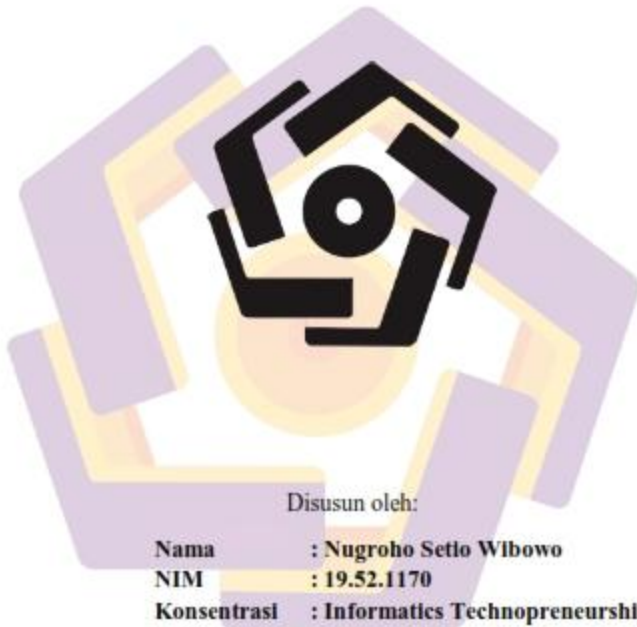


**TESIS**

**PERANCANGAN INTEROPERABILITAS DATA PEMERINTAHAN  
DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK *DATA MANAGEMENT  
BODY OF KNOWLEDGE* (DMBOK)**

**(Studi Kasus : Pemerintah Kabupaten Trenggalek)**



**PROGRAM STUDI S2 TEKNIK INFORMATIKA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA**

**2021**

**TESIS**

**PERANCANGAN INTEROPERABILITAS DATA PEMERINTAHAN  
DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK *DATA MANAGEMENT  
BODY OF KNOWLEDGE* (DMBOK)**

**(Studi Kasus : Pemerintah Kabupaten Trenggalek)**

**DESIGNING INTEROPERABILITY OF GOVERNMENT DATA  
USING DATA MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (DMBOK)  
FRAMEWORK**

**( Case Study : Trenggalek District Government)**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh derajat Magister



Disusun oleh:

**Nama : Nugroho Setlo Wibowo**  
**NIM : 19.52.1170**  
**Konsentrasi : Informatics Technopreneurship**

**PROGRAM STUDI S2 TEKNIK INFORMATIKA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERANCANGAN INTEROPERABILITAS DATA PEMERINTAHAN  
DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK *DATA MANAGEMENT BODY  
OF KNOWLEDGE* (DMBOK)**

**(Studi Kasus : Pemerintah Kabupaten Trenggalek)**

**DESIGNING INTEROPERABILITY OF GOVERNMENT DATA  
USING DATA MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (DMBOK)  
FRAMEWORK**

**( Case Study : Trenggalek District Government)**

Dipersiapkan dan Disusun oleh

**Nugroho Setio Wibowo**

**19.52.1170**

Telah Diujikan dan Dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis  
Program Studi S2 Teknik Informatika  
Program Pascasarjana Universitas AMIKOM Yogyakarta  
pada hari Kamis, 04 Februari 2021

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Magister Komputer

Yogyakarta, 04 Februari 2021

**Rektor**

**Prof. Dr. M. Suyanto, M.M.**  
**NIK. 190302001**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERANCANGAN INTEROPERABILITAS DATA PEMERINTAHAN  
DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK *DATA MANAGEMENT BODY  
OF KNOWLEDGE* (DMBOK)**

**(Studi Kasus : Pemerintah Kabupaten Trenggalek)**

**DESIGNING INTEROPERABILITY OF GOVERNMENT DATA  
USING DATA MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (DMBOK)  
FRAMEWORK**

**( Case Study : Trenggalek District Government)**

Dipersiapkan dan Disusun oleh

**Nugroho Setio Wibowo**

**19.52.1170**

Telah Diujikan dan Dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis  
Program Studi S2 Teknik Informatika  
Program Pascasarjana Universitas AMIKOM Yogyakarta  
pada hari Kamis, 04 Februari 2021

**Pembimbing Utama**

**Anggota Tim Penguji**

**Prof. Dr. Ema Utami, S.Si, M.Kom.**  
**NIK. 190302037**

**Dr. Arief Setvanto, S.Si., M.T.**  
**NIK. 190302036**

**Pembimbing Pendamping**

**Alva Hendi Muhammad, S.T., M.Eng., Ph.D.**  
**NIK.**

**Hanif Al Fatta M.Kom**  
**NIK. 190302096**

**Prof. Dr. Ema Utami, S.Si, M.Kom.**  
**NIK. 190302037**

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Magister Komputer

Yogyakarta, 4 Februari 2021

**Direktur Program Pascasarjana**

**Dr. Kusriani, M.Kom.**  
**NIK. 190302106**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama mahasiswa : Nugroho Setio Wibowo  
NIM : 19.52.1170  
Konsentrasi : Informatics Technopreneurship

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul berikut:

**PERANCANGAN INTEROPERABILITAS DATA PEMERINTAHAN  
DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK DATA MANAGEMENT  
BODY OF KNOWLEDGE (DMBOK)**

Dosen Pembimbing Utama : Prof. Dr. Ema Utami, S.Si, M.Kom.  
Dosen Pembimbing Pendamping : Hanif Al Fatta M,Kom

1. Karya tulis ini adalah benar-benar ASLI dan BELUM PERNAH diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas AMIKOM Yogyakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penelitian SAYA sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Tim Dosen Pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan disebutkan dalam Daftar Pustaka pada karya tulis ini
4. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab SAYA, bukan tanggung jawab Universitas AMIKOM Yogyakarta
5. Pernyataan ini SAYA buat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka SAYA bersedia menerima SANKSI AKADEMIK dengan pencabutan gelar yang sudah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi

Yogyakarta,  
Yang Menyatakan,



UNIVERSITAS AMIKOM  
YOGYAKARTA  
6000

Nugroho Setio Wibowo

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis tentang Perancangan Interoperabilitas Data Pemerintahan Dengan Menggunakan Framework Data Management Body Of Knowledge (DMBOK) (Studi Kasus : Pemerintah Kabupaten Trenggalek) ini dengan baik dan lancar. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

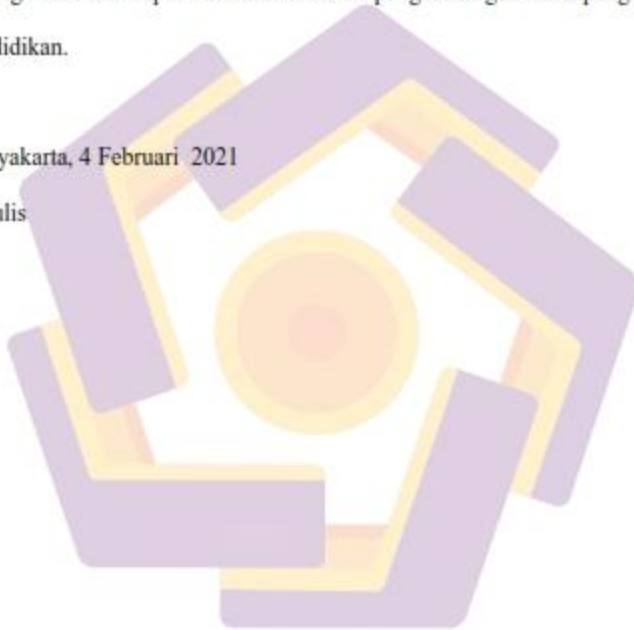
1. Bapak Prof. Dr. M. Suyanto, M.M, sebagai rektor Universitas AMIKOM Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Ema Utami, S.Si, M.Kom, sebagai pembimbing utama yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan tesis ini.
3. Bapak Hanif Al Fatta M,Kom , sebagai pembimbing pendamping yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan tesis ini.
4. Seluruh dosen dan staf administrasi yang langsung atau tidak langsung telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan tesis.
5. Dosen penguji, Bapak Dr. Arief Setyanto, S.Si., M.T., Bapak Alva Hendi Muhammad, S.T., M.Eng., Ph.D. yan telah memberikan banyak masukan membangun dalam memvalidasi penelitian tesis saya.
6. Segenap pimpinan dan rekan-rekan di PT Gamatechno Indonesia yang banyak memberikan dukungan dan support untuk penyelesaian penelitian tesis saya.
7. Rekan-rekan di Dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek yang memberikan dukungan dalam proses penelitian ini.

8. Keluarga besar saya, bapak ibu, istri tercinta (Anna Fardiana) yang terus memberikan motivasi dan dukungan doa.
9. Rekan rekan seperjuangan mahasiswa MTI angkatan 2019 kelas *B* yang saling mendukung dalam setiap aktivitas belajar mengajar.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Yogyakarta, 4 Februari 2021

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDU .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR ISTILAH .....	xii
INTISARI.....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Batasan Masalah .....	9
1.4. Tujuan Penelitian .....	10
1.5. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Tinjauan Pustaka.....	11
2.2. Keaslian Penelitian.....	20
2.3. Landasan Teori.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
3.1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian.....	37



3.2. Metode Analisis Data.....	39
3.3. Alur Penelitian.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
4.1. Obyek Penelitian.....	45
4.2. Pelaksanaan Penelitian.....	45
4.3. Pemetaan Interoperabilitas Data.....	47
4.4.1. Pemetaan Tanggung Jawab Pemenuhan Data Oleh Perangkat Daerah (Responsible).....	58
4.4.2. Pemetaan Otorisasi Perangkat Daerah Terhadap Data ( <i>Accountable</i> ) 68	
4.4.3. Pemetaan Hak Memberikan Saran Terhadap Data Oleh Perangkat Daerah ( <i>Consulted</i> ).....	75
4.4.4. Pemetaan Hak Akses Data Oleh Perangkat Daerah ( <i>Informed</i> ) ....	77
4.4. Tata Kelola Data.....	85
4.4.1 Solusi Permasalahan Data.....	87
4.4.2 Pemetaan Masalah dengan Area Keputusan.....	91
4.4.3 Konfirmasi Hasil Rancangan Struktur Tata Kelola Data.....	92
4.5 Rekomendasi Skema Interoperabilitas Data.....	93
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
5.1. Kesimpulan.....	100
5.2. Saran dan Rekomendasi.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>106</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan fokus DMBOK dengan DGI (Prasetyo & Surendro, 2013).....	7
Tabel 4.1 Data Primer dan Deskripsi Data.....	48
Tabel 4.2 Pemetaan Tanggungjawab Pemenuhan Data ( Responsible).....	58
Tabel 4.3 Pemetaan Otorisasi Perangkat Daerah Terhadap data ( <i>Accountable</i> )...	68
Tabel 4.4 Pemetaan Hak Memberikan Saran Terhadap Data ( <i>Consulted</i> ) .....	75
Tabel 4.5 Pemetaan Hak Akses Data oleh OPD ( <i>Informed</i> ).....	77
Tabel 4.6 Identifikasi masalah terkait data .....	85
Tabel 4.7 Solusi Pengelolaan Data.....	86
Tabel 4.8 Elemen Struktur Pemerintah .....	88
Tabel 4.9 Aktivitas Tata Kelola Data.....	89

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Permasalahan data pemerintahan di Indonesia.....	2
Gambar 3.1 DMBOK <i>Wheel</i> .....	28
Gambar 2.4 <i>Data Integration &amp; Interoperability</i> .....	29
Gambar 2.5 Pemetaan Permasalahan Pengelolaan Data .....	31
Gambar 2.6 Model Struktur Pengelola Data.....	32
Gambar 2.7 Gambaran model hubungan entitas sumber data.....	34
Gambar 3.1 Alur Penelitian.....	41
Gambar 3.2 Model Tabel Pengolahan Data yang Direncanakan .....	42
Gambar 3.3 Identifikasi Permasalahan Pengelolaan Data .....	43
Gambar 4.1 Klasifikasi data berdasarkan layanan SPBE.....	57
Gambar 4.2 Rancangan Struktur Tata Kelola Data Pemda Trenggalek.....	87
Gambar 4.3 Peran Aktivitas Tata Kelola Data.....	90
Gambar 4.4 Pemetaan Masalah dengan Area Keputusan .....	91
Gambar 4.5 Penggambaran Web Services .....	93
Gambar 4.7 Skema Interoperabilitas bidang urusan kepegawaian .....	95
Gambar 4.7 Struktur tabel bidang urusan kepegawaian.....	96
Gambar 4.8 Ilustrasi web services aplikasi dukcapil dengan API server BKD ....	97
Gambar 4.9 Contoh API Dukcapil.....	97
Gambar 4.10 Contoh API di BKD .....	98
Gambar 4.11 Contoh pemanfaatan API untuk verifikasi data .....	99

## DAFTAR ISTILAH

API : Application Programming Interface, sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya.

DMBOK : *Data Management Body Of Knowledge*, sebuah *based practice* untuk IT Data Management.

Data Induk/Data Primer : data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi

Interoperabilitas Data : Kemampuan Sistem Elektronik dengan Karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai Data secara terintegrasi ( Peraturan Presiden no 39, 2019).

RACI : *Responsible Accountable Consulted dan Informed*, sebuah matriks partisipasi dari berbagai peran dalam menyelesaikan tugas.

OPD : Organisasi Perangkat Daerah, sebuah lembaga di level tingkat 1 dan 2 yang dibentuk berdasarkan PP No 41 Tahun 2007.

SPBE : Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE

## INTISARI

Sesuai Peraturan Presiden no 39 tahun 2019 tentang Satu Data, untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat pertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Trenggalek Jawa Timur di 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan tata kelola dan manajemen data berdasarkan pedoman Data Management Body Of Knowledge (DMBOK). Data Management Body Of Knowledge (DMBOK) merupakan salah satu framework tata kelola data yang memberikan pendekatan model tata kelola data secara fungsional, lengkap dan menyeluruh dalam membangun tata kelola data di organisasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain survei dengan memanfaatkan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara sebagai proses validasi data. Penelitian, dilakukan dari studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, konfirmasi dan penyusunan kesimpulan serta rekomendasi.

Penelitian ini menghasilkan 210 data primer di 35 OPD dan merumuskan struktur tatakelola data di Pemerintah Kabupaten Trenggalek berdasarkan pedoman DMBOK. Struktur tata kelola data yang telah dirancang diharapkan dapat membantu Kabupaten Trenggalek dalam memecahkan 18 permasalahan data dan mengimplementasikan tata kelola data di pemerintah daerah secara efektif.

Kata kunci: Data primer, DMBOK, Interoperabilitas, RACI

## **ABSTRACT**

*In accordance with Presidential Regulation No.39 of 2019 concerning One Data, to obtain accurate, up-to-date, integrated, accountable, easily accessible and shared data, it is necessary to improve the governance of Data produced by the government. This research was conducted in the Trenggalek Regency Government of East Java in 35 Regional Apparatus Organizations (OPD). This study aims to develop data governance and management based on the Data Management Body Of Knowledge (DMBOK) guidelines. Data Management Body Of Knowledge (DMBOK) is a data governance framework that provides a functional, complete and comprehensive data management model approach in building data governance in organizations.*

*This study used a qualitative method with a survey design with a Focus Group Discussion (FGD) and interviews as a data validation process. Research, conducted from literary studies, data collection, data processing, data analysis, confirmation and preparation of conclusions and recommendations.*

*This study produced 210 primary data in 35 OPDs and formulated a data management structure in the Trenggalek Regency Government based on DMBOK guidelines. The recommended data governance structure that has been designed is expected to assist Trenggalek Regency in implementing data governance in the local government effectively.*

**Keywords:** *Primary data, DMBOK, Interoperability, RACI*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

*Electronic Government* disingkat e-Gov merupakan penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dan dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kapan dan dimanapun masyarakat bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan pelayanan publik yang diberikan pemerintah. (Firman Bimasakti, 2017) Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Government* (G2G) sebagai kebutuhan konstituen internal kedinasan maupun antar instansi pemerintah (Baik Perangkat Daerah kedinasan dan kementerian) untuk bekerja sama dengan pertukaran data meliputi *Government to Government* (G-to-G), *Government to Citizens* (G-to-C), *Government to Business* (G-to-B) *Government to Employees* (G-to-E). (Aprianty, 2016)

Keuntungan yang paling diharapkan dari penyampaian data e-Government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, aksesibilitas transparansi yang lebih baik dari pelayanan publik. Namun demikian, implementasi e-Government di pemerintahan terkadang masih terkesan kurang efektif oleh banyaknya kendala dari sisi teknis, baik dari pengembangan aplikasi e-Government yang belum lancar, dualisme aplikasi dengan tujuan yang sama sehingga menyebabkan data ganda dan tidak tervalidasi data yang mengakibatkan pemborosan waktu dan biaya. Permasalahan lain terkait data pemerintahan adalah Sulitnya mencari data

pemerintahan dan datanya tidak terstandar sehingga sulit untuk di berbagai pakaikan.



Gambar 1.1 Permasalahan data pemerintahan di Indonesia (Kantor Staff Presiden,2020)

Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan kekecewaannya terhadap data yang tidak sinkron antar satu kementerian. Ia menyebut Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berbeda dalam data kemiskinan, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pedagangan (Kemendag) berbeda dalam data pangan. Data yang valid diperlukan oleh pemerintah sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat. Perbedaan data antar kementerian berpotensi menimbulkan data yang tidak valid. Padahal data yang valid menentukan keputusan yang akan diambil agar tepat dan berkeadilan. Sementara menggunakan data yang tidak valid berpotensi menimbulkan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan tepat guna. Salah satu masalah utama perbedaan data terjadi karena masing-masing kementerian menyelenggarakan survey sendiri.



Meski data BPS digunakan sebagai dasar, masalah muncul disebabkan perbedaan indikator dan metodologi survey antara satu kementerian dengan kementerian yang lain. Perbedaan data, pada akhirnya menimbulkan pertanyaan: apakah datanya valid? terupdate? komplit? bisa digunakan? tidak redundan? apakah ada konsistensi variabel dalam kurun waktu tertentu? (Freedom of Information Network Indonesia, 2020). Beberapa pihak sepakat bahwa penerapan interoperabilitas data membawa keuntungan bagi tujuan dan performa organisasi. Namun, implementasinya bukan tanpa kendala. Dari hasil wawancara dengan pengelola teknologi informasi di empat lembaga yang diteliti dapat disimpulkan beberapa tantangan dalam interoperabilitas data di pemerintahan Indonesia, yaitu:

a. Ketersediaan Data

Kurang terkelolanya data pemerintahan dengan baik berdampak pada tidak tersedianya data ketika dibutuhkan untuk suatu analisis. Terlebih pada data lama yang tersimpan dalam bentuk yang berbeda-beda dan beragam bahkan seringkali dalam bentuk fisik. Terlebih pada data lama yang tersimpan dalam bentuk yang berbeda-beda dan beragam bahkan seringkali dalam bentuk fisik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fase pengumpulan data menjadi tantangan utama. Sebenarnya di Indonesia, data untuk berbagai jenis kebutuhan sudah tersedia dan banyak, namun sumbernya tersebar, sehingga dibutuhkan usaha lebih untuk mendapatkan data terpadu secara nasional. Maka prinsip Sharing Data bahkan Open Data diperlukan. Seiring makin meluasnya penggunaan data, semangat *open data* semakin kencang disuarakan khususnya terkait *public sector*. Maksud dari open data disini mencakup dua fitur dasar, yaitu bahwa data harus tersedia untuk umum

bagi siapa saja yang ingin menggunakannya, dan secara legal memungkinkan untuk digunakan kembali. Data yang terbuka juga harus relatif mudah digunakan, meskipun ada klasifikasi "keterbukaan" tersebut, dan tersedia secara gratis atau dengan biaya minimal.

#### b. Standarisasi Data Pemerintah

Sejalan dengan prinsip open data, data yang tersedia di Kementerian, lembaga pemerintahan, dan pemerintahan daerah, perlu disajikan dalam bentuk standar/platform tertentu yaitu format yang dapat dengan mudah digunakan kembali, dapat dibaca dengan mesin dan bersifat interoperabilitas, misalnya dalam format .xls atau .csv dan bukan dalam bentuk scan dokumen atau scan pdf. Dengan demikian, dapat meningkatkan pemanfaatan data pemerintah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.

Selain itu, adanya standarisasi data pemerintah dapat dilanjutkan dengan integrasi data antar instansi untuk efisiensi dan mencegah redundansi. Misalnya, ketika seseorang ingin mengurus Surat Ijin Mengemudi (SIM), data kependudukan yang harus diisi pada form SIM dapat ditarik dari data Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah tersedia di Bagian Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Atau ketika tenaga kerja mengajukan perijinan kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dapat dilakukan proses pengecekan data dari data kependudukan.

#### c. Privasi Data

Di satu sisi dibutuhkan keterbukaan data, namun disisi lain privasi merupakan isu yang sensitif dan sering tercedera melalui kemajuan teknologi. Privasi berhubungan dengan data-data pribadi seseorang yang harus dilindungi. Data-data yang digunakan sebagai *Big Data* oleh misalnya industri telekomunikasi maupun perbankan, yang diperoleh langsung dari konsumen, banyak yang merupakan data pribadi dan sangat rawan untuk disalahgunakan oleh pihak lain. Penggunaan data pribadi seseorang harus atas persetujuan yang bersangkutan jika akan digunakan pihak lain. Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang menyusun RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi untuk melindungi data-data pribadi warga negara. Penggunaan teknologi *Big Data* yang tidak bijak rawan akan isu privasi data. Keamanan warga negara harus diperhatikan, dimana tindakan kriminal yang mungkin muncul akibat terbukanya informasi harus diantisipasi, terlebih yang berpengaruh terhadap kestabilan negara. Sejah ini, penerapan Big Data di Indonesia wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur perlindungan data atau informasi dan pembatasan penggunaannya, di antaranya UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Perbankan, dan UU Perlindungan Konsumen.

#### d. Kompetensi SDM

Dalam memanfaatkan *Big Data* di pemerintahan idealnya dibutuhkan SDM yang ahli dibidang analisis data (*data scientist*), memiliki kemampuan analitik, keahlian pemrograman komputer, dan kreativitas untuk menentukan metode baru yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan, menginterpretasi dan

menganalisis data. Walaupun mungkin data scientist tidak mengembangkan analytic tools sendiri, namun harus mampu memilah aneka tools yang akan dipakai, serta menyeleksi dan mengorganisasi data yang akan dianalisis. (Sirait, 2016)

Sistem Informasi yang dikembangkan di daerah memiliki perbedaan platform teknologi yang digunakan, tidak bersifat open platform, tidak memiliki dokumentasi sistem yang lengkap, data-data yang belum terstruktur, dan perencanaan yang tidak memperhatikan keterkaitan data dengan sistem informasi lainnya (lintas sektoral). Hal tersebut menyebabkan sistem informasi menjadi terkotak-kotak, kesulitan dalam berkolaborasi dan bertukar data dengan sistem informasi lainnya serta munculnya pulau-pulau informasi (Ni Luh Aniek Laksmidewi, 2017)

Atas dasar berbagai permasalahan terkait data ini, peneliti bermaksud untuk mengkaji Perancangan Interoperabilitas Data Pemerintahan dengan Menggunakan Framework Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Alasan penelitian ini menggunakan framework DMBOK karena DMBOK merupakan salah satu framework mengenai manajemen data yang ruang lingkup pembahasan terkait manajemen data cukup lengkap. Hal ini diperkuat pada penelitian sebelumnya yang telah melakukan perbandingan antara Framework DMBOK dengan Framework Data Governance Institute (DGI) menyimpulkan bahwa DMBOK memiliki fokus tentang manajemen data yang lebih luas lingkungannya untuk mendukung interoperabilitas data (lihat tabel 1.1). (Prasetyo & Surendro, 2013)

Tabel 1.1 Perbandingan fokus DMBOK dengan DGI (Prasetyo & Surendro, 2013)

<b>DMBOK</b>	<b>DGI</b>
Tata kelola data	Kebijakan standard dan strategi keselarasan management
Manajemen arsitektur data	Arsitektur integrase
Pengembangan data	-
Manajemen operasional database	-
Manajemen keamanan data	Privasi /kepatuhan / keamanan
Manajemen data master dan referensi	-
Manajemen data warehouse dan business intelligence	Data warehouse dan business intelligence
Manajemen dokumen dan konten	-
Manajemen metadata	-
Manajemen kualitas data	Kualitas data

Penelitian ini nantinya mengambil studi kasus di Pemerintah Kab. Trenggalek. Saat ini Pemerintah Kab. Trenggalek sedang membentuk Forum Satu Data Trenggalek yang membahas isu-isu terkait pengelolaan data pemerintahan. Sama halnya dengan permasalahan di daerah lain, di Kabupaten Trenggalek ketersediaan data pada sistem perencanaan kini menjadi hal yang sangat mendesak dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Terdapat 19 OPD yang belum online, datanya juga masih dikelola secara manual dan masih tersebar sehingga belum dapat dimanfaatkan oleh dinas lain. Selain itu belum adanya

penentuan walidata dan Nantinya Diskominfo berperan sebagai *lead* untuk pengelolaan data harapannya data-data yang ada dapat di berbagipakaikan antar OPD (Pembab Trenggalek, 2020).

Untuk membantu menyelesaikan permasalahan di Pemerintahan Kab. Trenggalek dibutuhkan strategi dengan menyusun kerangka kerja interoperabilitas untuk pertukaran data di sektor pemerintahan dan tata kelolanya. Interoperabilitas dalam lingkup e-government berarti kemampuan sistem e-government untuk berkolaborasi dengan sistem e-government lain secara lintas sektoral (Banister & Conoly, 2014).

Pemerintah Indonesia sudah mengatur terkait Interoperabilitas data ini di Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pasal 1 ayat 1 yaitu terkait kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemetaan interoperabilitas data lintas Organisasi Perangkat Daerah dan tatakelola datanya penting dilakukan sehingga kedepannya memudahkan dalam melakukan integrasi aplikasi. Hal ini juga tercantum dalam rencana kerja di Masterplan Program/kegiatan Masterplan E-gov Kab Trenggalek 2018-2022 untuk penentuan Wali Data, tanggung-jawab dan

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berikut beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini

1. Apa saja data induk/data primer untuk keperluan Interoperabilitas data lintas Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Trenggalek?

2. Bagaimana solusi tata kelola data untuk menyelesaikan permasalahan data di pemerintah Kabupaten Trenggalek?

### 1.3. Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Batasan dalam penelitian ini adalah terkait permasalahan data sebagai berikut :

- a. Penelitian ini dilakukan di 35 organisasi perangkat daerah (OPD) di pemerintah kabupaten Trenggalek
- b. Tatakelola data berdasarkan struktur organisasi yang ada di pemerintah Kabupaten Trenggalek
- c. Penelitian ini akan menghasilkan Pemetaan Interoperabilitas data lintas Organisasi Perangkat Daerah (data induk)
- d. Data yang diinteroperabilitaskan yang sifatnya tidak rahasia atau *confidential* antar OPD Kabupaten Trenggalek. Data rahasia adalah data yang diatur dalam peraturan/kebijakan khusus apabila akan digunakan oleh pihak lain.
- e. Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia memiliki 4 (empat) prinsip dasar yaitu: Satu Standar Data, Satu Metadata Baku, Interoperabilitas Data, Referensi Data. Dalam penelitian ini hanya membahas perancangan terkait interoperabilitas data.
- f. Kuisisioner disusun berdasarkan hasil konsultasi dengan Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Trenggalek

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun data primer dan skema Interoperabilitas data lintas Organisasi Perangkat Daerah (data primer) di Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- b. Mendefinisikan tata kelola data yang sesuai untuk Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek terkait tatakelola data supaya interoperabilitas data bisa terwujud.
- b. Membantu pengelola data di OPD untuk memetakan permasalahan pengelolaan data dan solusi yang harus dilakukan.
- c. Memberikan kontribusi ilmiah penggunaan framework DMBOK untuk manajemen data di pemerintahan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Pustaka

Sebuah disertasi yang berjudul Model *Assesment* Interoperabilitas Data Geospasial Dalam Pengembangan Infrastruktur Pertanahan Di Indonesia, menyimpulkan bahwa perlu adanya standarisasi dasar dan layanan untuk sebuah interoperabilitas data, khususnya tentang informasi geospasial (Diyono, 2015). Sehingga penting ditentukan sebuah meta data yang bersifat wajib atau hanya sebagai pelengkap (opsional). Dari penelitian ini, dihasilkan juga sebuah asesmen *tools* untuk interoperabilitas data informasi geospasial di lingkungan lembaga pertanahan. Dari desetasi ini, hanya mencuplik 1 domain pengelolaan data di pemerintahan, yaitu pertanahan. Peneliti melihat pentingnya melakukan hal serupa untuk di domain data lainnya, tidak hanya ranah pertanahan saja.

Dampak lanjutan dari masalah sinkronisasi tersebut dirasakan oleh operator sistem di lapangan yakni adanya proses pemasukan data yang berulang-ulang (Ma'arif, 2016). Peneliti melihat sebuah fenomena entri data yang berulang adalah akibat dari inkonsistensi data, sehingga membuat sebuah standar data yang disepakati bersama, menjadi sangat penting dan krusial. Penyesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah pun diperlukan. Pemahaman mengenai uraian tugas yang baik akan sangat mempengaruhi kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, perlu diadakannya suatu tata kelola tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang baik pula (Kurniasih, 2016).

Pengintegrasian sistem informasi sudah cukup jelas tertulis didalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* (e-Gov), ini merupakan langkah awal implementasi e-Gov di Indonesia, penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah telah dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan TI (Wahyuni, 2015). Untuk pengembangan integrasi antar aplikasi, dalam hal ini kebutuhan integrasi data yang saling terkait. *Web service* bisa menjadi alternative solusi untuk proses pertukaran data (Sutanta, 2012), dan juga integrasi antar aplikasi yang berbeda *platform* (Romdoni, 2013). Selain dari sisi teknologi, unsur tata kelola IT juga mengambil peran penting. Karena, kesuksesan implementasi e-Gif dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya : sumber daya manusia, legalitas, teknologi dan kemauan politik (Haribawono, 2011). *Maturity level* sebuah tata kelola dan kecukupan kontrol terhadap proses IT perlu didukung dengan kebijakan pimpinan daerah melalui sebuah Surat Keputusan (SK). Bahkan, sampai dengan melakukan perubahan struktur organisasi pengelola *e-government*, sehingga kecukupan terhadap pemenuhan dasar pengelolaan di level pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan (Nugraha, 2014). RACI *chart* juga di kenal sebagai matriks penugasan tanggung jawab / *Responsibility Assignment Matrix* (RAM) yang menggambarkan peran berbagai pihak dalam penyelesaian suatu pekerjaan dalam suatu proyek atau proses bisnis (Nugrahadi, 2017). Sehingga ini akan mengarahkan pada sebuah tata kelola yang lebih *responsible* dan sesuai aturan yang berlaku.

Hal tersebut juga harus didukung oleh komitmen pimpinan dalam agenda asesmen yang rutin dilakukan, untuk terus dapat ditingkatkan nilai akurasinya dan *maturity level* yang ingin dicapai sebuah daerah. Dari penelitian sebelumnya, peneliti juga melihat ada celah ide untuk melakukan sebuah integrasi data, penting adanya *maturity data* dan tata kelola, perubahan organisasi dan juga dukungan teknologi yang semakin mempermudah sistem untuk saling berkomunikasi, namun *basic data* yang baik dan terstandar menjadi sebuah harga mati untuk dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Magelang guna membangun sebuah kualitas pelayanan publik berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat melalui aplikasi teknologi informasi (RPJMD, 2016).

Dari sekian banyak pemodelan data dan kajian tentang DQM, sebuah pendekatan kontigensi yang menguraikan peran data, area keputusan dan tanggungjawab menjadi sebuah rujukan yang tepat untuk memastikan akuntabilitas data sebuah instansi. Manajemen kuantitas data tidak sepenuhnya sebanding dengan manajemen IT (karena adanya perspektif bisnis yang ada dalam DQM. Selain itu perlu dilakukan perincian pada domain alokasi keputusan, studi organisasi, teori organisasi dan psikologi organisasi (Wende, 2007). Dari penelitian ini, tersirat bahwa menguraikan peran data pada area keputusan sangat penting dan perlu dirincikan.

Berdasarkan *review* penelitian sebelumnya, baik dalam skala internasional maupun nasional yang peneliti lakukan, maka dalam penelitian kali ini akan lebih spesifik dilakukan kajian tentang pemodelan data primer/pokok yang menjadi dasar integrasi antar aplikasi yang ada di Pemerintah Kota Magelang berdasarkan

ketugasan yang dimandatkan kepada OPD, dengan menggunakan pendekatan tata kelola RACI *chart*. Inkonsistensi data yang ada di lingkungan pemerintah daerah sedikit banyak akan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil. Redundansi data yang ada juga disebabkan oleh isolasi data di setiap instansi, karena data yang dimiliki tidak dibagi penggunaannya dengan instansi lain secara terpusat (Haribawono, 2011).

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, tidak dilakukan pembahasan dan perancangan data secara spesifik dan multi domain, namun hanya terbatas pada kerangka makro dan spesifik ke domain data tertentu. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih mengedepankan pemanfaatan teknologi terkini untuk kebutuhan interoperabilitas antar aplikasi, belum menyentuh pada kamus data pokok yang menjadi kewenangan di masing-masing instansi atau domain. Pemerintah mengatur pelaksanaan e-government dengan menebitkan Peraturan Presiden no 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Adanya peraturan tersebut mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan e-government dan mendorong integrasi sistem .

Dalam sebuah penelitian untuk tesis Ni Luh Aniek Laksmidewi tahun 2017 disampaikan bahwa mengenai mengenai tumpang tindihnya penyediaan data yang berujung pada ketidakakuratan informasi. Interoperabilitas merupakan salah satu solusi dan dalam implementasinya diperlukan sebuah framework . Dalam penelitian tersebut mengambil empat sampel sistem informasi yaitu SIMPEG, Sistem Informasi Absensi Pegawai SKPD, SIM Gaji dan SIPKD. Melakukan evaluasi kondisi eksisting sistem informasi berdasarkan dokumentasi aplikasi.

Evaluasi menggunakan COBIT 4.1 . Hasil dari penelitiannya berupa rekomendasi implementasi interoperabilitas data di pemerintah provinsi Bali dengan mengadopsi konsep middleware (Ni Luh Aniek Laksmidewi, 2017).

Dalam penelitian ini hanya 4 aplikasi dengan 4 organisasi perangkat daerah (OPD) saja obyek penelitiannya. Peneliti melihat ide untuk melakukan penelitian untuk keseluruhan OPD dalam hal ini di Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Terkait Interoperabilitas , Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sudah mengeluarkan Pedoman Nomor 7 tahun 2013 mengenai Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan publik. Interoperabilitas dalam organisasi berkaitan dengan kemampuan sistem dan aplikasi IT yang berbeda untuk saling berkomunikasi. Dengan kata lain, perangkat yang ada nantinya mampu bertukar dan menginterpretasi data yang dibagikan satu sama lain.

Kemampuan bertukar data ini juga akan meminimalkan proses double entry untuk data yang sama ke dalam perangkat lunak yang berbeda (Ma'arif, 2016). Double entri ini bisa terjadi karena tidak adanya standar data yang disepakati bersama. Sumber data yang dibutuhkan untuk pemerintah daerah merupakan turunan dari tugas dan fungsi di organisasi perangkat daerah.

Pemahaman mengenai uraian tugas yang baik akan sangat mempengaruhi kinerja perangkat daerah dan ketersediaan datanya, sehingga perlu tata kelola tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang baik (Kurniasih, 2016).

Interoperabilitas data tertuang di Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pasal 1 ayat 1 yaitu terkait kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Data induk atau data primer merupakan prasyarat utama integrasi sistem di pemerintah daerah dalam rangka e-government. Sebagaimana diamanahkan dalam strategi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), tentang standarisasi interoperabilitas transaksi informasi. COBIT 4.1 merekomendasikan acuan matrix penugasan tanggungjawab/Responsibility Assignment Matrix (RAM) dalam bentuk RACI Chart (Responsible, Accountable, Consulted, Informed). ( Nanang Ruswianto, 2018),

Takakelola data memegang peranan yang penting dalam suksesnya implementasi interoperabilitas data. Tata kelola Data yang efektif dapat meningkatkan kualitas, ketersediaan dan integritas data dengan meningkatkan kolaborasi lintas-organisasi yang terstruktur terhadap kebijakan. (Ferra Arik Tridalestari dkk, 2015). Jurnal tersebut menggambarkan bagaimana mengidentifikasi kebutuhan tata kelola data khususnya di perguruan tinggi. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan peffers dan studi kasus dilakukan di Universitas X. Adapun analisis yang dilakukan adalah melakukan identifikasi kebutuhan tata kelola data diperguruan tinggi dengan

referensi DAMA International melalui pemetaan dan pengukuran terhadap proses bisnis yang didasarkan pada konsep Tridharma perguruan tinggi.

Banyaknya data yang dimiliki dan dikelola mengakibatkan perlunya manajemen data lembaga yang komprehensif (Mutia Aisyah, 2018). Mutia Aisyah meneliti tentang tata kelola data dan struktur manajemen ini berdasarkan pedoman Badan Manajemen Data Pengetahuan (DMBOK). Hasil dari penelitian ini adalah standar dan pedoman untuk mendukung implementasi tata kelola data dalam Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia (LPS).

Mengacu pada konsep interoperabilitas antar sistem, komunikasi antar sistem aplikasi dapat diatasi dengan melakukan pertukaran data antar sistem aplikasi dengan menggunakan layanan web services. Dalam konsep web services, aplikasi-aplikasi yang akan dikomunikasikan dapat dipetakan berdasarkan fungsi dan perannya dalam proses pertukaran data (Edhy Sutanta, dkk, 2012)

Tujuan web services pengembangan adalah untuk “menjembatani komunikasi antar program”, sehingga aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain yang terdapat pada jaringan yang sama atau pada jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan standar protocol yang ditetapkan oleh web services (Adi dkk, 2013).

Web Service sudah terbukti banyak diimplementasikan pada proses integrasi sistem. Ada dua metode web service yang sering digunakan untuk membangun sebuah sistem web service yaitu Simple Object Access Protocol (SOAP) dan Representational State Transfer (REST) (Kamarudin, 2018).

Hasil kajian TUPOKSI masing-masing OPD, visi dan misi, serta indikator kinerja RPJMD 2016 – 2021, hingga 2022 Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus menangani 1048 urusan atau 95 kelompok urusan, (Masterplan E-government Kabupaten Trenggalek 2018-202).

Dalam kelompok urusan yang cukup banyak tersebut sangat terkait dengan data-data yang harus disajikan untuk keperluan interoperabilitas dan tata kelolanya.

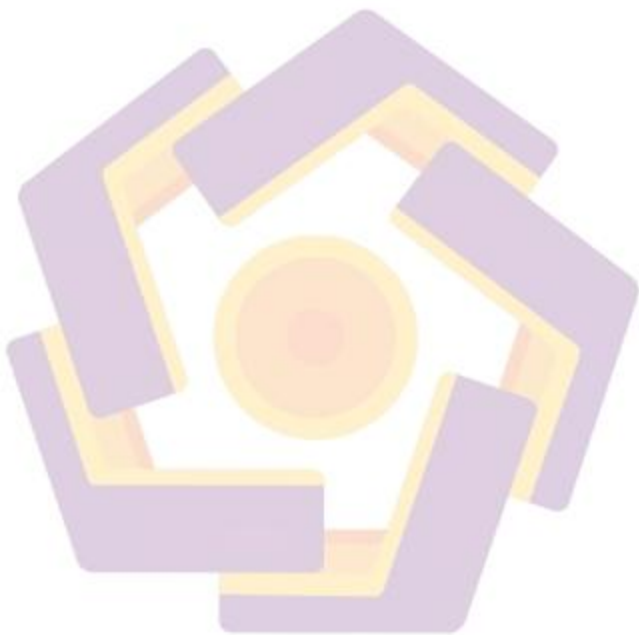
Pengelolaan data ini perlu distandarisasi di seluruh organisasi, dan tidak terpusat hanya di unit IT saja. Hal ini disampaikan Hüner, K. M., Otto, B., dkk bahwa ketentuan hukum, pertukaran data lintas perusahaan dan pelaporan atau prosedur perencanaan dalam perusahaan membutuhkan objek bisnis yang ditentukan secara komprehensif, tepat waktu, tidak ambigu, dan dapat dipahami (misal, bahan, pelanggan, dan pemasok). Metadata korporat yang dikelola secara terpusat manajer (misalnya dalam departemen TI pusat) hampir tidak mampu memenuhi semua tuntutan ini dan seharusnya didukung oleh pengguna utama dari beberapa divisi dan wilayah bisnis (Hüner, K. M., Otto, B., dkk, 2011).

Hal ini juga sama yang terjadi di pemerintahan, tanggungjawab terkait data harusnya tidak hanya di kominfo, tetapi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Peneliti mempunyai ide selain pemetaan data induk juga bagaimana merancang struktur dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan data di pemerintahan.

Dari *review* penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan, maka dalam penelitian kali ini dilakukan kajian untuk menghasilkan rancangan tatakelola data, melakukan identifikasi permasalahan dan solusi apa yang dapat diberikan



menggunakan DMBOK serta Pemetaan Interoperabilitas data lintas Organisasi Perangkat Daerah (data primer/data induk).



## 2.2. Keaslian Penelitian

Tabel 2. Matriks literatur review dan posisi penelitian  
Perancangan Interoperabilitas Data Pemerintahan dengan Menggunakan Framework *Data Management Body Of Knowledge* (DMBOK)

No	Judul	Peneliti	Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
1	Identifikasi Fungsi Tata Kelola Data Framework Dama International Pada Universitas X	Ferra Arik Tridalestari Hanung Nindito Prasetyo	Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume II, No 1, 15 Desember 2015	Paper ini menggambarkan bagaimana mengidentifikasi kebutuhan tata kelola data khususnya di perguruan tinggi	Berdasarkan model DAMA Internasional dan ciri khas proses perguruan tinggi yaitu tridharma diperoleh hasil berdasarkan studi kasus Universitas X yaitu fungsi utama tata kelola data meliputi Tata kelola data. Manajemen konten, data master dan referensi dan manajemen Kualitas data	Terbatas pada integrasi domain di perguruan tinggi	Penelitian ini berbasis literatur mengedepankan menerangkan tentang tatakelola data di DAMA-DMBOK.  Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih kepada perancangan data interoperabilitas dan solusi yang detail terkait permasalahan tatakelola data menggunakan DAMA-DMBOK

Tabel 2 (Lanjutan)

No	Judul	Peneliti	Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
2	Analisis Dan Perancangan Master Data Management Berbasis Dama-Dmbok V2 (Studi Kasus : Pt. Kereta Api Indonesia)	Bagus Aria Nugraha, 2 R. Wahjoe Witjaksono, ST., MM 3 Rahmat Mulyana, ST., M., MB A,	e-Proceeding of Art & Design : Vol.5, No.3 Desember 2018   Page 3282	fokus penelitian kali ini adalah untuk menerapkan Mekanisme analisa salah masalah redundansi data terkait transaksi pelanggan ketika dilakukan di PT Kereta Api dengan MDM	analisis risiko dan penilaian kematangan melalui assesment data maturity ditemukan risiko risiko di PT.Kereta Api Indonesia berada di level low sehingga untuk tingkat kematangan data atau maturity sudah berjalan dengan baik	Perlu adanya alternatif pemilihan teknologi	Penelitian ini lebih difokuskan terkait assesment terkait kematangan data .  Penelitian yang akan dilakukan ke solusi permasalahan terkait kewenangan dalam tata kelola data
3	Model Asesmen Interoperabilitas Data Geospasial Dalam Pengembangan Infrastruktur Pertanahan Di Indonesia	Diyono	Desertasi ; Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015	Penelitian ini bertujuan membuat model asesmen interoperabilitas DG/IG untuk menilai kesesuaian data berdasarkan sintak dan strukturny	Menghasilkan model asesmen interoperabilitas IG berbasis elemen metadada dalam rangka pengembangan IIP di Indonesia dengan studi kasus pengembangan IIP di Kabupaten Sleman. Untuk mengembangkan IIP di Indonesia perlu disediakan IG Dasar (IGD) skala besar dan IG Tematik Utama (IGTU) pertanahan sebagai rujukan dalam menyelenggarakan SAP		Domain spesifik di data geospasial.  Penelitian yang baru untuk domain organisasi yang lebih luas
4	Framework Interoperabilitas Data E-Government Provinsi Bali Dengan	Ni Luh Aniek Laksmidewi	Tesis <a href="https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/0c8df6e7173d0be945004c377413b339.pdf">https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/0c8df6e7173d0be945004c377413b339.pdf</a> 2017	Melakukan evaluasi dna terbentuknya framework interoperabilitas data e-government di Pemerintah	Hasil evaluasi belum optimalnya keamanan sistem, pengelolaan data, pengelolaan infrastruktur teknologi, dan disusun framework interoperabilitas disusun dengan mengadopsi	Penambahan rekomendasi teknologi	Penelitian ini analisisnya menggunakan COBIT dengan empat sampel aplikasi di Penelitian yang baru identifikasi data untuk

Tabel 2 (Lanjutan)

No	Judul	Peneliti	Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
	Cobit 4.1 Dan legif			Provinsi Bali	konsep middleware.		seluruh Organisasi Perangkat Daerah
5	Designing Data Governance Structure Based On Data Management Body of Knowledge (DMBOK) Framework: A Case Study on Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC).	Mutiara Aisyah1, Yova Ruldeviyai	International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS) Universitas Indonesia, 2018	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan tata kelola dan manajemen data berdasarkan pedoman DMBOK di LPS	Hasil penelitian ini adalah standar dan pedoman untuk mendukung implementasi tata kelola data dalam LPS	Konfirmasi terkait usulan struktur tatakelola data sebaiknya menggunakan FGD yang melibatkan seluruh komponen struktur yang terlibat	Penelitian ini lebih ke penyusunan struktur organisasi dalam pengelolaan data  Penelitian yang baru mencakup penyusunan data induk/data primer dan tatakelola datanya.
6	Kebutuhan Web Service Untuk Sinkronisasi Data Sistem Informasi Dalam e-Gov di Pemkab Bantul Yogyakarta	Edhy Suntanta, Khabib Mustofa	Jurtek STMIK Bandung, Edisi Mei 2012	Mengatasi masalah sinkronisasi antar sistem informasi dan melakukan sinkronisasi data antar aplikasi yang sudah ada di lingkungan kabupaten Bantul dengan memanfaatkan	Webservice bisa menjadi alternatif solusi untuk proses pertukaran data antar sistem informasi	Prioritas terkait data induk yang digunakan oleh banyak pihak seperti data kependudukan	Output dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pemanfaatan model webservice untuk pertukaran data, dimana tidak dilakukan pemetaan terlebih dahulu terkait dengan data pokok antar instansi yang ada

Tabel 2 (Lanjutan)

No	Judul	Peneliti	Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
7	Data Governance Defining Accountabilities For Data Quality Management	Wende, Kristin, kristin.	Conference: Swiss – Italian Workshop on Information Systems (SIWIS 2007, Side Event of ECTS 2007), At St. Gallen	Merancang tata kelola data dengan menguraikan peran data, area keputusan dan tanggungjawab menggunakan RACI	tata kelola membantu organisasi dalam menyusun manajemen kualitas data tidak sepenuhnya sebanding dengan management IT)	penelitian lanjutan untuk merincikan pada domain yang disetujui, studi organisasi, teori organisasi dan psikologi organisasi	Penelitian ini memberikan gambaran model tatakelola data dengan konsep COBIT dan RACI.  Penelitian yang akan dilakukan mendetailkan data induk dan tatakelola datanya.
8	Kesiapan Tata Kelola Data (Data Governance Rediness) Faktor Teknologi Informasi (Studi Kasus: Program studi Ilmu Komputer FPMIPA UPI)	Budi Laksono Putro	Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Volume II nomor 2 Desember 2013	Pengembangan model kesiapan tata kelola data (data governance rediness) faktor teknologi informasi (studi kasus: program studi ilmu komputer FPMIPAUPI)	Secara keseluruhan, skor rendah pada kesiapan infrastruktur integrasi data untuk mendukung program tata kelola data. Ini akan sulit untuk memastikan keberhasilan berkelanjutan dari program tata kelola data tanpa investasi tambahan dalam infrastruktur.	Bisa ditambahkan rekomendasi terkait struktur dan wewenang dalam pengelolaan data	Penelitian ini lebih ke evaluasi tatakelola data dengan skoring.
9	Data Quality Management Maturity Measurement of Government-Owned Property Transaction in BMKG	Wibisono, Septian B.,	<i>Communication and Information Technology Journal</i> , vol. 12, no. 2, 2018	Penelitian kualitatif menggunakan studi dokumen dan beberapa sesi wawancara bertujuan untuk mengukur seberapa baik data Manajemen Kualitas (DQM) jatuh tempo	Penelitian menunjukkan tingkat kematangan data manajemen di BMKG dan rekomendasinya	Saran, perlu ada struktur dan kewenangan dalam pengelolaan data	Penelitian lebih fokus mengukur tingkat kematangan pengelola data di GOP BMKG, kemudian rekomendasi dengan panduan di DMBOK  Penelitian yang baru terkait permasalahan

Tabel 2 (Lanjutan)

No	Judul	Peneliti	Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
				dari transportasi GOP			pengelolaan data nya dan aksi yang harus dilakukan menggunakan panduan DMBOK
10	Perancangan Data Primer Untuk Layanan E-Government Berbasis Ketugasan Dengan Pendekatan Model Diagram Raci (Study Kasus : Pemerintah Kota Magelang)	Nanang Ruswianto, Ema Utami, M., Rudyanto Arief	<i>Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2018 UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta, 10 Februari 2018</i>	Penelitian ini untuk menentukan data primer berdasarkan ketugasan dalam bentuk RACI Chart (Responsible, Accountable, Consulted, Informed). RACI Chart dimanfaatkan untuk penentuan penanggungjawab data primer dalam tatanan e-government di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, dengan melibatkan 36 Organisasi Perangkat Daerah	Penelitian ini menghasilkan 96 data primer di 36 OPD di Pemerintah Kota Magelang yang akan diimplementasikan sebagai standart integrasi data. Rekomendasi teknologi dan architecture interoperability dihasilkan guna mengimplementasikan integrasi yang berkelanjutan.	Saran perlu ditambahkan tatakelola datanya, selain kewenangan dalam bentuk raci chart, juga struktur organisasi dalam pengelolaan data.	Penelitian ini untuk mengidentifikasi data induk/data primer di kota Magelang dan rekomendasi teknologi.  Penelitian yang dilakukan selain penyusunan data primer menggunakan RACI, juga tatakloa datanya, struktur pengelola data dan solusi terkait permasalahan pengelolaan data menggunakan DMBOK di Kabupaten Trenggalek

Tabel 2 (Lanjutan)

No	Judul	Peneliti	Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
11	Analisis Dan Perancangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Domain Metadata Management Berbasis Dama Dmbok V2: Studi Kasus Di Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat	Akbar Adriansyah Irfan, Darmawan Rahmat, Mulyana	e-Proceeding of Engineering : Vol.6, No.2 Agustus 2019, ISSN : 2355-9365	tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi eksisting kegiatan tata kelola data khususnya manajemen <i>metadata</i>	Penelitian ini menyampaikan analisa bahwa proses tata kelola data dan manajemen <i>metadata</i> di <i>Diskominfotik Kab Bandung Barat</i> belum efektif sehingga diberikan rekomendasi terhadap <i>people</i> , proses dan <i>technology</i>	Hasil penelitian ini terkait bagian <i>people</i> sebaiknya dibuat susunan struktur pengelola datanya	Penelitian ini lebih ke identifikasi terkait proses manajemen <i>metadata</i> dan rekomendasinya.  Penelitian yang akan dilakukan adalah perancangan data primer, tatakelola data dan racangan integrasi.
12	Pengembangan Model Interoperabilitas Aplikasi E-Government Untuk Proses Perencanaan, Penganggaran, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Di Indonesia	Muhammad Rifqi, Ma'arif	TEKNOMATIKA Vol. 8, No. 2, JANUARI 2016, ISSN: 1979-7656	Merumuskan skema interoperabilitas yang bisa dibangun antar sistem e-government dalam pembangunan daerah.	Hasil penelitian ini adalah rancangan interoperabilitas sistem untuk perencanaan, penganggaran, serta <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan daerah	Teknologi yang digunakan bisa lebih dijelaskan	Penelitian ini terbatas untuk merancang interoperabilitas di sistem perencanaan anggaran dan evaluasi

### 2.3. Landasan Teori

Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data diatur dalam Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia . Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperabel atau mudah dibagi pakaikan antar pengguna data. Satu Data Indonesia memiliki 4 (empat) prinsip dasar yaitu:

- a. Satu Standar Data;
- b. Satu Metadata Baku;
- c. Interoperabilitas Data;
- d. Referensi Data.

Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat. Perpres ini diharapkan dapat mengharmonisasi data-data yang diperoleh masing-masing kementerian dan lembaga. Pertimbangan penerbitan perpres tersebut bertujuan memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi-pakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus menangani 95 kelompok urusan dan 216 layanan publik seperti yang tertuang indikator kinerja yang ada di RPJMD tahun 2016-2021, (Masterplan E-gov Kab Trenggalek 2018-2022).

Dengan cukup banyaknya kelompok urusan dan layanan publik yang harus ditangani, perlu pengelolaan data yang baik sesuai prinsip yang diatur



dalam Perpres tersebut antara lain memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah Interoperabilitas (penyebaran) Data, dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk. Dari 4 (empat) prinsip dasar tersebut, dalam penelitian ini akan membahas terkait perancangan yang berhubungan dengan interoperabilitas data. Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi (Peraturan Presiden no 39, 2019).

Dalam pengelolaan data induk besar dan melibatkan banyak instansi, permasalahan data sering muncul, sehingga perlu adanya tata kelola data. Penyusunan tata kelola data dalam penelitian ini menggunakan panduan *DAMA-DMBOK Data Management Body of Knowledge 2nd Edition*.

DAMA-DMBOK pertama kali dirilis pada tahun 2009 oleh The Data Asosiasi Manajemen atau lebih dikenal dengan DAMA Internasional. DAMA internasional merupakan organisasi nirlaba terkait manajemen data yang bertujuan untuk menyediakan pengetahuan, peningkatan dan pengalaman dalam mengelola data untuk mendukung strategi organisasi.

DAMA International mengungkapkan bahwa saat ini organisasi telah menempatkan data dan informasi sebagai organisasi aset yang membantu dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga itu perlu dikelola secara efektif. Kerjasama antara sisi bisnis dan teknologi informasi (TI) perlu dilakukan untuk menyediakan dan mengendalikan data dan informasi. Manajemen data adalah fungsi bisnis dalam mengelola dan menyediakan aset data dan informasi (Mutiara Aisyah, Yova Ruldeviyai, 2018).



Copyright © 2017 DAMA International

Gambar 2.1 DMBOK *Wheel*

Dalam gambar 2.1, Framework DAMA international memperlihatkan bahwa fungsi tata kelola data merupakan inti. Fungsi tata kelola data berinteraksi dan mempengaruhi fungsi lain yang mengelilinginya. Tata kelola data berkaitan dengan otoritas dan kendali (perencanaan, pengawasan, pelaksanaan) terhadap aset data (Mosley, 2009).

Integrasi data dan Interoperabilitas menurut DMBOK mempunyai pengertian bagaimana mengelola pergerakan dan konsolidasi data di antara aplikasi dan organisasi. . Integrasi data adalah merubah data menjadi bentuk yang konsisten, baik secara fisik maupun virtual. Sedangkan interoperabilitas adalah kemampuan data untuk dapat berkomunikasi dengan beberapa sistem



Gambar 2.3 Data Integration & Interoperability DMBOK

Seperti ditunjukkan gambar 2.3 ada beberapa teknik (*techniques*) untuk integrasi data seperti *Extract Transformation Tools* (ETL), *Enterprise Application Integration* (EAI) dan *Service Oriented Architecture* (SOA). *Tools* yang digunakan menggunakan *Data Transformation Engine*, *Data Virtualization Server*, *Enterprise Service Bus*, *Data Profiling Tool*, dan *Metadata Repository*.

Selanjutnya untuk pengukuran (*metrics*) dari hasil proses integrasi data dan inteoperabilitas meliputi volume data dan kecepatan *delivery*, latensi data (*data latency*), waktu untuk peningkatan ke *market* , solusi biaya dan kompleksitasnya (*solution* , serta proses penyampaian nilai (*value delivered*).

Di pemerintah daerah, berbagai urusan yang berkaitan data berhubungan dengan tugas fungsi di masing-masing organisasi perangkat daerah, sehingga di setiap organisasi daerah harusnya mempunyai data induk/data primer. Untuk pemetaan data data primer/data induk berdasarkan ketugasan menggunakan matrik RACI (Nanang Ruswianto, 2018) yaitu:

**Responsible** : OPD yang melakukan aktivitas untuk pemenuhan terhadap data primer yang didefinisikan.

**Accountable** : OPD yang akhirnya bertanggungjawab dan memiliki otoritas untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan data primer yang dikelola.

**Consulted** : OPD yang memberikan umpan balik dan sarannya serta berkontribusi perbaikan pada data primer yang ada.

**Informed** : OPD yang membutuhkan data primer untuk mendukung ketugasannya

Bagan RACI sendiri sering disesuaikan dengan proses pengambilan keputusan dan dinamika model komunikasi yang diselenggarakan. Selain itu, di beberapa kasus juga digunakan sebagai kendaraan untuk memastikan adanya keterlibatan dan kejelasan komunikasi. Secara umum, pelacakan dan pengelolaan komunikasi utama pada sebuah master data harus dikelola secara ketat.

Dari fungsi manajemen data yang ada, tata kelola data juga digambarkan sebagai atap data lainnya fungsi manajemen atau dikenal sebagai "manajemen

atap. Aktivitas dalam tata kelola data mengelola atau menghasilkan strategi data, kebijakan data, arsitektur data, data standar dan prosedur data, kepatuhan terhadap peraturan, masalah manajemen, proyek manajemen data, manajemen data layanan, penilaian aset data, komunikasi dan promosi.

Struktur tata kelola data dalam implementasinya harus diatur oleh organisasi yang bertindak sebagai badan pengatur. Desain struktur tata kelola data sangat penting untuk implementasi program tata kelola data itu sendiri. Penelitian pemetaan permasalahan tatakelola data ini menggunakan matrik pemetaan yang ditunjukkan di gambar 2.4 ( Mutiara Aisyah, 2018).

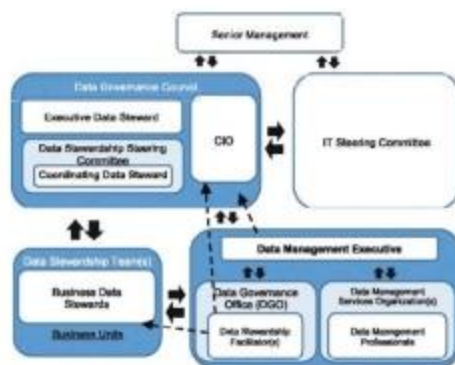
No	Mapping of problems and data governance solution	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	A	√	√				√	√	√	√		√
2	B		√	√	√		√	√	√	√		√
3	C		√	√		√		√	√	√	√	√
4	D	√	√				√	√				
5	E		√	√			√	√		√		
6	F		√				√	√		√	√	√
7	G								√	√	√	√
8	H		√	√		√	√	√	√	√		√
9	I	√					√					
10	J	√	√				√	√				
11	K				√							
12	L						√					
13	M	√										
14	N			√						√	√	
15	O	√	√	√			√				√	

solusi permasalahan data

Identifikasi Masalah

Gambar 2.4 Pemetaan Permasalahan Pengelolaan Data

Untuk struktur tata kelola data yang menggambarkan hubungan antara peran dalam tata kelola data di Indonesia sesuai dengan fungsi dan relevansi masing-masing peran (Mutiara Aisyah, 2018) dalam gambar 2.5.



Gambar 2.5 Model Struktur Pengelola Data

Organisasi sumber master data yang akan dikembangkan dikategorikan menjadi sebelas domain master data berdasarkan kebutuhan data sharing informasi yang merujuk pada layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), meliputi :

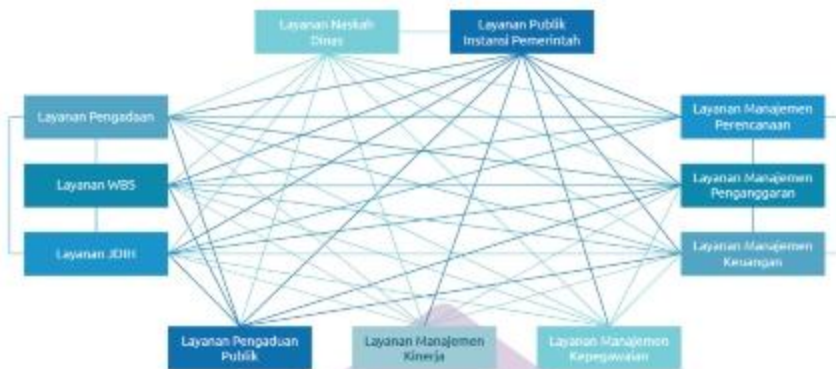
Tabel 2.1 Layanan SPBE

No	Layanan SPBE
1	Layanan Naskah Dinas
2	Layanan Manajemen Kepegawaian
3	Layanan Manajemen Perencanaan
4	Layanan Manajemen Penganggaran
5	Layanan Manajemen Keuangan
6	Layanan Manajemen Kinerja
7	Layanan Pengadaan
8	Layanan Pengaduan Publik
9	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
10	Layanan Whistle Blowing System
11	Layanan Publik Instansi Pemerintah

Penyusunan struktur sumber data daerah akan melibatkan Perangkat Daerah-Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek guna memetakan sumber data yang dimiliki dan dibutuhkan oleh Perangkat Daerah beserta normalisasi dan proses komunikasi dan pertukaran data yang akan berlangsung.

Mengingat kompleksitas yang dimiliki dalam rangka penyusunan struktur sumber data daerah maka pada tahapan ini akan difokuskan pada penyusunan model struktur data master pada sumber data yang kemudian akan dapat dikembangkan secara bertahap pada tahapan selanjutnya dan berkembang mengikuti kompleksitas kebutuhan informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Desain model data pemerintah adalah merupakan rancangan teknis struktur sumber data data dalam bentuk sebuah model data. Model data adalah penggambaran data dalam bentuk entitas dimana setiap entitas akan memiliki atribut-atribut yang terkait dengan entitas tertentu. Penggambaran model data pemerintah dilakukan secara bertingkat mulai dari konteks 0 atau konteks secara umum dan menggambarkan hubungan diantara entitas sumber data data pada tingkatan tertinggi. Gambaran atas model data pemerintah pada level konteks disajikan dalam gambar sebagai berikut ( Nanang Ruswianto, 2018):



Gambar 2.6 Gambaran model hubungan entitas sumber data

Berdasarkan penggambaran di atas terlihat bahwa struktur sumber data pemerintah dalam model data akan terdiri dari empat kelompok besar entitas sumber data yang masing-masing memiliki relasi satu ke banyak atau 1 ke N. Penjelasan atas masing-masing entitas dalam model data pemerintah adalah sebagai berikut :

#### 1. Layanan Publik Instansi Pemerintah

Perihal data dapat terdiri atas :

- Penduduk,
- Perpajakan dan retribusi,
- Pendaftaran dan perizinan,
- Bisnis dan investasi,
- Aplikasi kesehatan,
- Pendidikan,
- Ketenagakerjaan,



- Industri dan perdagangan, dan jaring pengaman sosial.

2. Layanan Naskah Dinas

Perihal data dapat terdiri atas :

- Persuratan dan sistem dokumen elektronik.

3. Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Perihal data dapat terdiri atas:

- Administrasi dewan,
- Pemilu daerah,
- Katalog hukum, peraturan dan perundangan,
- Publikasi informasi umum dan pemerintahan.

4. Layanan Manajemen Perencanaan

Perihal data dapat terdiri atas:

- Penunjang data pembangunan,
- Perencanaan pembangunan daerah.

5. Layanan Manajemen Penganggaran


Perihal data dapat terdiri atas:

- Pengelolaan dan monitoring proyek,
- Evaluasi dan informasi hasil pembangunan,
- Anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, dan lain-lain.

6. Layanan Manajemen Keuangan

Perihal data dapat terdiri atas:

- Anggaran,
- Kas dan perbendaharaan,

- Akuntansi daerah.
7. Layanan Manajemen Kepegawaian dan Kinerja
- Perihal data dapat terdiri dari:
  - Penerimaan pegawai,
  - Absensi,
  - Penggajian,
  - Penilaian kinerja, pendidikan dan latihan.
8. Layanan Manajemen Kinerja
- Perihal data dapat terdiri dari:
- Penilaian kinerja, pendidikan dan latihan.
9. Layanan Pengaduan Publik
- Perihal data dapat terdiri atas :
- Pengaduan masyarakat
10. Layanan Pengadaan
- Perihal data dapat terdiri dari :
- Pengadaan barang dan jasa.
11. Whistle Blowing System
- Perihal data terdiri atas:
- Pengaduan kasus yang bersifat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian salah satu hal yang penting ialah membuat metode penelitian. Metode penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian diantaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data serta analisa data. Ada beberapa macam metode penelitian yang bisa dipilih sesuai dengan penelitian yang ingin dilakukan, antara lain metode *correlational*, metode *causal comperative*, metode *experimental*, metode *ethnographic*, metode *historica research*, survey dan ada juga *action research*. Desain eksperimental dan studi kasus banyak digunakan dalam penelitian di bidang teknologi informasi (Hasibuan, Zainal A, 2007).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan survey. Pengertian survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian penelitian survey adalah “penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok” (Singarimbun, 1995:3). Dalam survey, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner atau angket. Pemilihan metode ini didasarkan dari didasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, batasan, tujuan dan obyek penelitian yang dipilih.

Pengumpulan dan konfirmasi hasil penelitian menggunakan metode FGD. Berbagai penelitian kualitatif banyak menggunakan metode FGD sebagai alat pengumpulan data. Sebagai salah satu metode pengumpulan data, metode FGD memiliki berbagai kekuatan dan keterbatasan dalam penyediaan data/ informasi. Sebagai contoh, metode FGD memberikan lebih banyak data dibanding dengan menggunakan metode lainnya (Lehoux, Poland, & Daudelin, 2006).

Kekuatan utama metode FGD adalah kemampuan menggunakan interaksi antar partisipan untuk memperoleh kedalaman dan kekayaan data yang lebih padat yang tidak diperoleh dari hasil wawancara mendalam. Carey (1994) menjelaskan bahwa informasi atau data yang diperoleh melalui FGD lebih kaya atau lebih informatif dibanding dengan data yang diperoleh dengan metode-metode pengumpulan data lainnya. Hal ini dimungkinkan karena partisipasi individu dalam memberikan data dapat meningkat jika mereka berada dalam suatu kelompok diskusi. Namun, metode ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kesulitan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan yang optimal dari metode FGD masih seringkali menjadi bahan perdebatan para ahli penelitian dan konsensus untuk menyepakati metode FGD sebagai metodologi yang ideal dalam penelitian kualitatif masih belum dicapai (McLafferty, 2004).

Metode FGD berdasarkan segi kepraktisan dan biaya merupakan metode pengumpulan data yang hemat biaya/tidak mahal, fleksibel, praktis, elaboratif serta dapat mengumpulkan data yang lebih banyak dari responden dalam waktu yang singkat. Selain itu, metode FGD memfasilitasi kebebasan berpendapat para individu yang terlibat dan memungkinkan para peneliti meningkatkan jumlah

sampel penelitian mereka. Dari segi validitas, metode FGD merupakan metode yang memiliki tingkat high face validity dan secara umum berorientasi pada prosedur penelitian (Lehoux, Poland, & Daudelin, 2006).

Metode FGD juga memiliki beberapa keterbatasan sebagai alat pengumpulan data. Dari segi analisis, data yang diperoleh melalui FGD memiliki tingkat kesulitan yang tinggi untuk dianalisis dan banyak membutuhkan waktu. Selain itu, kelompok diskusi yang bervariasi dapat menambah kesulitan ketika dilakukan analisis dari data yang sudah terkumpul. Pengaruh seorang moderator atau pewawancara juga sangat menentukan hasil akhir pengumpulan data (Leung et al., 2005).

Selanjutnya, dari segi pelaksanaan, metode FGD membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk keberlangsungan interaksi yang optimal dari para peserta diskusi (Lambert & Loiselle, 2008). Keterbatasan lainnya dari penggunaan metode FGD dapat terjadi pada umumnya karena peneliti seringkali kurang dapat mengontrol jalannya diskusi dengan tepat.

### **3.2. Metode Analisis Data**

Analisa data adalah proses mengolah, mengevaluasi dan mentransformasi data mentah ke statistik dan ke informasi statistik, serta memahami dan mengkaji serta menginterpretasikan informasi statistik tersebut untuk diambil kesimpulan yang berguna untuk pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan (Asra, 2015).

Analisa data akan dilakukan berdasarkan pemetaan data primer pada Organisasi Perangkat Daerah yang data diambil dari hasil survey menggunakan tabel RACI (Nanang Ruswianto, 2018). Hasil dari perancangan ini nantinya adalah dokumen data primer dan kamus data.

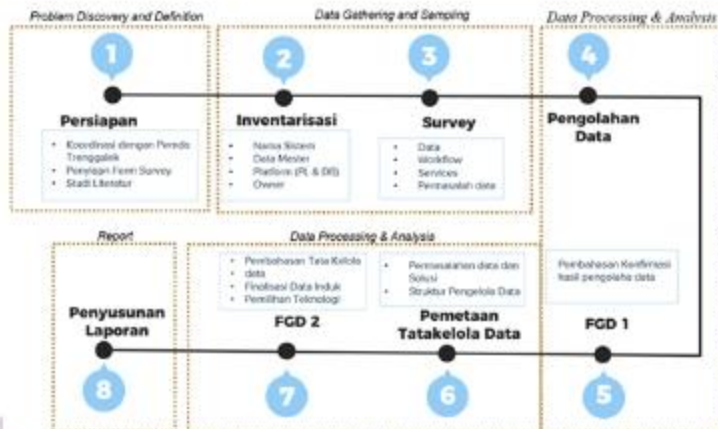
Perancangan tatakelola data dilakukan mengacu pada peraturan bupati no 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan hasil penggalian permasalahan data dari survey dan FGD 1. Analisa tatakelola data kemudian solusi pemecahan masalah terkait hal tersebut mengacu dengan panduan/framework di DMBOK dan untuk struktur Model Struktur Pengelola Data pada gambar 4. Pada Framework DAMA international yang ditunjukkan dalam DMBOK Wheel di gambar 2 memperlihatkan bahwa fungsi tata kelola data merupakan inti. Area pengetahuan DAMA DMBOK yang terkait dengan permasalahan data yang ditemukan di Pemerintah Kabupaten Trenggalek digunakan sebagai referensi untuk memetakan dan memecahkan masalah tatakelola data.

Hasil dari pengolahan data ini adalah rancangan struktur/pembagian wewenang pengelola data dan matriks solusi atas permasalahan data.

Laporan penelitian akan di konfirmasi dan validasi kembali dalam forum group discussion ke-2. Undangan untuk FGD ke-2 adalah para pengelola sistem dari 35 OPD dan para kepala dinas sebagai pengambil kebijakan .

Laporan akhir penelitian selanjutnya ini akan disampaikan ke Kominfo sebagai OPD *leading sector* di bidang TI .

### 3.3. Alur Penelitian



Gambar 3.1 Alur Penelitian

Merujuk alur penelitian diatas, tahap pertama adalah persiapan penelitian untuk memastikan tujuan, masalah yang akan diselesaikan dan tinjauan pustaka yang dilakukan sudah mencukupi untuk merancang konsep penelitian.

Tahapan ini juga menyusun konsep form survey. yang sebelum disebarakan di bahas lebih dahulu dan divalidasi oleh Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Trenggalek.. Setelah form survey disetujui kemudian dibagikan ke responden OPD di Kabupaten Trenggalek. Form survey (terlampir di Lampiran A) ini bersifat open deskriptif, yang akan di konfirmasi dalam pelaksanaan FGD 1 untuk mengkonfirmasi data.

Di tahap berikutnya dilakukan pengolahan data dengan pemetaan keterpaduan yang didasarkan pada peran dan tanggungjawab OPD terhadap sebuah data primer menggunakan RACI. Pengolahan data dilakukan dengan

merekap data hasil survey yang dikelompokkan ke dalam tabel RACI (Nanang Ruswianto, 2018). Kolom berupa OPD penanggungjawab yang akan mengelola sebuah data primer (hasil tahap-1), dan barisnya adalah data primer hasil inventarisasi dan pendataan dari masing-masing OPD. Gambar 3.2 dibawah ini menggambarkan proses pemetaan dan pengolahan data hasil survey.

No	OPD Pemilik	Nama Data	Status kewenangan															
			BAG TAM AN	BAG KEI TAM	BAG SA SUN	BAG M M	BAG UMU M	BAG HEA M	BAG KON DMSA	BAG DMS AD	BAG PROT DMS	BAG SAD AAN	SKKS SAT	INSP SAT	DSD A	DPP K	OPD PR	
41	BAG. ORGANISASI	- Data Berlaya Kerja	R	R	R	R	R	R	R	C/A	R	R	R	R	R	R	R	
42	BAG. ORGANISASI	- Data Perjanjian Kerja	R	R	R	R	R	R	R	C/A	R	R	R	R	R	R	R	
43	BAG. ORGANISASI	- Data Kinerja Pemerintah	R	R	R	R	R	R	R	C/A	R	R	R	R	R	R	R	
44	DISPERINAKER	- Data Industri Kecil Menengah								C/I								
45	INSPEKTORAT	- Data Pelaporan Harita Hakapayen Aparatur Sipil Negara	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	C/A	R	R	R	
46	KSUD	- Data Registrasi Pasien															I	
47	KSUD	- Data Ruang Kamar Inap															I	
48	KSUD	- Data Pemeriksaan Rawat Jalan															I	
49	KSUD	- Data Penyakit Terbanyak															I	
50	KSUD	- Data Registrasi Rawat Inap															I	
51	BPKD	- Data Ases Tanah	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
52	BPKD	- Data Ases Peralihan & Merak	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
53	BPKD	- Data Ases Bangunan	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
54	DISARPUK	- Data Perencanaan	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
55	DSD/INCAPIL	- Data Kependudukan																
56	KECAMATAN	- Data Penduduk Desa																
57	DINDO/PSA	- Data Kemiskinan																
58	PKUMP	- Data Koperasi								C/A								

Gambar 3.2 Model Tabel Pengolahan Data yang Direncanakan

Untuk pengolahan data terkait tatakelola data dan pemetaan permasalahan data menggunakan panduan dari DMBOK yang dijabarkan dalam bentuk matrik di gambar 3.3. Permasalahan data di deskripsikan di kolom sebelah kiri berwarna kuning, solusi pemetaan masalahnya di kolom berwarna hijau.



Masalah / Solusi	Permasalahan		Solusi		Permasalahan		Solusi		Permasalahan		Solusi		Permasalahan		Solusi	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Tidak terdapat data untuk mendukung kegiatan...																
2. Tidak terdapat data untuk mendukung kegiatan...																
3. Tidak terdapat data untuk mendukung kegiatan...																
4. Tidak terdapat data untuk mendukung kegiatan...																
5. Tidak terdapat data untuk mendukung kegiatan...																
6. Tidak terdapat data untuk mendukung kegiatan...																
7. Tidak terdapat data untuk mendukung kegiatan...																
8. Tidak terdapat data untuk mendukung kegiatan...																
9. Tidak terdapat data untuk mendukung kegiatan...																
10. Tidak terdapat data untuk mendukung kegiatan...																
11. Tidak terdapat data untuk mendukung kegiatan...																
12. Tidak terdapat data untuk mendukung kegiatan...																

Permasalahan tata kelola data

Solusi pemetaan berdasarkan panduan PMBOK

Gambar 3.3 Identifikasi Permasalahan Pengelolaan Data

Hasil data dari FGD 1 kemudian diolah dan menghasilkan matriks pemetaan kewenangan data ( data primer) dan rekap masalah pengelolaan data. Setelah tabel data induk selesai diolah kemudian di verifikasi dengan Focus Group Discussion (FGD) dilakukan di FGD ke 2 dengan mengundang penanggungjawab data di OPD.

Untuk pemetaan tatakelola data dengan merancang struktur pengelola data berdasarkan dan solusi pemetaan permasalahan data. Pemetaan ini menggunakan panduan dari DMBOK. Setelah disusun pemetaan tatakelola data kemudian dilakukan konfirmasi dalam FGD ke-2. Wawancara dengan pemangku kebijakan digunakan untuk validasi terkait tatakelola data ini dengan leading sektor dan sekda ( diwakili asisten sekda). Dalam FGD ini juga dibahas terkait skema

interoperabilitas data . Hasil final dari FGD ini akan disusun laporan penelitian , kesimpulan dan rekomendasi.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Trenggalek mempunyai luas wilayah 126.140 Ha, terbagi menjadi 14 Kecamatan dan 157 Desa. Penelitian ini melibatkan 35 organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten Trenggalek yang ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan *leading* pengelolaan teknologi informasi di Dinas Komunikasi dan informatika.

#### 4.2. Pelaksanaan Penelitian

Sebelum pelaksanaan pengumpulan data menggunakan survey ke organisasi perangkat daerah (OPD), dilakukan pembuatan form survey dan dilakukan konfirmasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Trenggalek. Form survey ada dilampiran A.

Selanjutnya form survey dibagikan kepada 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Trenggalek. Form berisi terkait data induk dan permasalahan terkait data di masing-masing instansi.

Pengisian ini dilakukan OPD selama 3 minggu. Hasil dari pengisian ini direkap dan kemudian di konfirmasi melalui wawancara ke OPD terkait.

Data hasil rekap akan dijadikan bahan analisa dan dikonfirmasi sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rekap pertama dalam bentuk tabel yang menggambarkan interoperabilitas data tersebut diperlukan (*Informed/Sharing*) oleh Perangkat Daerah mana saja, Perangkat Daerah mana yang bertanggung jawab atas akuntabilitas (*Accountability*) data, Perangkat Daerah mana yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan (*Responsible*) data dan Perangkat Daerah mana saja yang perlu untuk dimintai pertimbangan (*Consulting*) terhadap data-data tersebut. Rekap data kedua adalah berupa identifikasi permasalahan data di masing-masing OPD.

Setelah mendapatkan informasi mengenai data dan permasalahannya, dilanjutkan dengan melakukan konfirmasi terhadap hasil inventarisasi. Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi hasil inventarisasi. *Desk discussion* dilakukan dengan mengundang perwakilan dari tiap tiap Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem.

Sehubungan ditengah penelitian ada pandemi Covid-19, konfirmasi dilakukan melalui diskusi secara online. Konfirmasi hasil dari data induk dan perancangan tatakelola data yang dilakukan dengan FGD, yaitu :

1. Pelaksanaan FGD dilakukan 2 kali secara online dengan menghadirkan seluruh OPD dan mengkonfirmasi atas kewenangan masing-masing OPD terhadap 209 data induk dan identifikasi 11 permasalahan data . Setiap OPD sudah diberikan sebelumnya lembar kertas kerja yang berisi hasil rekap pemetaan data. Saat FGD dipandu moderator untuk membahas masing-masing

data dan kewenangannya. Hasil keputusan kewenangan dicatat dan revisinya dikirim ke OPD kembali.

2. Wawancara dengan pimpinan Kominfo Kabupaten Trenggalek terkait konfirmasi perancangan struktur tatakelola data.
3. Pendekatan rekapitulasi pemetaan interoperabilitas data, yakni data-data yang saling dipertukarkan lintas Perangkat Daerah. Pengkategorian interoperabilitas data berdasarkan kategori Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terdiri dari 11 Layanan.

Hasil dari penelitian ini menghasilkan pemetaan data primer untuk keperluan interoperabilitas data yang akan di bahas di Bab 4.3 dan solusi tatakelola data untuk menyelesaikan permasalahan data di pemerintah Kabupaten Trenggalek yang di bahas di Bab 4.4.

#### **4.3. Pemetaan Interoperabilitas Data**

Data adalah salah satu bagian dari pilar utama dalam pemerintah untuk mendukung berbagai fungsi agar tujuan pemerintah tersebut dapat tercapai. Data harus dapat dipahami oleh semua pihak berkepentingan (stakeholder) pada pemerintahan sebagai aset yang dapat mengintegrasikan data untuk tiap-tiap OPD, sehingga OPD tersebut dapat saling berkolaborasi dalam menemukan solusi ketika menghadapi permasalahan.

Permasalahan dalam sistem informasi di Kabupaten Trenggalek yaitu memiliki daftar data dan referensi data yang tersebar. Daftar data merupakan data-data apa saja yang telah disepakati dan boleh dibagipakaikan oleh pemerintah. Contoh daftar data merupakan data pegawai, data penduduk, data kemiskinan, dan

sebagainya. Sedangkan referensi data merupakan data yang dapat digunakan nilainya oleh data yang lain. Contoh referensi data merupakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dapat digunakan datanya tidak hanya untuk data penduduk, tapi juga untuk kebutuhan data lainnya seperti data pegawai, data kemiskinan, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi pemetaan interoperabilitas data, dalam penelitian ini diperoleh data-data yang saling dipertukarkan lintas Perangkat Daerah sebanyak 210 data seperti ditunjukkan di tabel 4.1. Tabel 4.1 ini menggambarkan data primer yang dimiliki OPD dan deskripsi terkait data terkait

Tabel 4.1 Data Primer dan Deskripsi Data

No	Data Primer	OPD Pemilik	Deskripsi Data
1	Data Produk Hukum	BAG. HUKUM	Data Terkait Peraturan Daerah
2	Data Sarana Peribadatan	BAG. KESRA	Data tempat peribadatan
3	Data Huffadz	BAG. KESRA	Data Penghafal Al-Qur'an
4	Data Pondok Pesantren	BAG. KESRA	Data Pondok Pesantren
5	Data Madrasah Diniyah	BAG. KESRA	Data Madin
6	Data TPQ	BAG. KESRA	Data TPQ
7	Data Budaya Kerja	BAG. ORGANISASI	Mengumpulkan makalah semua OPD untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap masalah di masing-masing OPD
8	Data Perjanjian Kinerja	BAG. ORGANISASI	Perjanjian rencana kerja yang diangkat oleh OPD ke Bupati
9	Data Kinerja Pemerintah	BAG. ORGANISASI	Data Kinerja Akhir
10	Data Batas Pemasangan Patok	BAG. PEMERINTAHAN	Pembatasan wilayah dengan menggunakan patok
11	Data Indikator Kinerja	BAG. PEMERINTAHAN	Data Indikator Kinerja
12	Data Penyedia Jasa	BAG. PENGADAAN	Data penyedia terverifikasi di LPSE
13	Data Pengadaan	BAG. PENGADAAN	Data Pengadaan
14	Data BUMD	BAG. PEREKONOMIAN	Data Badan Usaha Milik Daerah
15	Data Izin Usaha Pertambangan	BAG. PEREKONOMIAN	Data Pemegang Izin Usaha Pertambangan

Tabel 4.1 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD Pemilik	Deskripsi Data
16	Data Register Media	BAG. PROTOKOL	Data terkait publikasi
17	Data Pagu Anggaran	BAKEUDA	Data keseluruhan Pagu OPD
18	Data Realisasi Belanja	BAKEUDA	Data realisasi Belanja Tidak Langsung
19	Data Pendapatan Asli Daerah	BAKEUDA	Data Keuangan Pendapatan
20	Data Pajak	BAKEUDA	Data Pajak
21	Data Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	BAKEUDA	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
22	Data Pencrimaan Retribusi	BAKEUDA	Data Pencrimaan Retribusi
23	Data Urusan Wajib Pilihan Umum	BAPPEDA	Data Urusan Pilihan
24	Data Rencana Kerja Pemerintah Daerah	BAPPEDA	Data RKPD
25	Data eDatabase Hasil Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Data Hasil Pembangunan Daerah
26	Data Profil ASN	BKD	Data Profil ASN
27	Data Presensi	BKD	Data Presensi Pegawai
28	Data Pensiun	BKD	Data Pensiun
29	Data Mutasi	BKD	Data Mutasi
30	Data Cuti	BKD	Data Cuti Pegawai
31	Data Kinerja Pegawai	BKD	Data Kinerja Pegawai
32	Data Usulan Pelayanan Kepegawaian	BKD	Data Daring Pelayanan Kepegawaian
33	Data Assesment PNS	BKD	Data Hasil Assesment PNS
34	Data Diklat PNS	BKD	Data Diklat PNS
35	Data Kejadian Bencana	BPBD	Data Kejadian Bencana
36	Data Distribusi Bansos	BPBD	Data Distribusi Sembako APBD
37	Data Pendistribusian Air Bersih	BPBD	Data Pendistribusian Air Bersih
38	Data Kerusakan Akibat Bencana	BPBD	Data Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana
39	Data Kesejahteraan Rakyat	DINSOSP3A	Data terkait kemiskinan
40	Data Penerima Bantuan Sosial Pangan	DINSOSP3A	Data Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan
41	Data Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan	DINSOSP3A	Data Kelompok Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan
42	Data Penerima PBI-JKN	DINSOSP3A	Data untuk Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan Nasional
43	Data Disabilitas	DINSOSP3A	Data terkait penyandang disabilitas

Tabel 4.1 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD Pemilik	Deskripsi Data
			yang ada
44	Data Lansia	DINSOSP3A	Data terkait orang lanjut usia yang ada
45	Data Anak Panti	DINSOSP3A	Data terkait penghuni anak-anak dalam panti
46	Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	DINSOSP3A	Data terkait kasus terhadap perempuan dan anak
47	Data Kemiskinan	DINSOSP3A	Data Indeks Kemiskinan
48	Data Sekolah	DISDIKPORA	Data Sekolah
49	Data Pendidik dan Tenaga Pendidik	DISDIKPORA	Data Pendidik dan Tenaga Pendidik
50	Data Siswa	DISDIKPORA	Data Siswa
51	Data Fasilitas Pendidikan	DISDIKPORA	Data Fasilitas
52	Data Aset Jalan Irigasi Jaringan	DISDIKPORA	Data Aset Jalan Irigasi Jaringan
53	Data Aset Tetap Lainnya	DISDIKPORA	Data Aset Tetap Lainnya
54	Data Kartu Indonesia Pintar	DISDIKPORA	Data Kartu Indonesia Pintar
55	Data PPDB Online	DISDIKPORA	Data Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Online
56	Data Kantin Sekolah	DISDIKPORA	Data Kantin Sekolah Sumber Dana APBD
57	Data Atlet Berprestasi	DISDIKPORA	Data Atlet Berprestasi
58	Data Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	DISDIKPORA	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
59	Data Agregat Kependudukan	DISDUKCAPIL	Data penduduk dalam bentuk resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain lain.
60	Data Pencrerangan Jalan	DISHUB	Data Pencrerangan Jalan
61	Data Trayek	DISHUB	Data Trayek
62	Data Pengujian Kendaraan Bermotor	DISHUB	Data Pengujian Kendaraan Bermotor
63	Data Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	DISHUB	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
64	Data Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	DISHUB	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
65	Data Produksi Perikanan	DISKAN	Data Produksi Perikanan
66	Data Produksi Ikan Menurut Jenis Alat Tangkap	DISKAN	Data Produksi Ikan Menurut Jenis Alat Tangkap
67	Data Perahu/Kapal	DISKAN	Data Perahu/Kapal Penangkap Ikan



Tabel 4.1 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD Pemilik	Deskripsi Data
	Penangkap Ikan		
68	Data Retribusi Izin Usaha Perikanan	DISKAN	Retribusi Izin Usaha Perikanan
69	Data Rumah Tangga Perikanan (RTP)	DISKAN	Data Rumah Tangga Perikanan per Kecamatan
70	Data Luas Area Budidaya	DISKAN	Data Luas area per Kecamatan
71	Data Produksi Benih	DISKAN	Data Produksi Benih per Kecamatan
72	Data Jumlah Pengolah	DISKAN	Data jumlah Pelaku Usaha Pengolahan produk Perikanan per kecamatan
73	Data Jumlah Pemasar	DISKAN	Data jumlah Pelaku Usaha pemasaran produk Perikanan per kecamatan
74	Data Jumlah Supplier Ikan	DISKAN	Data Jumlah Penjual Ikan Berskala Besar per Kecamatan
75	Data Jumlah Nelayan	DISKAN	Data Jumlah Nelayan Per kecamatan
76	Data UMKM	DISKOMIDAG	Data Usaha Mikro Kecil Menengah
77	Data Koperasi	DISKOMIDAG	Data Koperasi
78	Data Pasar	DISKOMIDAG	Data Pasar
79	Data Harga Komoditas	DISKOMIDAG	Data Harga Komoditas
80	Data Retribusi Pelayanan Pasar	DISKOMIDAG	Retribusi Pelayanan Pasar
81	Data Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang	DISKOMIDAG	Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang
82	Data Aduan Masyarakat	DISKOMINFO	Data Aduan Masyarakat
83	Data PPID	DISKOMINFO	Data PPID
84	Data Potensi Situs dan Cagar Budaya	DISPARBUD	Data tempat yang bisa menjadi Potensi Situs dan Cagar Budaya
85	Data Usaha Jasa Pariwisata	DISPARBUD	Data Usaha Jasa Pariwisata
86	Data Destinasi Wisata	DISPARBUD	Data Destinasi Wisata
87	Data Usaha Hotel/Penginapan	DISPARBUD	Data Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi Jenis Usaha Hotel/Penginapan
88	Data Usaha Makanan dan Minuman	DISPARBUD	Data Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman Jenis Usaha Kafe
89	Data SDM Pariwisata	DISPARBUD	Data SDM Pariwisata Yang Tersertifikasi
90	Data Usaha Biro Perjalanan Wisata	DISPARBUD	Data Bidang Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata
91	Data Kunjungan Akomodasi Hotel/Penginapan	DISPARBUD	Data Kunjungan Akomodasi Hotel/Penginapan
92	Data Kunjungan Destinasi Wisata	DISPARBUD	Data Kunjungan Destinasi Wisata

Tabel 4.1 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD Pemilik	Deskripsi Data
93	Data Musisi dan Grup Musik	DISPARBUD	Data Musisi dan Grup Musik
94	Data Penyanyi	DISPARBUD	Data Penyanyi
95	Data Dalang	DISPARBUD	Data Dalang
96	Data Komunitas Seni	DISPARBUD	Data Grup Komunitas Kesenian
97	Data Penari	DISPARBUD	Data Sanggar Tari
98	Data Perupa	DISPARBUD	Data Perupa
99	Data Sastrawan dan Penulis	DISPARBUD	Data Sastrawan dan Penulis
100	Data Cagar Budaya	DISPARBUD	Data Cagar Budaya
101	Data Event Budaya	DISPARBUD	Data Tradisi dan Upacara Adat
102	Data Potensi Wisata	DISPARBUD	Data Potensi Wisata
103	Data Pendapatan Pariwisata	DISPARBUD	Data Pendapatan Pariwisata
104	Data Retribusi Tempat Khusus Parkir	DISPARBUD	Retribusi Tempat Khusus Parkir
105	Data Sinden	DISPARBUD	Data Sinden
106	Data Waranggono	DISPARBUD	Data Waranggono
107	Data Pramugari Tayub	DISPARBUD	Data Pramugari Tayub
108	Data Pengrawit	DISPARBUD	Data Pengrawit
109	Data Kelembagaan Pengelola Pariwisata Pokdarwis	DISPARBUD	Data Pokdarwis
110	Data Industri Kecil Menengah	DISPERINAKEK	Data terkait info tentang industri kecil menengah
111	Data Pencari Kerja	DISPERINAKEK	Data Pencari Kerja
112	Data Ketenagakerjaan	DISPERINAKEK	Data Ketenagakerjaan
113	Data Rekapitulasi Jumlah Pekerja Migran Indonesia	DISPERINAKEK	Rekapitulasi Jumlah PMI setiap Bulan
114	Data Rekapitulasi Jumlah Pencari Kerja	DISPERINAKEK	Rekapitulasi Jumlah Pencari Kerja
115	Data Rekapitulasi data Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek	DISPERINAKEK	Rekapitulasi data Tenaga Kerja Kab. Trenggalek
116	Data Pengunjung Perpustakaan	DISSIPUS	Data Pengunjung Perpustakaan
117	Data Koleksi Perpustakaan	DISSIPUS	Data Koleksi Perpustakaan
118	Data Pemanfaat Rumah Pintar	DISSIPUS	Data Pemanfaat Rumah Pintar
119	Data Jenis Layanan Perpustakaan	DISSIPUS	Data Jenis Layanan Perpustakaan

Tabel 4.1 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD Pemilik	Deskripsi Data
120	Data e-Book	DISSIPUS	Data Jumlah Buku Elektronik/E-book
121	Data Kelahiran	DKPPKB	Data terkait Kelahiran
122	Data Kematian	DKPPKB	Data terkait Kematian
123	Data Perizinan Tenaga Kesehatan	DKPPKB	Data Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan
124	Data SDM Kesehatan Faskes	DKPPKB	Data Keadaan SDM Kesehatan di Fasyankes
125	Data Obat	DKPPKB	Data Pemakaian dan Permintaan Obat di Puskesmas
126	Data Puskesmas	DKPPKB	Data Puskesmas
127	Data BPJS	DKPPKB	Data BPJS
128	Data Penerimaan PAD Kesehatan	DKPPKB	Data Penerimaan PAD
129	Data Retribusi Pelayanan Kesehatan	DKPPKB	Retribusi Pelayanan Kesehatan
130	Data Covid	DKPPKB	Data Covid
131	Data Stunting	DKPPKB	Data Stunting
132	Data Perumahan	DPKPLH	Data Perumahan
133	Data Air Minum dan Sanitasi	DPKPLH	Data Air Minum dan Sanitasi
134	Data Drainase Pemukiman	DPKPLH	Data Drainase Pemukiman
135	Data Rumah Tidak Layak Huni	DPKPLH	Data Rumah Tidak Layak Huni
136	Data Izin Pemakaian Alun-alun	DPKPLH	Data Izin Pemakaian Alun-alun
137	Data Tempat Pembuangan Sampah	DPKPLH	Data Tempat Pembuangan Sampah
138	Data Tempat Pembuangan Akhir	DPKPLH	Data Tempat Pembuangan Akhir
139	Data Ruang Terbuka Hijau	DPKPLH	Data Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
140	Data Sarana dan Prasarana PKPLH	DPKPLH	Data Sarana dan Prasarana PKPLH
141	Data Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan	DPKPLH	Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan
142	Data Inovator dan TTG	DPMD	Data Profil Teknologi Tepat Guna
143	Data Alokasi Dana Desa	DPMD	Data Rincian Dana kepala desa, perangkat Desa, honor RT/RW, pemberdayaan masyarakat Desa

Tabel 4.1 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD Pemilik	Deskripsi Data
144	Data Aparat Pemerintah Desa	DPMD	Data Aparat Pemerintah Desa
145	Data Sarana Prasarana Desa	DPMD	Data Sarana Prasarana Desa
146	Data BUMDES dan BUMDESMA	DPMD	Data Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Bersama Desa
147	Data Karang Taruna	DPMD	Data Karang Taruna
148	Data Lembaga Kemasyarakatan Desa	DPMD	Data Lembaga Kemasyarakatan Desa
149	Data Profil SDA	DPMD	Data Profil Sumber Daya Alam
150	Data Pengurus UPKu	DPMD	Data Pengurus UPKu Program Gerdu Taskin, PPKM, BUMDES
151	Data BKD Aktif	DPMD	Data BKD Desa Aktif yang memperoleh Izin Usaha dari Kemenkeu sebagai Bank Desa/Lumbung Desa
152	Data Pelaku Usaha Mikro	DPMD	Data Pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan
153	Data Pokmas Ekonomi Produktif	DPMD	Data Kelompok Masyarakat Ekonomi Produktif
154	Data Potensi Investasi	DPMPTSP	Data Potensi Investasi
155	Data Perizinan Usaha	DPMPTSP	Data Perizinan Usaha
156	Data Investasi	DPMPTSP	Data Investasi
157	Data Perizinan non Usaha	DPMPTSP	Data Perizinan non Usaha
158	Data Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	DPMPTSP	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
159	Data Distributor dan Pengecer Pupuk	DPP	Data Distributor dan Pengecer Pupuk
160	Data Jenis Pertanian	DPP	Data Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi dari Padi Sawah Per Kecamatan
161	Data Alat Mesin Pertanian dan Hortikultura	DPP	Data Alat dan Mesin Pertanian
162	Data Kelembagaan Pertanian	DPP	Data Kelembagaan Pertanian
163	Data Komoditas Pertanian	DPP	Data Sayuran
164	Data Perdagangan dan Penggunaan Benih	DPP	Data Perdagangan dan Penggunaan Benih
165	Data Perkebunan	DPP	Data Perkebunan
166	Data Pemotongan Ternak	DPP	Data Pemotongan berdasarkan jenis Ternak

Tabel 4.1 (Lanjutan)

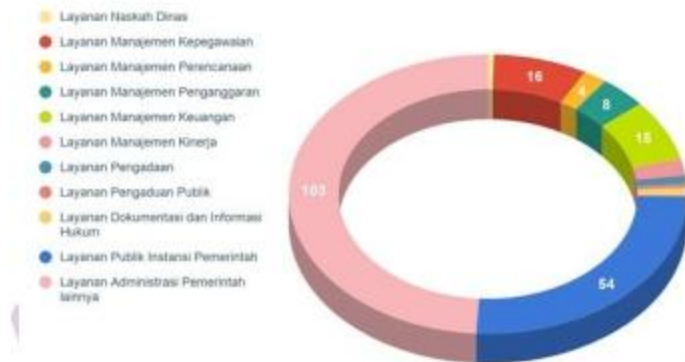
No	Data Primer	OPD Pemilik	Deskripsi Data
167	Data Kelompok Asuransi Usaha Ternak Sapi	DPP	Data Kelompok Asuransi Usaha Ternak Sapi
168	Data Penyakit Ternak	DPP	Data Penyakit Ternak
169	Data Pangan	DPP	Data Fisik Lumbung Pangan dan Cadangan Pangan
170	Data Taman	DPP	Data Taman Posyandu Sumber Dana APBD
171	Data Perkumpulan Petani	DPP	Data Perkumpulan Petani Pemakai Air
172	Data Distribusi Kartu Tani	DPP	Data Kartu Tani Yang Sudah Tersalurkan Ke Kelompok
173	Data Perencanaan Pekerjaan Umum	DPUPR	Data Perencanaan Teknis Jalan
174	Data Jalan dan Jembatan	DPUPR	Data Jalan dan Jembatan
175	Data Daerah Irigasi	DPUPR	Data Daftar Usulan Penetapan Status Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
176	Data Saluran Air	DPUPR	Data Panjang Saluran Pemetaan
177	Data Curah Hujan	DPUPR	Untuk pencatatan curah hujan
178	Data Debit Sungai	DPUPR	Data Debit Sungai dan Bendung
179	Data Keadaan Irigasi	DPUPR	Data Keadaan Irigasi
180	Data Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	DPUPR	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
181	Data Pengajuan Rekomendasi Sertifikat Elektronik	DPUPR	Data Pengajuan Rekomendasi Sertifikat Elektronik
182	Data Sewa Alat Berat	DPUPR	Retribusi Sewa Alat Berat
183	Data Pengujian Konstruksi	DPUPR	Retribusi Pengujian Konstruksi
184	Data Menara Telekomunikasi	DPUPR	Retribusi Menara Telekomunikasi
185	Data Ijin Mendirikan Bangunan	DPUPR	Retribusi IMB
186	Data Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	DPUPR	Data Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
187	Data Tukar Menukar Kawasan Hutan	DPUPR	Data Tukar Menukar Kawasan Hutan
188	Data Kegiatan Pengawasan	INSPEKTORAT	Data kegiatan pengawasan
189	Data Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	INSPEKTORAT	Semua data untuk memfasilitasi pelaporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
190	Data Aset Tanah	KECAMATAN	Data Aset Tanah

Tabel 4.1 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD Pemilik	Deskripsi Data
191	Data Aset Peralatan & Mesin	KECAMATAN	Data Aset Peralatan & Mesin
192	Data Aset Bangunan	KECAMATAN	Data Aset Bangunan
193	Data Persuratan	KECAMATAN	Data Persuratan
194	Data Identitas Penduduk	KECAMATAN	Data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi
195	Data Penduduk Desa	KECAMATAN	Data Profil Desa
196	Data Pasar Desa	KECAMATAN	Untuk pembinaan pasar desa
197	Data Jenis Ikan dan Produksi	KECAMATAN	Data Jenis Ikan dan Produksi
198	Data Sumber Daya Air	KECAMATAN	Data Sumber Daya Air
199	Data Kebisingan	KECAMATAN	Data Kebisingan atau polusi suara
200	Data Ruang Publik	KECAMATAN	Data Ruang Publik/Taman
201	Data Produk Domestik Desa	KECAMATAN	Data Produk Domestik Desa/Kelurahan Bruto
202	Data Organisasi Masyarakat	KESBANGPOL	Data organisasi masyarakat yang terdaftar
203	Data Registrasi Pasien	RSUD	Data Registrasi Pasien
204	Data Ruang Kamar Inap	RSUD	Data Ruang Kamar Inap
205	Data Pemeriksaan Rawat Jalan	RSUD	Data Pemeriksaan Rawat Jalan
206	Data Penyakit Terbanyak	RSUD	Data Penyakit Terbanyak
207	Data Registrasi Rawat Inap	RSUD	Data Registrasi Rawat Inap
208	Data Pelanggaran Perda	SATPOL PP	Data Pelanggaran Perda
209	Data Kejadian Bencana Kebakaran	SATPOL PP	Data Kejadian Bencana Kebakaran
210	Data Anggota DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Data Anggota DPRD

Berdasarkan kategori layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilihat dari jenis kategori interoperabilitas data seperti di gambar 4.1, data di Trenggalek untuk kategori Layanan Publik Instansi Pemerintah ada 54 data, layanan kepegawaian sejumlah 16 data, layanan manajemen keuangan sebanyak

15 data. Layanan Administrasi Pemerintah Lainnya yang tidak masuk dalam kategori di layanan SPBE sebanyak 103 data.



Gambar 4.1 Klasifikasi data berdasarkan layanan SPBE

Data-data yang masuk dalam kategori layanan SPBE ini menjadi prioritas implementasi interoperabilitas sistem di Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya dari daftar data induk dilakukan pengolahan data untuk menggambarkan interoperabilitas data lintas Perangkat Daerah ini menggunakan RACI, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Responsible (R) : Perangkat Daerah yang melakukan aktivitas untuk pemenuhan terhadap data yang didefinisikan
- Accountable (A) : Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki otoritas untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan data yang didefinisikan
- Consulted (C) : Perangkat Daerah yang memberikan umpan balik atau saran dan berkontribusi akan data yang didefinisikan

- d. Informed (I) : Perangkat Daerah yang perlu tahu (terinformasi) terhadap data yang didefinisikan untuk mendukung tupoksinya.

Rekap matrik data berdasarkan RACI terlampir di Lampiran B.

#### 4.4.1. Pemetaan Tanggung Jawab Pemenuhan Data Oleh Perangkat Daerah (Responsible)

Dari hasil pengolahan data, terdapat 193 data primer dimana organisasi perangkat daerah perlu melakukan aktivitas untuk pemenuhan terhadap data yang didefinisikan dalam tabel 4.2. Tabel 4.2 menggambarkan pemetaan tanggungjawab jawab terhadap pemenuhan data ( Responsible).

Tabel 4.2 Pemetaan Tanggungjawab Pemenuhan Data ( Responsible)

No	Data Primer	OPD
1	Data Batas Pemasangan Patok	DPUPR
2	Data Sarana Peribadatan	KECAMATAN
3	Data Inovator dan TTG	DPMD - KECAMATAN
4	Data Huffadz	BAG. KESRA
5	Data Register Media	BAG. PROTOKOL
6	Data Produk Hukum	BAG. HUKUM
7	Data BUMD	DISPERINAKER
8	Data UMKM	DISKOMIDAG - KECAMATAN
9	Data Distributor dan Pengecer Pupuk	DPP
10	Data Izin Usaha Pertambangan	DPMPTSP
11	Data Pagu Anggaran	BAKEUDA
12	Data Realisasi Belanja	BAKEUDA
14	Data Penyedia Jasa	BAG. PENGADAAN
15	Data Anggota DPRD	SEKRETARIAT DPRD
16	Data Pondok Pesantren	BAG. KESRA
17	Data Perencanaan Pekerjaan Umum	DPUPR



Tabel 4.2 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD
18	Data Jalan dan Jembatan	DPUPR
19	Data Dacrah Irigasi	DPUPR
20	Data Saluran Air	DPUPR
21	Data Curah Hujan	DPUPR
22	Data Debit Sungai	DPUPR
23	Data Keadaan Irigasi	DPUPR
24	Data Pengunjung Perpustakaan	DISSIPUS
25	Data Koleksi Perpustakaan	DISSIPUS
26	Data Pemanfaat Rumah Pintar	DISSIPUS
27	Data Jenis Layanan Perpustakaan	DISSIPUS
28	Data e-Book	DISSIPUS
29	Data Organisasi Masyarakat	KESBANGPOL - KECAMATAN
30	Data Kesejahteraan Rakyat	DINSOSP3A
31	Data Penerima Bantuan Sosial Pangan	DINSOSP3A
32	Data Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan	DINSOSP3A
33	Data Penerima PBI-JKN	DINSOSP3A
34	Data Disabilitas	DINSOSP3A
35	Data Lansia	DINSOSP3A
36	Data Anak Panti	DINSOSP3A
37	Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	DINSOSP3A
38	Data Kelahiran	KECAMATAN - RSUD
39	Data Kematian	KECAMATAN - RSUD
40	Data Kegiatan Pengawasan	INSPEKTORAT
41	Data Budaya Kerja	BAG. PEMERINTAHAN - BAG. KESRA - BAG. PEMBANGUNAN - BAG. UMUM - BAG. HUKUM - BAG. PEREKONOMIAN - BAG. PROTOKOL - BAG. PENGADAAN - SEKRETARIAT DPRD - INSPEKTORAT

Tabel 4.2 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD
		DISDIKPORA - DKPPKB - DPUPR - DPKPLH - SATPOL PP - DINSOSP3A - DISPERINAKER - DPP - DISDUKCAPIL - DPMD - DISHUB - DISKOMINFO - DISKOMIDAG - DPMPTSP - DISSIPUS - DISKAN - DISPARBUD - BAPPEDA - BAKEUDA - BKD - BPBD - KESBANGPOL - KECAMATAN - RSUD
42	Data Perjanjian Kinerja	BAG. PEMERINTAHAN - BAG. KESRA - BAG. PEMBANGUNAN - BAG. UMUM - BAG. HUKUM - BAG. PEREKONOMIAN - BAG. PROTOKOL - BAG. PENGADAAN - SEKRETARIAT DPRD - INSPEKTORAT - DISDIKPORA - DKPPKB - DPUPR - DPKPLH - SATPOL PP - DINSOSP3A - DISPERINAKER - DPP - DISDUKCAPIL - DPMD - DISHUB - DISKOMINFO - DISKOMIDAG - DPMPTSP - DISSIPUS - DISKAN - DISPARBUD - BAPPEDA - BAKEUDA - BKD - BPBD - KESBANGPOL - KECAMATAN - RSUD
43	Data Kinerja Pemerintah	BAG. PEMERINTAHAN - BAG. KESRA - BAG. PEMBANGUNAN - BAG. UMUM - BAG. HUKUM - BAG. PEREKONOMIAN - BAG. PROTOKOL - BAG. PENGADAAN - SEKRETARIAT DPRD - INSPEKTORAT - DISDIKPORA - DKPPKB - DPUPR - DPKPLH - SATPOL PP - DINSOSP3A - DISPERINAKER - DPP - DISDUKCAPIL - DPMD - DISHUB - DISKOMINFO - DISKOMIDAG - DPMPTSP - DISSIPUS - DISKAN - DISPARBUD - BAPPEDA - BAKEUDA - BKD - BPBD - KESBANGPOL - KECAMATAN - RSUD
44	Data Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	BAG. PEMERINTAHAN - BAG. KESRA - BAG. PEMBANGUNAN - BAG. UMUM - BAG. HUKUM - BAG. PEREKONOMIAN - BAG. ORGANISASI - BAG. PROTOKOL - BAG. PENGADAAN - SEKRETARIAT DPRD - DISDIKPORA - DKPPKB - DPUPR - DPKPLH - SATPOL PP - DINSOSP3A - DISPERINAKER - DPP - DISDUKCAPIL - DPMD - DISHUB - DISKOMINFO - DISKOMIDAG - DPMPTSP - DISSIPUS - DISKAN - DISPARBUD - BAPPEDA - BAKEUDA - BKD - BPBD - KESBANGPOL - KECAMATAN - RSUD
45	Data Registrasi Pasien	RSUD
46	Data Ruang Kamar Inap	RSUD

Tabel 4.2 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD
47	Data Pemeriksaan Rawat Jalan	RSUD
48	Data Penyakit Terbanyak	RSUD
49	Data Registrasi Rawat Inap	RSUD
50	Data Aset Tanah	BAG. PEMERINTAHAN - BAG. KESRA - BAG. PEMBANGUNAN - BAG. UMUM - BAG. HUKUM - BAG. PEREKONOMIAN - BAG. ORGANISASI - BAG. PROTOKOL - BAG. PENGADAAN - SEKRETARIAT DPRD - INSPEKTORAT - DISDIKPORA - DKPPKB - DPUPR - DPKPLH - SATPOL PP - DINSOSP3A - DISPERINAKER - DPP - DISDUKCAPIL - DPMD - DISHUB - DISKOMINFO - DISKOMIDAG - DPMPPTSP - DISSIPUS - DISKAN - DISPARBUD - BAPPEDA - BKD - BPBD - KESBANGPOL - KECAMATAN - RSUD
51	Data Aset Peralatan & Mesin	BAG. PEMERINTAHAN - BAG. KESRA - BAG. PEMBANGUNAN - BAG. UMUM - BAG. HUKUM - BAG. PEREKONOMIAN - BAG. ORGANISASI - BAG. PROTOKOL - BAG. PENGADAAN - SEKRETARIAT DPRD - INSPEKTORAT - DISDIKPORA - DKPPKB - DPUPR - DPKPLH - SATPOL PP - DINSOSP3A - DISPERINAKER - DPP - DISDUKCAPIL - DPMD - DISHUB - DISKOMINFO - DISKOMIDAG - DPMPPTSP - DISSIPUS - DISKAN - DISPARBUD - BAPPEDA - BKD - BPBD - KESBANGPOL - KECAMATAN - RSUD
52	Data Aset Bangunan	BAG. PEMERINTAHAN - BAG. KESRA - BAG. PEMBANGUNAN - BAG. UMUM - BAG. HUKUM - BAG. PEREKONOMIAN - BAG. ORGANISASI - BAG. PROTOKOL - BAG. PENGADAAN - SEKRETARIAT DPRD - INSPEKTORAT - DISDIKPORA - DKPPKB - DPUPR - DPKPLH - SATPOL PP - DINSOSP3A - DISPERINAKER - DPP - DISDUKCAPIL - DPMD - DISHUB - DISKOMINFO - DISKOMIDAG - DPMPPTSP - DISSIPUS - DISKAN - DISPARBUD - BAPPEDA - BKD - BPBD - KESBANGPOL - KECAMATAN - RSUD

Tabel 4.2 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD
53	Data Persuratan	BAG. PEMERINTAHAN - BAG. KESRA - BAG. PEMBANGUNAN - BAG. UMUM - BAG. HUKUM - BAG. PEREKONOMIAN - BAG. ORGANISASI - BAG. PROTOKOL - BAG. PENGADAAN - SEKRETARIAT DPRD - INSPEKTORAT - DISDIKPORA - DKPPKB - DPUPR - DPKPLH - SATPOL PP - DINSOSP3A - DISPERINAKER - DPP - DISDUKCAPIL - DPMD - DISHUB - DISKOMINFO - DISKOMIDAG - DPMPSTSP - DISSIPUS - DISKAN - DISPARBUD - BAPPEDA - BAKEUDA - BKD - BPBD - KESBANGPOL - KECAMATAN - RSUD
54	Data Identitas Penduduk	DISDUKCAPIL - KECAMATAN
55	Data Penduduk Desa	KECAMATAN
56	Data Kemiskinan	DINSOSP3A - KECAMATAN
57	Data Koperasi	DISKOMIDAG
58	Data Pasar	DISKOMIDAG
59	Data Potensi Investasi	DPMPSTSP - KECAMATAN
60	Data Harga Komoditas	DISKOMIDAG
61	Data Pendapatan Asli Daerah	BAKEUDA
62	Data Pajak	BAKEUDA
63	Data Sekolah	DISDIKPORA
64	Data Pendidik dan Tenaga Pendidik	DISDIKPORA
65	Data Siswa	DISDIKPORA
66	Data Fasilitas Pendidikan	DISDIKPORA
67	Data Aset Jalan Irigasi Jaringan	BAG. PEMERINTAHAN - BAG. KESRA - BAG. PEMBANGUNAN - BAG. UMUM - BAG. HUKUM - BAG. PEREKONOMIAN - BAG. ORGANISASI - BAG. PROTOKOL - BAG. PENGADAAN - SEKRETARIAT DPRD - INSPEKTORAT - DISDIKPORA - DKPPKB - DPUPR - DPKPLH - SATPOL PP - DINSOSP3A - DISPERINAKER - DPP - DISDUKCAPIL - DPMD - DISHUB - DISKOMINFO - DISKOMIDAG - DPMPSTSP - DISSIPUS - DISKAN - DISPARBUD - BAPPEDA - BKD - BPBD - KESBANGPOL - KECAMATAN - RSUD

Tabel 4.2 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD
68	Data Aset Tetap Lainnya	BAG. PEMERINTAHAN - BAG. KESRA - BAG. PEMBANGUNAN - BAG. UMUM - BAG. HUKUM - BAG. PEREKONOMIAN - BAG. ORGANISASI - BAG. PROTOKOL - BAG. PENGADAAN - SEKRETARIAT - DPRD - INSPEKTORAT - DISDIKPORA - DKPPKB - DPUPR - DPKPLH - SATPOL PP - DINSOSP3A - DISPERINAKER - DPP - DISDUKCAPIL - DPMD - DISHUB - DISKOMINFO - DISKOMIDAG - DPMPSTSP - DISSIPUS - DISKAN - DISPARBUD - BAPPEDA - BKD - BPBD - KESBANGPOL - KECAMATAN - RSUD
69	Data Kartu Indonesia Pintar	DISDIKPORA
70	Data Presensi	BAG. PEMERINTAHAN - BAG. KESRA - BAG. PEMBANGUNAN - BAG. UMUM - BAG. HUKUM - BAG. PEREKONOMIAN - BAG. ORGANISASI - BAG. PROTOKOL - BAG. PENGADAAN - SEKRETARIAT - DPRD - INSPEKTORAT - DISDIKPORA - DKPPKB - DPUPR - DPKPLH - SATPOL PP - DINSOSP3A - DISPERINAKER - DPP - DISDUKCAPIL - DPMD - DISHUB - DISKOMINFO - DISKOMIDAG - DPMPSTSP - DISSIPUS - DISKAN - DISPARBUD - BAPPEDA - BAKEUDA - BPBD - KESBANGPOL - KECAMATAN - RSUD
71	Data Aduan Masyarakat	DISKOMINFO
72	Data PPID	DISDIKPORA - DKPPKB - DPUPR - DPKPLH - SATPOL PP - DINSOSP3A - DISPERINAKER - DPP - DISDUKCAPIL - DPMD - DISHUB - DISKOMINFO - DISKOMIDAG - DPMPSTSP - DISSIPUS - DISKAN - DISPARBUD - BAPPEDA - BAKEUDA - BKD - BPBD - KESBANGPOL - KECAMATAN
73	Data Perizinan Tenaga Kesehatan	DKPPKB
74	Data SDM Kesehatan Faskes	DKPPKB
75	Data Obat	DKPPKB
76	Data Puskesmas	DKPPKB
77	Data Pensiun	BKD
78	Data Alokasi Dana Desa	DPMD

Tabel 4.2 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD
79	Data Aparat Pemerintah Desa	DPMD
80	Data Potensi Situs dan Cagar Budaya	DISPARBUD
81	Data Usaha Jasa Pariwisata	DISPARBUD
82	Data Destinasi Wisata	DISPARBUD
83	Data Usaha Hotel/Penginapan	DISPARBUD
84	Data Usaha Makanan dan Minuman	DISPARBUD
85	Data SDM Pariwisata	DISPARBUD
86	Data Usaha Biro Perjalanan Wisata	DISPARBUD
87	Data Kunjungan Akomodasi Hotel/Penginapan	DISPARBUD
88	Data Penerangan Jalan	DISHUB
89	Data Trayek	DISHUB
90	Data Pengujian Kendaraan Bermotor	DISHUB
91	Data Pelanggaran Perda	SATPOL PP
92	Data Kejadian Bencana Kebakaran	SATPOL PP
93	Data Perizinan Usaha	DPMPTSP
94	Data Investasi	DPMPTSP
95	Data Mutasi	BKD
96	Data Cuti	BKD
97	Data Pasar Desa	DPMD
98	Data Kunjungan Destinasi Wisata	DISPARBUD
99	Data Perumahan	DPKPLH
100	Data Air Minum dan Sanitasi	DPKPLH
101	Data Drainase Pemukiman	DPKPLH
102	Data Sarana Prasarana Desa	DPMD - KECAMATAN
103	Data BUMDES dan BUMDESMA	DPMD - KECAMATAN
104	Data Karang Taruna	DPMD - KECAMATAN

Tabel 4.2 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD
105	Data Musisi dan Grup Musik	DISPARBUD
106	Data Penyanyi	DISPARBUD
107	Data Rumah Tidak Layak Huni	DPKPLH
108	Data Dalang	DISPARBUD
109	Data Komunitas Seni	DISPARBUD
110	Data Penari	DISPARBUD
111	Data Perupa	DISPARBUD
112	Data Sastrawan dan Penulis	DISPARBUD
113	Data Cagar Budaya	DISPARBUD
114	Data Event Budaya	DISPARBUD
115	Data Izin Pemakaian Alun-alun	DPKPLH
116	Data Tempat Pembuangan Sampah	DPKPLH
117	Data Tempat Pembuangan Akhir	DPKPLH
118	Data Ruang Terbuka Hijau	DPKPLH
119	Data Sarana dan Prasarana PKPLH	DPKPLH
120	Data Produksi Perikanan	DISKAN
121	Data Produksi Ikan Menurut Jenis Alat Tangkap	DISKAN
122	Data Perahu/Kapal Penangkap Ikan	DISKAN
123	Data Kejadian Bencana	BPBD
124	Data Distribusi Bansos	BPBD
125	Data Pendistribusian Air Bersih	BPBD
126	Data Kerusakan Akibat Bencana	BPBD
127	Data Jenis Pertanian	DPP
128	Data Alat Mesin Pertanian dan Hortikultura	DPP
129	Data Kelembagaan Pertanian	DPP
130	Data Komoditas Pertanian	DPP
131	Data Perdagangan dan Penggunaan Benih	DPP

Tabel 4.2 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD
132	Data Perkebunan	DPP
133	Data Pemotongan Ternak	DPP
134	Data Kelompok Asuransi Usaha Ternak Sapi	DPP
135	Data Madrasah Diniyah	BAG. KESRA
136	Data TPQ	BAG. KESRA
137	Data Penyakit Ternak	DPP
138	Data Pangan	DPP
139	Data PPDB Online	DISDIKPORA
140	Data Pengadaan	BAG. PENGADAAN
141	Data Taman	DISDIKPORA
142	Data Perkumpulan Petani	KECAMATAN
143	Data Urusan Wajib Pilihan Umum	DPP
144	Data Rencana Kerja Pemerintah Daerah	DPP
145	Data Jenis Ikan dan Produksi	DISDUKCAPIL - BAPPEDA - KECAMATAN
146	Data Sumber Daya Air	BAPPEDA
147	Data Kebisingan	DISPERINAKER
148	Data Kinerja Pegawai	DISKAN
149	Data BPJS	DPKPLH
150	Data Ketenagakerjaan	DPKPLH
151	Data Pendapatan Pariwisata	DPKPLH
152	Data Penerimaan PAD Kesehatan	DISPARBUD
153	Data Lembaga Kemasyarakatan Desa	DPMD - KECAMATAN
154	Data Retribusi Pelayanan Kesehatan	DISDIKPORA
155	Data Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan	BAG. PEMERINTAHAN - BAG. KESRA - BAG. PEMBANGUNAN - BAG. UMUM - BAG. HUKUM - BAG. PEREKONOMIAN - BAG. ORGANISASI - BAG. PROTOKOL - BAG. PENGADAAN - SEKRETARIAT DPRD - INSPEKTORAT - DISDIKPORA - DKPPKB - DPUPR - DPKPLH - SATPOL PP - DINSOSP3A - DISPERINAKER - DPP - DISDUKCAPIL - DPMD - DISHUB - DISKOMINFO - DISKOMIDAG - DPMPTSP - DISSIPUS - DISKAN - DISPARBUD - BAPPEDA - BAKEUDA - BKD - BPBD - KESBANGPOL - KECAMATAN - RSUD



Tabel 4.2 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD
156	Data Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	BAG. PEMERINTAHAN - BAG. KESRA - BAG. PEMBANGUNAN - BAG. UMUM - BAG. HUKUM - BAG. PEREKONOMIAN - BAG. ORGANISASI - BAG. PROTOKOL - BAG. PENGADAAN - SEKRETARIAT DPRD - INSPEKTORAT - DISDIKPORA - DKPPKB - DPUPR - DPKPLH - SATPOL PP - DINSOSP3A - DISPERINAKEK - DPP - DISDUKCAPIL - DPMD - DISHUB - DISKOMINFO - DISKOMIDAG - DPMPTSP - DISSIPUS - DISKAN - DISPARBUD - BAPPEDA - BAKEUDA - BKD - BPBD - KESBANGPOL - KECAMATAN - RSUD
157	Data Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	DISPERINAKEK
158	Data Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	DKPPKB
159	Data Retribusi Tempat Khusus Parkir	DPMD - KECAMATAN
160	Data Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	DPMPTSP
161	Data Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	DKPPKB
162	Data Retribusi Izin Usaha Perikanan	DPKPLH
163	Data Penerimaan Retribusi	DISHUB
164	Data Usulan Pelayanan Kepegawaian	DISKOMIDAG
165	Data Assesment PNS	DISHUB
166	Data eDatabase Hasil Pembangunan Daerah	DISKOMINFO
167	Data Rumah Tangga Perikanan (RTP)	DISKOMIDAG
168	Data Luas Area Budidaya	DPMPTSP
169	Data Produksi Benih	RSUD
170	Data Jumlah Supplier Ikan	DISPARBUD
171	Data Jumlah Nelayan	DISPARBUD
172	Data Sinden	DPMPTSP
173	Data Waranggono	DISKAN
174	Data Pramugari Tayub	DISDIKPORA - DKPPKB - DPUPR - DPKPLH - DPMD - DISHUB - DISKOMIDAG - DISKAN - DISPARBUD - BAKEUDA - KECAMATAN
175	Data Pengrawit	BKD

Tabel 4.2 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD
176	Data Kelembagaan Pengelola Pariwisata Pokdarwis	BKD
177	Data Stunting	BKD
178	Data Rekapitulasi Jumlah Pekerja Migran Indonesia	BAPPEDA
179	Data Rekapitulasi Jumlah Pencari Kerja	DISKAN
180	Data Rekapitulasi data Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek	DISKAN
181	Data Pengajuan Rekomendasi Sertifikat Elektronik	DISKAN
182	Data Sewa Alat Berat	DISKAN
183	Data Pengujian Konstruksi	DISKAN
184	Data Menara Telekomunikasi	DISKAN
185	Data Ijin Mendirikan Bangunan	DISKAN
186	Data Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	DISPARBUD
187	Data Tukar Menukar Kawasan Hutan	DISPARBUD
188	Data Profil SDA	DISPARBUD
189	Data Pengurus UPKu	DISPARBUD
190	Data BKD Aktif	DISPARBUD
191	Data Pelaku Usaha Mikro	DKPPKB
192	Data Pokmas Ekonomi Produktif	DISPERINAHER
193	Data Agregat Kependudukan	DISPERINAHER

#### 4.4.2. Pemetaan Otorisasi Perangkat Daerah Terhadap Data (*Accountable*)

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki otoritas untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan data yang didefinisikan ditunjukkan dalam tabel 4.3. Berdasarkan tabel tersebut ada 210 data dimana OPD mempunyai kewenangan terkait otoritas data.

Tabel 6.3 Pemetaan Otorisasi Perangkat Daerah Terhadap data (*Accountable*)

No	Data Primer	OPD
1	Data Batas Pemasangan Patok	BAG. PEMERINTAHAN
2	Data Sarana Peribadatan	BAG. KESRA

Tabel 7.3 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD
3	Data Inovator dan TTG	DPMD
4	Data Huffadz	BAG. KESRA
5	Data Register Media	BAG. PROTOKOL
6	Data Produk Hukum	BAG. HUKUM
7	Data BUMD	BAG. PEREKONOMIAN
8	Data UMKM	DISKOMIDAG
9	Data Distributor dan Pengecer Pupuk	DPP
10	Data Izin Usaha Pertambangan	BAG. PEREKONOMIAN
11	Data Pagu Anggaran	BAKEUDA
12	Data Realisasi Belanja	BAKEUDA
13	Data Profil ASN	BKD
14	Data Penyedia Jasa	BAG. PENGADAAN
15	Data Anggota DPRD	SEKRETARIAT DPRD
16	Data Pondok Pesantren	BAG. KESRA
17	Data Perencanaan Pekerjaan Umum	DPUPR
18	Data Jalan dan Jembatan	DPUPR
19	Data Daerah Irigasi	DPUPR
20	Data Saluran Air	DPUPR
21	Data Curah Hujan	DPUPR
22	Data Debit Sungai	DPUPR
23	Data Keadaan Irigasi	DPUPR
24	Data Pengunjung Perpustakaan	DISSIPUS
25	Data Koleksi Perpustakaan	DISSIPUS
26	Data Pemanfaat Rumah Pintar	DISSIPUS
27	Data Jenis Layanan Perpustakaan	DISSIPUS
28	Data e-Book	DISSIPUS
29	Data Organisasi Masyarakat	KESBANGPOL
30	Data Kesejahteraan Rakyat	DINSOSP3A
31	Data Penerima Bantuan Sosial Pangan	DINSOSP3A
32	Data Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan	DINSOSP3A
33	Data Penerima PBI-JKN	DINSOSP3A
34	Data Disabilitas	DINSOSP3A
35	Data Lansia	DINSOSP3A
36	Data Anak Panti	DINSOSP3A

Tabel 7.3 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD
37	Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	DINSOSP3A
38	Data Kelahiran	DKPPKB
39	Data Kematian	DKPPKB
40	Data Kegiatan Pengawasan	INSPEKTORAT
41	Data Budaya Kerja	BAG. ORGANISASI
42	Data Perjanjian Kinerja	BAG. ORGANISASI
43	Data Kinerja Pemerintah	BAG. ORGANISASI
44	Data Industri Kecil Menengah	DISPERINAKEK
45	Data Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	INSPEKTORAT
46	Data Registrasi Pasien	RSUD
47	Data Ruang Kamar Inap	RSUD
48	Data Pemeriksaan Rawat Jalan	RSUD
49	Data Penyakit Terbanyak	RSUD
50	Data Registrasi Rawat Inap	RSUD
51	Data Aset Tanah	KECAMATAN
52	Data Aset Peralatan & Mesin	KECAMATAN
53	Data Aset Bangunan	KECAMATAN
54	Data Persuratan	KECAMATAN
55	Data Identitas Penduduk	KECAMATAN
56	Data Penduduk Desa	KECAMATAN
57	Data Kemiskinan	DINSOSP3A
58	Data Koperasi	DISKOMIDAG
59	Data Pasar	DISKOMIDAG
60	Data Potensi Investasi	DPMPTSP
61	Data Harga Komoditas	DISKOMIDAG
62	Data Pendapatan Asli Daerah	BAKEUDA
63	Data Pajak	BAKEUDA
64	Data Sekolah	DISDIKPORA
65	Data Pendidik dan Tenaga Pendidik	DISDIKPORA
66	Data Siswa	DISDIKPORA
67	Data Fasilitas Pendidikan	DISDIKPORA
68	Data Aset Jalan Irigasi Jaringan	DISDIKPORA
69	Data Aset Tetap Lainnya	DISDIKPORA
70	Data Kartu Indonesia Pintar	DISDIKPORA
71	Data Presensi	BKD

Tabel 7.3 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD
72	Data Aduan Masyarakat	DISKOMINFO
73	Data PPID	DISKOMINFO
74	Data Perizinan Tenaga Kesehatan	DKPPKB
75	Data SDM Kesehatan Faskes	DKPPKB
76	Data Obat	DKPPKB
77	Data Puskesmas	DKPPKB
78	Data Pensiun	BKD
79	Data Alokasi Dana Desa	DPMD
80	Data Aparat Pemerintah Desa	DPMD
81	Data Potensi Situs dan Cagar Budaya	DISPARBUD
82	Data Usaha Jasa Pariwisata	DISPARBUD
83	Data Destinasi Wisata	DISPARBUD
84	Data Usaha Hotel/Penginapan	DISPARBUD
85	Data Usaha Makanan dan Minuman	DISPARBUD
86	Data SDM Pariwisata	DISPARBUD
87	Data Usaha Biro Perjalanan Wisata	DISPARBUD
88	Data Kunjungan Akomodasi Hotel/Penginapan	DISPARBUD
89	Data Penerangan Jalan	DISHUB
90	Data Trayek	DISHUB
91	Data Pengujian Kendaraan Bermotor	DISHUB
92	Data Pelanggaran Perda	SATPOL PP
93	Data Kejadian Bencana Kebakaran	SATPOL PP
94	Data Perizinan Usaha	DPMPTSP
95	Data Investasi	DPMPTSP
96	Data Mutasi	BKD
97	Data Cuti	BKD
98	Data Pasar Desa	KECAMATAN
99	Data Kunjungan Destinasi Wisata	DISPARBUD
100	Data Perumahan	DPKPLH
101	Data Air Minum dan Sanitasi	DPKPLH
102	Data Drainase Pemukiman	DPKPLH
103	Data Sarana Prasarana Desa	DPMD
104	Data BUMDES dan BUMDESMA	DPMD
105	Data Karang Taruna	DPMD
106	Data Musisi dan Grup Musik	DISPARBUD
107	Data Penyanyi	DISPARBUD

Tabel 7.3 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD
108	Data Rumah Tidak Layak Huni	DPKPLH
109	Data Dalang	DISPARBUD
110	Data Komunitas Seni	DISPARBUD
111	Data Penari	DISPARBUD
112	Data Perupa	DISPARBUD
113	Data Sastrawan dan Penulis	DISPARBUD
114	Data Cagar Budaya	DISPARBUD
115	Data Event Budaya	DISPARBUD
116	Data Izin Pemakaian Alun-alun	DPKPLH
117	Data Tempat Pembuangan Sampah	DPKPLH
118	Data Tempat Pembuangan Akhir	DPKPLH
119	Data Ruang Terbuka Hijau	DPKPLH
120	Data Sarana dan Prasarana PKPLH	DPKPLH
121	Data Produksi Perikanan	DISKAN
122	Data Produksi Ikan Menurut Jenis Alat Tangkap	DISKAN
123	Data Perahu/Kapal Penangkap Ikan	DISKAN
124	Data Kejadian Bencana	BPBD
125	Data Distribusi Bansos	BPBD
126	Data Pendistribusian Air Bersih	BPBD
127	Data Kerusakan Akibat Bencana	BPBD
128	Data Jenis Pertanian	DPP
129	Data Alat Mesin Pertanian dan Holtikultura	DPP
130	Data Kelembagaan Pertanian	DPP
131	Data Komoditas Pertanian	DPP
132	Data Perdagangan dan Penggunaan Benih	DPP
133	Data Perkebunan	DPP
134	Data Pematangan Ternak	DPP
135	Data Kelompok Asuransi Usaha Ternak Sapi	DPP
136	Data Madrasah Diniyah	BAG. KESRA
137	Data TPQ	BAG. KESRA
138	Data Penyakit Ternak	DPP
139	Data Pangan	DPP
140	Data PPDB Online	DISDIKPORA
141	Data Pengadaan	BAG. PENGADAAN
142	Data Kantin Sekolah	DISDIKPORA

Tabel 7.3 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD
143	Data Taman	DPP
144	Data Perkumpulan Petani	DPP
145	Data Distribusi Kartu Tani	DPP
146	Data Urusan Wajib Pilihan Umum	BAPPEDA
147	Data Rencana Kerja Pemerintah Daerah	BAPPEDA
148	Data Pencari Kerja	DISPERINAKEK
149	Data Jenis Ikan dan Produksi	KECAMATAN
150	Data Sumber Daya Air	KECAMATAN
151	Data Kebisingan	KECAMATAN
152	Data Ruang Publik	KECAMATAN
153	Data Potensi Wisata	DISPARBUD
154	Data Produk Domestik Desa	KECAMATAN
155	Data Atlet Berprestasi	DISDIKPORA
156	Data Indikator Kinerja	BAG. PEMERINTAHAN
157	Data Kinerja Pegawai	BKD
158	Data BPJS	DKPPKB
159	Data Ketenagakerjaan	DISPERINAKEK
160	Data Pendapatan Pariwisata	DISPARBUD
161	Data Penerimaan PAD Kesehatan	DKPPKB
162	Data Lembaga Kemasyarakatan Desa	DPMD
163	Data Perizinan non Usaha	DPMPTSP
164	Data Retribusi Pelayanan Kesehatan	DKPPKB
165	Data Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan	DPKPLH
166	Data Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	DISHUB
167	Data Retribusi Pelayanan Pasar	DISKOMIDAG
168	Data Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	DISHUB
169	Data Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	DPUPR
170	Data Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang	DISKOMIDAG
171	Data Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	BAKEUDA
172	Data Covid	DKPPKB
173	Data Retribusi Tempat Khusus Parkir	DISPARBUD
174	Data Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	DISDIKPORA

Tabel 7.3 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD
175	Data Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	DPMPTSP
176	Data Retribusi Izin Usaha Perikanan	DISKAN
177	Data Penerimaan Retribusi	BAKEUDA
178	Data Usulan Pelayanan Kepegawaian	BKD
179	Data Assesment PNS	BKD
180	Data Diklat PNS	BKD
181	Data eDatabase Hasil Pembangunan Daerah	BAPPEDA
182	Data Rumah Tangga Perikanan (RTP)	DISKAN
183	Data Luas Area Budidaya	DISKAN
184	Data Produksi Benih	DISKAN
185	Data Jumlah Pengolah	DISKAN
186	Data Jumlah Pemasar	DISKAN
187	Data Jumlah Supplier Ikan	DISKAN
188	Data Jumlah Nelayan	DISKAN
189	Data Sinden	DISPARBUD
190	Data Waranggono	DISPARBUD
191	Data Pramugari Tayub	DISPARBUD
192	Data Pengrawit	DISPARBUD
193	Data Kelembagaan Pengelola Pariwisata Pokdarwis	DISPARBUD
194	Data Stunting	DKPPKB
195	Data Rekapitulasi Jumlah Pekerja Migran Indonesia	DISPERINAKEP
196	Data Rekapitulasi Jumlah Pencari Kerja	DISPERINAKEP
197	Data Rekapitulasi data Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek	DISPERINAKEP
198	Data Pengajuan Rekomendasi Sertifikat Elektronik	DPUPR
199	Data Sewa Alat Berat	DPUPR
200	Data Pengujian Konstruksi	DPUPR
201	Data Menara Telekomunikasi	DPUPR
202	Data Ijin Mendirikan Bangunan	DPUPR
203	Data Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	DPUPR
204	Data Tukar Menukar Kawasan Hutan	DPUPR
205	Data Profil SDA	DPMD
206	Data Pengurus UPKu	DPMD
207	Data BKD Aktif	DPMD
208	Data Pelaku Usaha Mikro	DPMD



Tabel 7.3 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD
209	Data Pokmas Ekonomi Produktif	DPMD
210	Data Agregat Kependudukan	DISDUKCAPIL

### 3.4.3. Pemetaan Hak Memberikan Saran Terhadap Data Oleh Perangkat Daerah ( Consulted)

Dari hasil pemetaan, terdapat 66 data primer yang organisasi perangkat daerah dapat memberikan saran ke OPD Lain yang ditunjukkan dalam tabel 5. Tabel 4.4 ini berisi pemetaan hak memberikan saran terhadap data (*consulted*) dari OPD terhadap data primer.

Tabel 4.4 Pemetaan Hak Memberikan Saran Terhadap Data (*Consulted*)

No	Data Primer	OPD
1	Data Sarana Peribadatan	BAG. KESRA
2	Data Produk Hukum	SEKRETARIAT DPRD
3	Data BUMD	BAG. PEREKONOMIAN
4	Data UMKM	BAG. PEREKONOMIAN
5	Data Izin Usaha Pertambangan	BAG. PEREKONOMIAN
6	Data Pagu Anggaran	BAG. PEREKONOMIAN
7	Data Realisasi Belanja	BAG. PEREKONOMIAN
8	Data Penyedia Jasa	INSPEKTORAT
9	Data Perencanaan Pekerjaan Umum	BAG. PEMBANGUNAN - SEKRETARIAT DPRD
10	Data Jalan dan Jembatan	BAG. PEMBANGUNAN - SEKRETARIAT DPRD
11	Data Daerah Irigasi	BAG. PEMBANGUNAN - SEKRETARIAT DPRD
12	Data Saluran Air	BAG. PEMBANGUNAN - SEKRETARIAT DPRD
13	Data Curah Hujan	BAG. PEMBANGUNAN - SEKRETARIAT DPRD
14	Data Debit Sungai	BAG. PEMBANGUNAN - SEKRETARIAT DPRD
15	Data Keadaan Irigasi	BAG. PEMBANGUNAN - SEKRETARIAT DPRD
16	Data Organisasi Masyarakat	BAG. PEMERINTAHAN
17	Data Kesejahteraan Rakyat	BAG. KESRA - SEKRETARIAT DPRD
18	Data Penerima Bantuan Sosial Pangan	BAG. KESRA

Tabel 4.4 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD
19	Data Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan	BAG. KESRA
20	Data Penerima PBI-JKN	BAG. KESRA
21	Data Disabilitas	BAG. KESRA
22	Data Lansia	BAG. KESRA
23	Data Anak Panti	BAG. KESRA
24	Data Budaya Kerja	BAG. ORGANISASI
25	Data Perjanjian Kinerja	BAG. ORGANISASI
26	Data Kinerja Pemerintah	BAG. ORGANISASI
27	Data Industri Kecil Menengah	BAG. PEREKONOMIAN - DISPERINAKER
28	Data Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	INSPEKTORAT
29	Data Penyakit Terbanyak	DKPPKB
30	Data Aset Tanah	BAKEUDA
31	Data Aset Peralatan & Mesin	BAKEUDA
32	Data Aset Bangunan	BAKEUDA
33	Data Penduduk Desa	DPMD
34	Data Kemiskinan	BAG. KESRA - SEKRETARIAT DPRD
35	Data Pendapatan Asli Daerah	BAG. PEREKONOMIAN
36	Data Pajak	BAG. PEREKONOMIAN
37	Data Kartu Indonesia Pintar	BAG. KESRA
38	Data Presensi	BKD
39	Data Aduan Masyarakat	BAG. ORGANISASI
40	Data Alokasi Dana Desa	BAG. PEREKONOMIAN
41	Data Aparat Pemerintah Desa	BAG. PEMERINTAHAN
42	Data Pasar Desa	DISKOMIDAG
43	Data Rumah Tidak Layak Huni	BAG. KESRA
44	Data Pengadaan	SEKRETARIAT DPRD - INSPEKTORAT
45	Data Urusan Wajib Pilihan Umum	BAG. PEREKONOMIAN
46	Data Rencana Kerja Pemerintah Daerah	BAG. PEREKONOMIAN
47	Data Sumber Daya Air	BAG. PEMBANGUNAN - SEKRETARIAT DPRD
48	Data Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	BAG. PEREKONOMIAN
49	Data Retribusi Izin Usaha Perikanan	BAG. PEREKONOMIAN
50	Data Penerimaan Retribusi	BAG. PEREKONOMIAN
51	Data Usulan Pelayanan	BAG. PEREKONOMIAN

Tabel 4.4 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD
	Kepegawaian	
52	Data Assesment PNS	BAG. PEREKONOMIAN
53	Data Diklat PNS	BAG. PEREKONOMIAN
54	Data eDatabase Hasil Pembangunan Daerah	BAG. PEREKONOMIAN
55	Data Rumah Tangga Perikanan (RTP)	BAG. PEREKONOMIAN
56	Data Luas Area Budidaya	BAG. PEREKONOMIAN
57	Data Produksi Benih	BAG. KESRA
58	Data Jumlah Supplier Ikan	BAG. PEREKONOMIAN
59	Data Jumlah Nelayan	BAG. PEREKONOMIAN
60	Data Sinden	BAG. PEREKONOMIAN
61	Data Warangono	BAG. PEREKONOMIAN
62	Data Pramugari Tayub	BAG. PEREKONOMIAN
63	Data Rekapitulasi Jumlah Pekerja Migran Indonesia	BAG. PEMBANGUNAN
64	Data Pelaku Usaha Mikro	BAG. KESRA
65	Data Pokmas Ekonomi Produktif	BAG. KESRA
66	Data Agregat Kependudukan	BAG. KESRA

#### 3.4.4. Pemetaan Hak Akses Data Oleh Perangkat Daerah ( Informed)

Ada 177 data yang OPD dapat melakukan akses sesuai dengan kebutuhannya. Data produk hukum, identitas penduduk, data aduan masyarakat, data rencana kerja, data pengadaan, data perizinan merupakan kategori yang dibutuhkan diakses oleh banyak OPD seperti yang di tunjukkan dalam tabel 6.

Tabel 4.5 Pemetaan Hak Akses Data oleh OPD ( Informed)

No	Data Primer	OPD Pemilik
1	Data Batas Pemasangan Patok	DPKPLH - DISKAN - BAPPEDA - KECAMATAN
2	Data Sarana Peribadatan	BAG. KESRA - DINSOSP3A - DISSIPUS - BAPPEDA
3	Data Register Media	DISKOMINFO - BAPPEDA - BKD

Tabel 4.5 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD Pemilik
4	Data Produk Hukum	BAG. PEMERINTAHAN - BAG. KESRA - BAG. PEMBANGUNAN - BAG. UMUM - BAG. PEREKONOMIAN - BAG. ORGANISASI - BAG. PROTOKOL - BAG. PENGADAAN - INSPEKTORAT - DISDIKPORA - DKPPKB - DPUPR - DPKPLH - SATPOL PP - DINSOSP3A - DISPERINAKER - DPP - DISDUKCAPIL - DPMD - DISHUB - DISKOMINFO - DISKOMIDAG - DPMTSP - DISSIPUS - DISKAN - DISPARBUD - BAPPEDA - BAKEUDA - BKD - BPBD - KESBANGPOL - KECAMATAN - RSUD
5	Data BUMD	BAG. PEREKONOMIAN - SEKRETARIAT DPRD - DKPPKB - BAPPEDA
6	Data UMKM	BAG. PEREKONOMIAN - SEKRETARIAT DPRD - DPMTSP - DISKAN - DISPARBUD - BAPPEDA - KECAMATAN
7	Data Distributor dan Pengecer Pupuk	SEKRETARIAT DPRD - BAPPEDA - KECAMATAN
8	Data Izin Usaha Pertambangan	BAG. PEREKONOMIAN - SEKRETARIAT DPRD - BAPPEDA
9	Data Pagu Anggaran	BAG. PEREKONOMIAN - SEKRETARIAT DPRD - BAPPEDA
10	Data Realisasi Belanja	BAG. PEREKONOMIAN - SEKRETARIAT DPRD - BAPPEDA
11	Data Penyedia Jasa	BAG. PEMBANGUNAN - INSPEKTORAT - BAPPEDA
12	Data Anggota DPRD	BAPPEDA - BAKEUDA - BKD
13	Data Pondok Pesantren	DISDIKPORA
14	Data Perencanaan Pekerjaan Umum	BAG. PEMBANGUNAN - SEKRETARIAT DPRD - SATPOL PP - BAPPEDA
15	Data Jalan dan Jembatan	BAG. PEMBANGUNAN - SEKRETARIAT DPRD - SATPOL PP - BAPPEDA
16	Data Daerah Irigasi	BAG. PEMBANGUNAN - SEKRETARIAT DPRD - DPKPLH - DPP - BAPPEDA
17	Data Saluran Air	BAG. PEMBANGUNAN - SEKRETARIAT DPRD - DPKPLH - DPP - BAPPEDA
18	Data Curah Hujan	BAG. PEMBANGUNAN - SEKRETARIAT DPRD - DPKPLH - DPP - BAPPEDA - BPBD
19	Data Debit Sungai	BAG. PEMBANGUNAN - SEKRETARIAT DPRD - DPKPLH - BAPPEDA
20	Data Keadaan Irigasi	BAG. PEMBANGUNAN - SEKRETARIAT DPRD - DPKPLH - DPP - BAPPEDA
21	Data Koleksi Perpustakaan	DISDIKPORA - BAKEUDA
22	Data Jenis Layanan Perpustakaan	DISDIKPORA

Tabel 4.5 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD Pemilik
23	Data e-Book	DISDIKPORA - BAKEUDA
24	Data Organisasi Masyarakat	BAG. PEMERINTAHAN - BAPPEDA
25	Data Kesejahteraan Rakyat	BAG. KESRA - SEKRETARIAT DPRD - BAPPEDA
26	Data Penerima Bantuan Sosial Pangan	BAG. KESRA - BAPPEDA
27	Data Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan	BAG. KESRA - BAPPEDA
28	Data Penerima PBI-JKN	BAG. KESRA - BAPPEDA
29	Data Disabilitas	BAG. KESRA - BAPPEDA
30	Data Lansia	BAG. KESRA - BAPPEDA
31	Data Anak Panti	BAG. KESRA - BAPPEDA
32	Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	BAPPEDA
33	Data Kelahiran	DKPPKB - BAPPEDA
34	Data Kematian	DKPPKB - BAPPEDA
35	Data Industri Kecil Menengah	BAG. PEREKONOMIAN
36	Data Registrasi Pasien	DKPPKB - BAPPEDA
37	Data Ruang Kamar Inap	DKPPKB - BAPPEDA
38	Data Pemeriksaan Rawat Jalan	DKPPKB - BAPPEDA
39	Data Penyakit Terbanyak	DKPPKB - BAPPEDA
40	Data Registrasi Rawat Inap	DKPPKB - BAPPEDA
41	Data Identitas Penduduk	DPKPLH - SATPOL PP - DINSOSP3A - DISPERINAKER - DPMD - DISHUB - DISKOMINFO - DISKOMIDAG - DPMTSP - DISSIPUS - BAPPEDA - BKD - RSUD
42	Data Penduduk Desa	BAG. PEREKONOMIAN - BAPPEDA
43	Data Kemiskinan	BAG. KESRA - BAG. PEREKONOMIAN - SEKRETARIAT DPRD - DKPPKB - DISKOMIDAG - BAPPEDA
44	Data Koperasi	BAG. PEREKONOMIAN - BAPPEDA
45	Data Pasar	BAG. PEREKONOMIAN - BAPPEDA
46	Data Potensi Investasi	BAG. PEMBANGUNAN - BAG. PEREKONOMIAN - DPUPR - BAPPEDA
47	Data Harga Komoditas	BAG. PEREKONOMIAN - BAPPEDA
48	Data Pendapatan Asli Daerah	BAG. PEREKONOMIAN - BAPPEDA
49	Data Pajak	BAG. PEREKONOMIAN - DISKOMIDAG - BAPPEDA
50	Data Sekolah	DISSIPUS - BAPPEDA
51	Data Pendidik dan Tenaga Pendidik	DISSIPUS - BAPPEDA - BKD

Tabel 4.5 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD Pemilik
52	Data Siswa	DISSIPUS - BAPPEDA - BKD
53	Data Fasilitas Pendidikan	BAPPEDA - BKD
54	Data Aset Jalan Irigasi Jaringan	BAKEUDA
55	Data Aset Tetap Lainnya	BAKEUDA
56	Data Kartu Indonesia Pintar	BAG. KESRA
57	Data Aduan Masyarakat	BAG. PEMERINTAHAN - BAG. KESRA - BAG. PEMBANGUNAN - BAG. UMUM - BAG. HUKUM - BAG. PEREKONOMIAN - BAG. ORGANISASI - BAG. PROTOKOL - BAG. PENGADAAN - SEKRETARIAT DPRD - INSPEKTORAT - DISDIKPORA - DKPPKB - DUPUR - DPKPLH - SATPOL PP - DINSOSP3A - DISPERRINAKER - DPP - DISDUKCAPIL - DPMD - DISHUB - DISKOMIDAG - DPMTSP - DISSIPUS - DISKAN - DISPARBUD - BAPPEDA - BAKEUDA - BKD - BPBD - KESBANGPOL - KECAMATAN - RSUD
58	Data Perizinan Tenaga Kesehatan	BAPPEDA - RSUD
59	Data SDM Kesehatan Faskes	BAPPEDA - RSUD
60	Data Obat	BAPPEDA
61	Data Puskesmas	BAPPEDA - BKD
62	Data Pensiun	BAG. ORGANISASI - BAPPEDA
63	Data Alokasi Dana Desa	BAG. PEREKONOMIAN - BAPPEDA
64	Data Aparat Pemerintah Desa	BAG. PEMERINTAHAN - BAPPEDA
65	Data Potensi Situs dan Cagar Budaya	BAPPEDA
66	Data Usaha Jasa Pariwisata	DPMTSP - BAPPEDA - BAKEUDA
67	Data Destinasi Wisata	BAG. PEREKONOMIAN - DISHUB - BAPPEDA
68	Data Usaha Hotel/Penginapan	BAG. PEREKONOMIAN - DPMTSP - BAPPEDA - BAKEUDA
69	Data Usaha Makanan dan Minuman	DPMTSP - BAPPEDA - BAKEUDA
70	Data SDM Pariwisata	BAPPEDA
71	Data Usaha Biro Perjalanan Wisata	DPMTSP - BAPPEDA - BAKEUDA
72	Data Kunjungan Akomodasi Hotel/Penginapan	BAPPEDA - BAKEUDA
73	Data Penerangan Jalan	BAPPEDA
74	Data Trayek	DPMTSP - BAPPEDA - BAKEUDA
75	Data Pengujian Kendaraan Bermotor	DPMTSP - BAPPEDA - BAKEUDA
76	Data Pelanggaran Perda	BAPPEDA

Tabel 4.5 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD Pemilik
77	Data Kejadian Bencana Kebakaran	BAPPEDA - BPBD
78	Data Perizinan Usaha	DPUPR - DPKPLH - DISPERINAKEK - DPP - DISHUB - DISKOMINFO - DISKOMIDAG - DISPARBUD - KECAMATAN
79	Data Investasi	BAPPEDA
80	Data Mutasi	BAG. ORGANISASI - BAPPEDA
81	Data Cuti	BAG. ORGANISASI - BAPPEDA
82	Data Pasar Desa	BAG. PEMBANGUNAN - BAG. PEREKONOMIAN - DISKOMIDAG - BAPPEDA
83	Data Kunjungan Destinasi Wisata	BAG. PEREKONOMIAN - BAPPEDA
84	Data Perumahan	BAPPEDA
85	Data Air Minum dan Sanitasi	BAPPEDA
86	Data Drainase Pemukiman	BAPPEDA
87	Data Sarana Prasarana Desa	BAPPEDA
88	Data BUMDES dan BUMDESMA	BAPPEDA
89	Data Karang Taruna	BAPPEDA
90	Data Musisi dan Grup Musik	BAPPEDA
91	Data Penyanyi	BAPPEDA
92	Data Rumah Tidak Layak Huni	BAG. KESRA - DINSOSP3A - BAPPEDA
93	Data Dalang	BAPPEDA
94	Data Komunitas Seni	BAPPEDA
95	Data Penari	BAPPEDA
96	Data Perupa	BAPPEDA
97	Data Sastrawan dan Penulis	BAPPEDA
98	Data Cagar Budaya	BAPPEDA
99	Data Event Budaya	BAG. PEREKONOMIAN - BAPPEDA
100	Data Izin Pemakaian Alun-alun	BAPPEDA
101	Data Tempat Pembuangan Sampah	BAPPEDA
102	Data Tempat Pembuangan Akhir	BAPPEDA
103	Data Ruang Terbuka Hijau	BAPPEDA
104	Data Sarana dan Prasarana PKPLH	BAPPEDA
105	Data Produksi Perikanan	BAG. PEREKONOMIAN - BAPPEDA
106	Data Produksi Ikan Menurut Jenis Alat Tangkap	BAPPEDA
107	Data Perahu/Kapal Penangkap	BAPPEDA

Tabel 4.5 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD Pemilik
	Ikan	
108	Data Kejadian Bencana	BAG. KESRA - DINSOSP3A - BAPPEDA
109	Data Distribusi Bansos	BAG. KESRA - DINSOSP3A - BAPPEDA
110	Data Pendistribusian Air Bersih	BAG. KESRA - DINSOSP3A - BAPPEDA
111	Data Kerusakan Akibat Bencana	BAG. KESRA - DINSOSP3A - BAPPEDA
112	Data Jenis Pertanian	BAG. PEREKONOMIAN - BAPPEDA
113	Data Alat Mesin Pertanian dan Holtikultura	BAPPEDA
114	Data Kelembagaan Pertanian	BAPPEDA
115	Data Komoditas Pertanian	BAG. PEREKONOMIAN - BAPPEDA
116	Data Perdagangan dan Penggunaan Benih	BAPPEDA
117	Data Perkebunan	BAG. PEREKONOMIAN - BAPPEDA
118	Data Pematangan Ternak	BAG. PEREKONOMIAN - DKPPKB - BAPPEDA
119	Data Kelompok Asuransi Usaha Ternak Sapi	BAPPEDA
120	Data Madrasah Diniyah	DISDIKPOR - BAPPEDA
121	Data TPQ	DISDIKPOR - BAPPEDA
122	Data Penyakit Ternak	BAPPEDA
123	Data Pangan	BAPPEDA
124	Data PPDB Online	BAPPEDA
125	Data Pengadaan	INSPEKTORAT - DISDIKPOR - DKPPKB - DPUPR - DPKPLH - SATPOL PP - DINSOSP3A - DISPERINAKER - DPP - DISDUKCAPIL - DPMD - DISHUB - DISKOMINFO - DISKOMIDAG - DPMTSP - DISSIPUS - DISKAN - DISPARBUD - BAPPEDA - BAKEUDA - BKD - BPBD - KESBANGPOL - RSUD
126	Data Taman	DPP - BAPPEDA
127	Data Perkumpulan Petani	DPP - BAPPEDA
128	Data Urusan Wajib Pilihan Umum	BAG. PEREKONOMIAN - BAPPEDA
129	Data Rencana Kerja Pemerintah Daerah	BAG. PEREKONOMIAN - BAPPEDA
130	Data Sumber Daya Air	BAG. PEMERINTAHAN - BAG. KESRA - BAG. PEMBANGUNAN - BAG. UMUM - BAG. HUKUM - BAG. PEREKONOMIAN - BAG. ORGANISASI - BAG. PROTOKOL - BAG. PENGADAAN - SEKRETARIAT DPRD - INSPEKTORAT - DISDIKPOR - DKPPKB - DPUPR - DPKPLH - SATPOL PP - DINSOSP3A - DISPERINAKER - DPP - DISDUKCAPIL - DPMD - DISHUB -



Tabel 4.5 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD Pemilik
		DISKOMINFO - DISKOMIDAG - DPMPSTP - DISSIPUS - DISKAN - DISPARBUD - BAKEUDA - BKD - BPBD - KESBANGPOL - KECAMATAN - RSUD
131	Data Kebisingan	BAG. KESRA - BAPPEDA
132	Data Kinerja Pegawai	BAG. PEREKONOMIAN - BAPPEDA
133	Data BPJS	DPUPR - BAPPEDA
134	Data Ketenagakerjaan	BAPPEDA
135	Data Pendapatan Pariwisata	DPUPR - BAPPEDA
136	Data Penerimaan PAD Kesehatan	BAG. PEREKONOMIAN - BAPPEDA
137	Data Lembaga Kemasyarakatan Desa	DISPARBUD - BAPPEDA
138	Data Retribusi Pelayanan Kesehatan	BAPPEDA
139	Data Retribusi Pelayanan Pasar	DINSOSP3A - BAPPEDA - BKD - KECAMATAN - RSUD
140	Data Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	BAPPEDA
141	Data Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	BAKEUDA
142	Data Retribusi Tempat Khusus Parkir	BAG. PEREKONOMIAN - DKPPKB - DPP - DISKOMIDAG - DPMPSTP - KESBANGPOL
143	Data Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	BAG. PEMBANGUNAN - BAG. UMUM - BAG. HUKUM - BAG. PEREKONOMIAN - BAG. ORGANISASI - BAG. PENGADAAN - DISDIKPORA - DKPPKB - DPUPR - DPKPLH - SATPOL PP - DINSOSP3A - DISPERINAKER - DPP - DPMD - DISHUB - DISSIPUS - DISKAN - DISPARBUD - BAPPEDA - BAKEUDA - BPBD - KESBANGPOL - KECAMATAN - RSUD
144	Data Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	BAG. PEREKONOMIAN - DINSOSP3A - KECAMATAN - RSUD
145	Data Retribusi Izin Usaha Perikanan	BAG. PEREKONOMIAN - DPUPR - KECAMATAN
146	Data Penerimaan Retribusi	BAG. PEREKONOMIAN - DPUPR - DPKPLH - KECAMATAN
147	Data Usulan Pelayanan Kepegawaian	BAG. PEREKONOMIAN - DPUPR - DPKPLH - KECAMATAN
148	Data Assesment PNS	BAG. PEREKONOMIAN - KECAMATAN
149	Data Diklat PNS	BAG. PEREKONOMIAN
150	Data eDatabase Hasil Pembangunan Daerah	BAG. PEREKONOMIAN - BAG. PENGADAAN - DPUPR - DPKPLH - KECAMATAN
151	Data Rumah Tangga Perikanan	BAG. PEREKONOMIAN - BAG. PENGADAAN -

Tabel 4.5 (Lanjutan)

No	Data Primer	OPD Pemilik
	(RTP)	BKD - KECAMATAN
152	Data Luas Area Budidaya	BAG. PEREKONOMIAN - DPUPR - DPKPLH - DISPERINAKER - DPP - DISHUB - DISKOMINFO - DISKOMIDAG - DISPARBUD - KECAMATAN
153	Data Produksi Benih	BAG. KESRA
154	Data Jumlah Supplier Ikan	BAG. PEREKONOMIAN - DPUPR - DPKPLH - DISHUB - KECAMATAN
155	Data Jumlah Nelayan	BAG. PEREKONOMIAN - DISDIKORA - DPUPR - DPKPLH - KECAMATAN
156	Data Sinden	BAG. PEREKONOMIAN - DPUPR - DPKPLH - KECAMATAN
157	Data Waranggono	BAG. PEREKONOMIAN - DPUPR - DPKPLH - DISKOMIDAG - DPMPSTP - KECAMATAN
158	Data Pramugari Tayub	BAG. PEREKONOMIAN
159	Data Pengrawit	BAG. ORGANISASI
160	Data Kelembagaan Pengelola Pariwisata Pokdarwis	BAG. ORGANISASI
161	Data Stunting	BAG. ORGANISASI
162	Data Rekapitulasi Jumlah Pekerja Migran Indonesia	BAG. PEMBANGUNAN
163	Data Rekapitulasi Jumlah Pencari Kerja	BAPPEDA
164	Data Rekapitulasi data Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek	DPUPR - BAPPEDA
165	Data Pengajuan Rekomendasi Sertifikat Elektronik	BAPPEDA
166	Data Sewa Alat Berat	BAPPEDA
167	Data Pengujian Konstruksi	BAPPEDA
168	Data Menara Telekomunikasi	BAPPEDA
169	Data Ijin Mendirikan Bangunan	BAPPEDA
170	Data Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	DISDUKCAPIL - BAPPEDA
171	Data Tukar Menukar Kawasan Hutan	DISDUKCAPIL - BAPPEDA
172	Data Profil SDA	DISDUKCAPIL - BAPPEDA
173	Data Pengurus UPKu	DISDUKCAPIL - BAPPEDA
174	Data BKD Aktif	BAPPEDA
175	Data Pelaku Usaha Mikro	BAG. KESRA - BAPPEDA - RSUD
176	Data Pokmas Ekonomi Produktif	BAG. KESRA - BAPPEDA
177	Data Agregat Kependudukan	BAG. KESRA - BAPPEDA

#### 4.4. Tata Kelola Data

Setelah dihasilkan pemetaan terkait kewenangan data yang digunakan untuk interoperabilitas data, selanjutnya adalah menyusun tata kelola data yang baik. Dari hasil survey dan FGD 1, ringkasan masalah data pada OPD dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.6 Identifikasi masalah terkait data

Kode	Identifikasi Masalah Data
A	Aktivitas manajemen data masih dilakukan di masing-masing OPD
B	Sumber data / Database masih terpencar-pencar untuk setiap OPD
C	Budaya organisasi belum terbiasa dengan manajemen data terpusat
D	Belum ada prosedur formal validasi kualitas data
E	Beberapa data masih bersumber dari excel, word, pdf
F	Tidak ada pembagian kewenangan untuk masing-masing OPD mengenai manajemen data
G	Memiliki banyak aplikasi yang masih tidak terintegrasi (silo)
H	Tingkat keandalan Diskominfo sebagai pusat data informasi belum baik
I	Keterbatasan kemampuan interoperabilitas data internal dan eksternal yang disebabkan oleh perbedaan struktur data
J	Secara umum perhatian terhadap keamanan informasi dan kerahasiaan data masih kurang
K	Tidak adanya regulasi/standar terkait dengan integrasi dan tata kelola data
L	Belum ada kesadaran untuk melakukan update data ketika terjadi perubahan pada objek
M	Masih ada beberapa aplikasi yang belum memanfaatkan sumber data yang dikelola oleh Diskominfo (belum terintegrasi)
N	Belum terdapat Sistem Portal Data (Data Warehouse)
O	Terjadi Pencurian Data & Informasi (Hacking)
P	Aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga tidak memberikan source code sehingga sulit untuk melakukan integrasi
Q	Aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian tidak open source
R	Adanya data yang hilang atau rusak

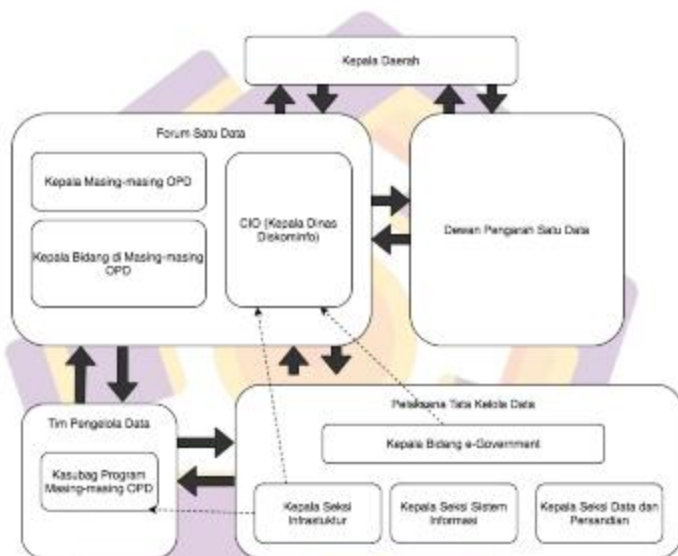
Kemudian dibuatkan solusi atas ringkasan tiap permasalahan tersebut yang dibuat pada tabel 4.7 tentang solusi pengelolaan data yang mengacu dengan pedoman yang ada di DMBOK. Pada tabel 4.7 dijelaskan tentang isu terkait data dan dikolom solusi data menjelaskan tentang solusi dari isu tersebut.

Tabel 4.7 Solusi Pengelolaan Data

Kode	Isu	Solusi Pengelolaan Data
1	Kualitas data	Perlu ada mekanisme validasi kualitas data
2	Standar data	Menyusun standar data ( <i>meta-data</i> )
3	Regulasi data	Menyusun regulasi terkait kewenangan data (Wali Data)
4	Klasifikasi data	Penentuan klasifikasi data (Publik, Rahasia)
5	Koordinasi data	Membentuk Forum Data sebagai platform komunikasi lintas OPD
6	Arsitektur Data	Menyusun arsitektur data dan aplikasi
7	Integrasi data	Membentuk Tim Integrasi Data dan Aplikasi
8	Pengelola data	Membentuk Tim Pengelola Data
9	Pengelola keamanan data	Membentuk Tim Keamanan Informasi
10	Keamanan data	Melakukan penetration testing
11	Data berbagi pakai	Negosiasi dan review perjanjian berbagi data (MoU)
12	Infrastruktur	Mengembangkan infrastruktur dan sistem informasi untuk mengolah data
13	Bisnis proses	Melakukan analisis bisnis proses
14	Standar teknologi	Menyusun standar pengembangan infrastruktur dan sistem informasi
15	Pemrosesan data	Melakukan scrapping data & Extract Transform Load
16	Integrasi	Mengintegrasikan sistem informasi dengan mengembangkan API
17	Publikasi data	Mengembangkan sistem portal data
18	Backup data	Melakukan backup data secara berkala dan melakukan restore data ketika terjadi kehilangan dan kerusakan data

#### 4.4.1 Solusi Permasalahan Data

Rancangan struktur tata kelola data yang diatur dalam kerangka DMBOK menjadi dasar untuk menentukan solusi masalah data. Tahapan pertama ialah dengan memetakan peran dalam tata kelola data dengan struktur organisasi yang ada dalam pemerintah Kabupaten Trenggalek seperti di tunjukkan di gambar 20.



Gambar 4.2 Rancangan Struktur Tata Kelola Data Pemda Trenggalek

Pemetaan masing-masing tata kelola data dalam struktur organisasi pemerintah seperti di gambar 20 dapat dijelaskan melalui melalui tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8 Elemen Struktur Pemerintah

No	Peran	Elemen-elemen dalam Struktur Organisasi Pemerintah
1	Manajemen Eksekutif	Kepala Daerah
2	Dewan Pengarah Satu Data	Sekda, Bappeda, Diskominfo, Kepala Badan Pusat Statistik
3	Forum Satu Data	Kepala Diskominfo, Kepala Masing-masing OPD, Kepala Bidang di Masing-masing OPD
4	Tim Pengelola Data	Kasubag Program Masing-masing OPD
5	Pelaksana Tata Kelola Data	Kepala Bidang e-Government, Kepala Seksi Infrastruktur, Kepala Seksi Sistem Informasi, Kepala Seksi Data dan Persandian
6	Arsitek Data	Kepala Seksi Tata Kelola
7	Analisis Gudang Data	Kepala Seksi Sistem Informasi
8	Spesialis Meta-data	Kepala Seksi Data dan Persandian
9	Analisis Kualitas Data	Kepala Bidang di Masing-masing OPD
10	Administrator Data	Kasubag Program
11	Administrator	Kasubag Program
12	Arsitek Integrasi Data	Kepala Bidang e-Government
13	Spesialis Integrasi Data	Kepala Bidang e-Government
14	Analisis Kecerdasan Bisnis/Administrator	Kepala Bidang di Masing-masing OPD
15	Arsitek Enterprise Data	Kepala Bidang e-Government
16	Administrator Help Desk	Kepala Seksi Data dan Persandian
17	Fasilitator Forum Satu Data	Kepala Seksi Data dan Persandian

Di dalam struktur tata kelola data, terdapat daftar aktivitas-aktivitas tata kelola data di tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9 Aktivitas Tata Kelola Data

No	Kode	Aktivitas Tata Kelola Data
1	ACT-1	Perlu ada mekanisme validasi kualitas data
2	ACT-2	Menyusun standar data (metadata)
3	ACT-3	Menyusun regulasi terkait kewenangan data (produsen Data)
4	ACT-4	Penentuan klasifikasi data (Publik, Rahasia)
5	ACT-5	Membentuk Forum Data sebagai platform komunikasi lintas OPD terkait pengelolaan dan penyelenggaraan data yang akuntabel dan berintegritas.
6	ACT-6	Menyusun arsitektur data dan aplikasi
7	ACT-7	Membentuk Tim Integrasi Data dan Aplikasi
8	ACT-8	Membentuk Tim Pengelola Data
9	ACT-9	Membentuk Tim Keamanan Informasi
10	ACT-10	Melakukan penetration testing
11	ACT-11	Negosiasi dan review perjanjian berbagi data (MoU)
12	ACT-12	Mengembangkan infrastruktur dan sistem informasi untuk mengolah data
13	ACT-13	Melakukan analisis bisnis proses
14	ACT-14	Menyusun standar pengembangan infrastruktur dan sistem informasi
15	ACT-15	Melakukan scraping data
16	ACT-16	Mengintegrasikan sistem informasi dengan mengembangkan API
17	ACT-17	Mengembangkan sistem portal data
18	ACT-18	Melakukan backup data secara berkala dan melakukan restore data ketika terjadi kehilangan dan kerusakan data

Setelah pemetaan peran tata kelola data dalam struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Trenggalek, maka diperoleh peran aktivitas tata kelola

data seperti yang diperlihatkan pada gambar 4.3 dengan menggunakan matrik RACI.

Dalam gambar tersebut, semua peran terkait tata kelola data dihubungkan untuk tiap masing-masing aktivitas tata kelola data disesuaikan dengan struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek.

No	Tabel RACI R = Responsible A = Accountable C = Consulted I = Informed	Struktur Organisasi												
		Kepala Daerah	Seorang/Direktur	Beberapa	Kepala Badan Pusat Statistik	Kepala Dokumen	Kepala Masing-masing OPD	Kepala Bidang OPD	Kepala Sub Bagian Program/OPD	Kepala Seksi Tata Kelola	Kepala Bidang e-Government	Kepala Seksi Infrastruktur	Kepala Seksi Sistem Informasi	Kepala Seksi Data dan Persediaan
1	ACT-1		C		R	A	R	R	R	R				
2	ACT-2				R			R	R	R	R		R/A	
3	ACT-3	C	C		R	A	R	R	R	R	R	R	R	R
4	ACT-4		C		R	I	I	I	R/A	R	R	R	R	R
5	ACT-5	C	C			R/A	R	R						
6	ACT-6					A				R	R	R	R	R
7	ACT-7		I	I	R	A		R	R	R	R	R	R	R
8	ACT-8	C	R	R	R	R	R	R	R/A	I	I	I	I	I
9	ACT-9		I	I		R	A			R		R	R	R
10	ACT-10		I			A		R		R	R	R	R	R
11	ACT-11		A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
12	ACT-12					A			R	R	R	R	R	R
13	ACT-13		I	I	I		A	C	R	C	R	R	R	R
14	ACT-14						A			R	R	R	R	R
15	ACT-15						A						R	R
16	ACT-16						A						R	R
17	ACT-17		I	I	I	R	R/A	I	I	I	R	R	R	R
18	ACT-18		I	R	R	R	R/A	R	R	R	R	R	R	R

Gambar 124.3 Peran Aktivitas Tata Kelola Data

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan terkait perancangan data primer untuk layanan E-Government (Nanang Ruswianto,2018) terkait tatakelola hanya disebutkan perlu adanya payung hukum yang mengatur operasional dan kebijakan dan belum dijabarkan struktur dan peran masing-masing tim.



Didalam penelitian ini tatakelola dijabarkan dari struktur dan peran masing-masing elemen, sehingga lebih jelas peran OPD untuk implementasi interoperabilitas data.

#### 4.4.2 Pemetaan Masalah dengan Area Keputusan

Berdasarkan identifikasi permasalahan data yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek, terdapat pemetaan dengan area keputusan saat ini dalam tata kelola data yang dilakukan untuk menemukan solusi permasalahan data. Pemetaan disiapkan dengan mencari hubungan antara setiap masalah dan hasil yang diperoleh dari kegiatan dalam tata kelola data yang ditentukan. Hasil pemetaan tersebut, dapat ditunjukkan pada gambar 4.4. Penjabaran yang lebih detail terlampir dalam lampiran C.

Pemetaan permasalahan dan solusi tata kelola data	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A					✓		✓	✓	✓		✓							
B			✓	✓	✓	✓	✓					✓					✓	✓
C			✓		✓		✓	✓	✓		✓							
D	✓	✓				✓												
E						✓	✓	✓				✓				✓	✓	✓
F			✓		✓	✓	✓	✓										
G							✓	✓						✓	✓	✓	✓	
H	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
I	✓	✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓		✓	✓	
J	✓			✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓				✓
K	✓	✓	✓	✓							✓			✓				

Gambar 4.4 Pemetaan Masalah dengan Area Keputusan

#### 4.4.3 Konfirmasi Hasil Rancangan Struktur Tata Kelola Data

Setelah merancang struktur tata kelola data Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari peran, area keputusan, dan kewenangan, konfirmasi hasil rancangan dibuat agar dapat diimplementasikan sesuai dengan rencana dan kondisi yang ada.

Konfirmasi dilakukan langsung kepada pihak-pihak terkait dengan tata kelola data yang ada di Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam Forum Group Discussion dan wawancara dengan Dinas Pengelola TIK yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek .



#### 4.5 Rekomendasi Skema Interoperabilitas Data

Data primer/data induk yang sudah terdefiniskan ini dapat digunakan untuk menyusun skema interoperabilitas berdasarkan bidang urusan yang layanannya yang tercantum dalam indikator SPBE.

Pola interaksi yang direkomendasikan menggunakan Web-services ( API). Web Services adalah sebuah open standard yang memudahkan integrasi antar aplikasi secara “*loose-coupling*” berdasarkan standar yang diterima umum. Dengan standar ini, aplikasi dapat mendefinisikan beberapa “services” atau layanan aplikasi yang dapat digunakan oleh aplikasi lain melalui protokol yang baku berdasarkan http dan xml. Ada dua jenis integrasi Web services yang ditunjukkan di gambar 4.5, yaitu:

Notasi / penggambaran:

A. One-way



B. Request-response



Gambar 4.5 Penggambaran Web Services

- a. One-way dalam jenis ini, aplikasi asal mengirimkan suatu informasi kepada aplikasi target. Aplikasi asal tidak memerlukan suatu jawaban dari aplikasi target.

- b. Request-response dalam jenis ini, aplikasi asal membutuhkan suatu informasi dari aplikasi target. Untuk mendapatkan informasi ini, aplikasi asal menyambungkan diri kepada web services aplikasi target untuk meminta informasi tersebut. Jika aplikasi asal diperbolehkan dan aplikasi target mempunyai informasi tersebut, maka permintaan ini dijawab oleh aplikasi target dan informasi yang diminta ditransfer kepada aplikasi asal.

Keunggulan dari pola interaksi ini memudahkan untuk manipulasi data tanpa harus memiliki hak akses untuk ke server aplikasi asal. Sehingga dari sisi keamanan informasi lebih terjamin. Pola ini umum digunakan baik di sistem informasi pemerintahan maupun di swasta.

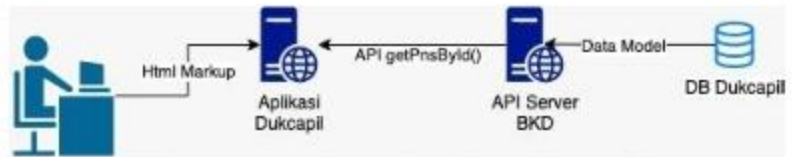
Salah satu contohnya di bidang urusan kepegawaian untuk pemanfaatannya verifikasi data kependudukan yang ada di DUKCAPIL dengan data kepegawaian di BKD. Skema interoperabilitas yang terkait data urusan kepegawaian ini melibatkan instansi Diskdukcapil, Bag Organisasi, BKD seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.6 Data induk/primer yang digunakan antara lain Data Identitas Penduduk, data Profil ASN, Data Kinerja Pegawai.



Gambar 4.6 Skema Interoperabilitas bidang urusan kepegawaian

Struktur tabel database terkait ditunjukkan dalam gambar 4.7. Database di tabel `data_kependudukan` di SIK dibutuhkan juga oleh BKD untuk data profil PNS yang masuk dalam tabel `data_profil_pns` di database SIMPEG.



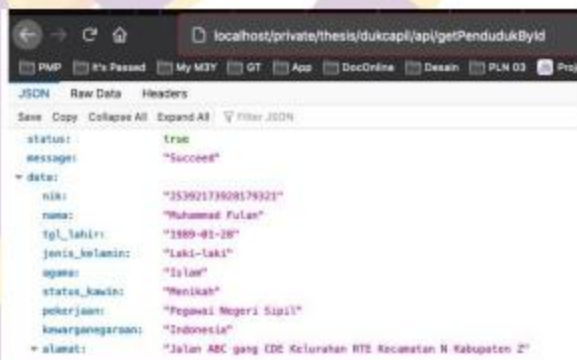


Gambar 4.8 Ilustrasi web services aplikasi dukcapil dengan API server BKD

Ilustrasi proses kerja API sebagai berikut :

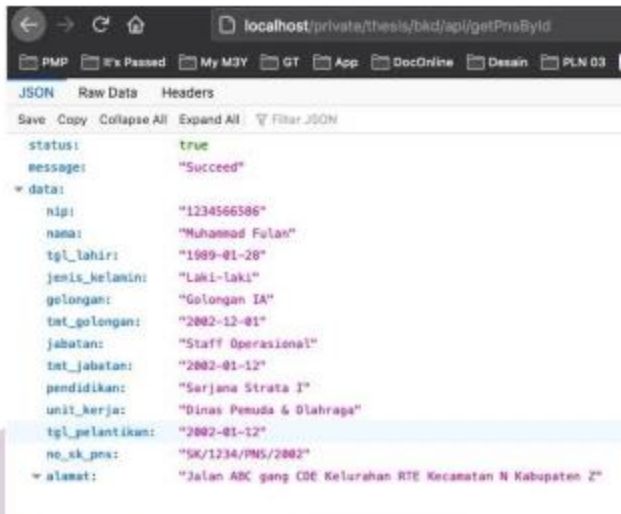
### 1. Aplikasi mengakses API Server

Untuk API dari Dukcapil ditunjukkan Gambar 4.9 adalah berisi data-data kependudukan.



Gambar 4.9 Contoh API Dukcapil

Sedangkan contoh API di BKD yang berisi data-data kepegawaian ditunjukkan pada gambar 4.10.



Gambar 4.10 Contoh API di BKD

2. API melakukan request atau permintaan kepada Server berkaitan dengan data
3. Server memberikan respon atau tanggapan kepada API
4. Kemudian, API menyampaikan respon berupa data atau informasi kepada aplikasi.

Selanjutnya aplikasi verifikasi data melakukan validasi data kependudukan yang ada di DUKCAPIL dengan data kepegawaian di BKD yang ditunjukkan pada gambar 4.11.



Baris: Profil Perseorangan Logout

Detail Profil Perseorangan

Profil Perseorangan		Profil PNS	
NIK	123456789	NIP	123456789
NAMA	Muhammad Fajar	Nama	Muhammad Fajar
Tanggal lahir	1999-01-28	Tanggal lahir	1999-01-28
Jenis Kelamin	Laki-laki	Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat	Jalan ABC yang CDE Kelurahan FGH Kecamatan HI Kabupaten J	Alamat	Jalan ABC yang CDE Kelurahan FGH Kecamatan HI Kabupaten J
		Organisasi	Organisasi K, TMT 2020-12-31
		Jabatan	Staff Operasional, TMT 2020-01-12
		Instansi	Sekolah Dasar 1
		Unit Kerja / Divisi	Divisi Perencanaan & Anggaran
		No dan Tanggal Pembuatan	1992-01-12, Palsu 001/123456789/2002

Data Dasar, Informasi, dan Lainnya

Gambar 4.11 Contoh pemanfaatan API untuk verifikasi data.

Selain Bidang Urusan Kepegawaian, rekomendasi skema interoperabilitas data antar OPD juga disusun untuk bidang urusan yang lain, yang selengkapnya ada di Lampiran D.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

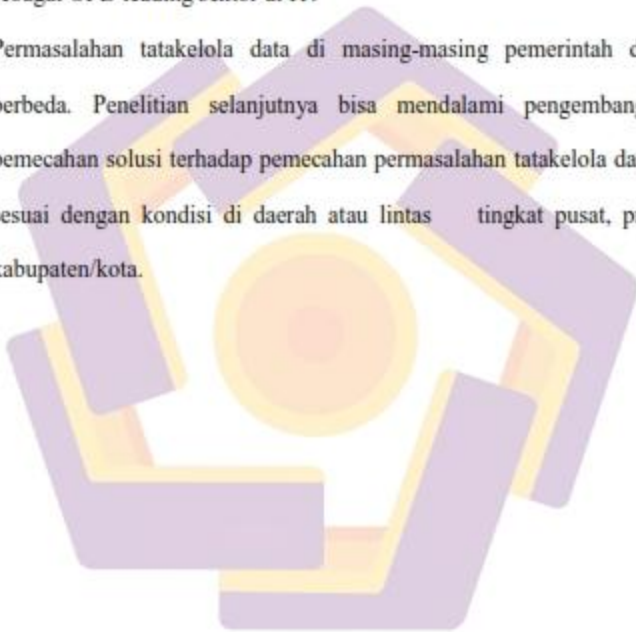
1. Berdasarkan dari hasil penelitian di Pemerintah Kab. Trenggalek, didefinisikan daftar data primer sejumlah 210 data dari 35 instansi yang disurvei serta dipetakan kewenangan atas data-datanya.
2. Penelitian ini berhasil merumuskan solusi tatakelola data untuk Pemerintah Kabupaten Trenggalek yaitu struktur tata kelola data dalam struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Trenggalek, serta peran aktivitas tata kelola data untuk memecahan 18 permasalahan data.

#### **5.2. Saran dan Rekomendasi**

Saran dan untuk implementasi yang keberlanjutan serta pengembangan penelitian sejenis.

1. Implementasi tatakelola data dan pemanfaatan data induk/data primer diperlukan komitmen oleh semua OPD sehingga tujuan seperti yang diamanahkan dalam dalam Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia terkait kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan antar instansi dapat tercapai.

2. Data induk/data primer merupakan data yang bersifat dinamis sehingga perlu dikelola dan diupdate secara berkesinambungan yang melibatkan seluruh OPD yang di koordinir oleh Kominfo.
3. Untuk implementasi skema interoperabilitas disarankan menggunakan Web-services (API) dan masing-masing OPD perlu koordinasi dengan Kominfo sebagai OPD leading sektor di IT.
4. Permasalahan tatakelola data di masing-masing pemerintah daerah bisa berbeda. Penelitian selanjutnya bisa mendalami pengembangan dalam pemecahan solusi terhadap pemecahan permasalahan tatakelola data ini yang sesuai dengan kondisi di daerah atau lintas tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.



## DAFTAR PUSTAKA

### PUSTAKA BUKU

- Asra, Abuzar dkk, 2015. Metode Penelitian Survey, IN MEDIA ISBN 978-602-0946-37-5, Bogor
- Hasibuan, Z A, 2007. Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi : Konsep, Teknik dan Aplikasi. Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia
- Mosley M., Brackett M., Earley S., Henderson D, 2009. The DAMA Guide to The Data Management Body of Knowledge (DAMA-DMBOK Guide). USA : Technics Publications,
- The DAMA Guide to The Data Management Body of Knowledge (DAMA-DMBOK Guide), 2017, p. 7. Second edition

### PUSTAKA MAJALAH, JURNAL ILMIAH ATAU PROSIDING

- Mutiara Aisyah I, Yova Ruldeviyai, 2018, Designing Data Governance Structure Based On Data Management Body of Knowledge (DMBOK) Framework: A Case Study on Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS) Universitas Indonesia
- Wibisono, Septian B., et al, 2018, "Data Quality Management Maturity Measurement of Government-Owned Property Transaction in BMKG." *Communication and Information Technology Journal*, vol. 12, no. 2, 2018, doi: [10.21512/commit.v12i2.4470](https://doi.org/10.21512/commit.v12i2.4470).
- Nanang Ruswianto, Ema Utami, M. Rudyanto Arief, 2018, Perancangan Data Primer Untuk Layanan E-Government Berbasis Ketugasan Dengan Pendekatan Model Diagram Raci (Studi Kasus : Pemerintah Kota Magelang), Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia; UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta, ISSN : 2302-3805
- Kamarudin , Kusri , Andi Sunyoto, 2018, Uji Kinerja Sistem Web Service Pembayaran Mahasiswa Menggunakan Apache JMeter (Studi Kasus: Universitas AMIKOM Yogyakarta). *Jurnal Teknologi Informasi* Vol. XIII Nomor 1 Maret 2018 ISSN: 1907-2430
- Firman Bimasakti, Yuwanto, Dzunuwanus Ghulam Manar, 2017, Tatakelola Pemerintahan Berbasis Electronic Government di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

- Semarang),2017, Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 03 2017, Universitas Diponegoro
- Aprianty, D.R., 2016. Penerapan kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id* Vol 4 Nomor 4: 1589-1602.
- Kurniasih, Dewi, 2016, Penyusunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VI No. 1, Bandung.
- Ma'arif, Muhammad Rifqi, 2016. Pengembangan Model Interoperabilitas Aplikasi e-Government Untuk Proses Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Di Indonesia. *Teknomatika* 8.2 – Januari 2016; STMIK AYani. Yogyakarta.
- Sirait, E. R. , 2016. Implementasi Teknologi Big Data di Lembaga Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, 117-134.
- Ferra Arik Tridalestari, Hanung Nindito Prasetyo, 2015, Identifikasi Fungsi Tata Kelola Data Framework Dama International Pada Universitas X, *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan* , Universitas Widyatama, Issn : 2407 – 3911
- Adi, Arif, and Riyanto Riyanto,2013, "Pemanfaatan Web Service Sebagai Integrasi Data Farmasi Di RSUD Banyumas." *Juita*, vol. II, no. 4, 2013, doi:[10.30595/juita.v2i4.826](https://doi.org/10.30595/juita.v2i4.826).
- E. Sutanta and K. Mustofa, 2012, "Strategi Pengembangan Web Service Untuk Integrasi Inter Sistem E-Government," *Sisfoteknika*, pp. 1–5
- Hanung Nindito Prasetyo, Kridanto Surendro,2013, Perbandingan FrameworkTata Kelola Data DGI dan DAMA International, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) 2013, SSN: 1907 -5022
- Hüner, K. M., Otto, B., dan Österle, H., 2011. Collaborative management of business metadata. *International Journal of Information Management*, 31 (4), 366– 373
- Lambert, S.D. & Loiselle, C.G. (2008). Combination individual interviews and focus groups to enhance data richness. *Journal of Advanced Nursing*, 62, 2, 228-237

- Lehoux P., Blake P. & Daudelin, G. (2006). Focus group research and “the patient’s view”. *Social Science and Medicine*, 63, 2091-2104.
- Leung, C.M., Ho, G.K.H., Foong, M., Ho, C.F., Lee P.K.K. & Mak L.S.P. (2005). Small-group hypertension health education programme: A process and outcome evaluation. *Journal of Advanced Nursing*, 52, 6, 631-639.
- McLafferty, I. (2004). Focus group interviews as a data collecting strategy. *Journal of Advanced Nursing*, 48, 187-194.
- Carey, M.A. (1994). The group effect in focus groups: planning, implementing, and interpreting focus group research. In *Critical Issues in Qualitative Research Methods* (Morse J.M., ed.). Sage: Thousand Oaks, 225-241.

#### **PUSTAKA LAPORAN PENELITIAN**

- Nanang Ruswianto, 2018, Perancangan Data Primer Untuk Layanan E-Government Berbasis Ketugasan Dengan Pendekatan Model Diagram Raci (Studi Kasus: Pemerintah Kota Magelang), Tesis, Universitas Amikom Yogyakarta
- Ni Luh Aniek Laksmidewi, 2017, Framework Interoperabilitas Data E-Government Provinsi Bali Dengan Cobit 4.1 Dan legif, Tesis Universitas Udayana, Bali
- Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Peraturan Presiden no 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pedoman Nomor 7 tahun 2013 tentang Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan publik
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

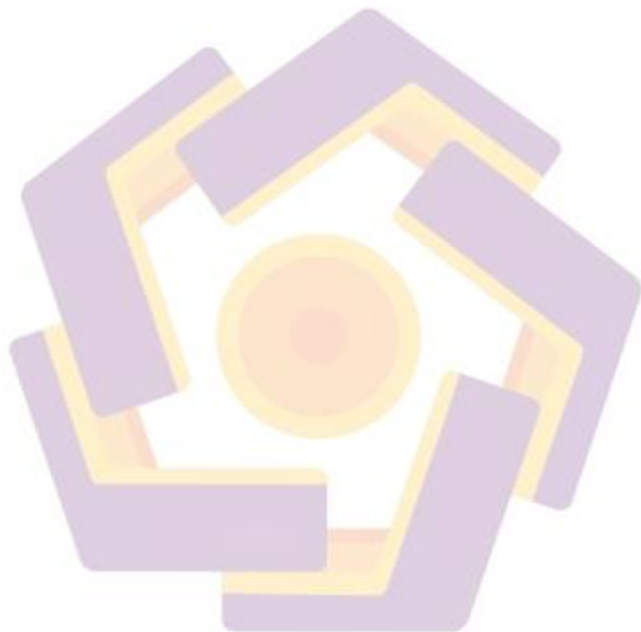
#### **PUSTAKA ELEKTRONIK**

- Kantor Staf Presiden, 12 April 2020, Perkenalan Satu Data. Retrieved from Portal Satu Data Indonesia: [data.go.id](http://data.go.id)
- Masterplan E-government Kabupaten Trenggalek, 30 Maret 2020  
<https://trenggalekkab.go.id/download/Presentasi-Masterplan-Trenggalek-DPRD-Bupati.pdf>

Pemkab Trenggalek. 13 April 2020, KUMPULKAN PETUGAS OPD,  
BAPPEDA DORONG KETERISIAN DATA  
. <https://www.trenggalekkab.go.id/kategori?page=189>

Metode Penelitian Kualitatif, 30 Maret 2020, [http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3\\_Metpen-Kualitatif.pdf](http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf)

Freedom of Information Network Indonesia 12 April 2020  
<http://kebebasaninformasi.org/2016/05/04/perkuat-infrastruktur-transparansi-untuk-benahi-pengelolaan-data-pemerintah/>



## LAMPIRAN





## LAMPIRAN A

# Form Survey

## Penyusunan Kamus Data Pemerintahan

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Dalam rangka kegiatan Penyusunan Kamus Data dalam rangka mewujudkan satu data indonesia, mohon bantuan untuk mengisi survey form berikut ini.

Atas bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Nama Satuan Kerja	
Nama Narasumber	
Kontak (HP/Email)	

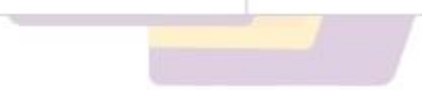
Petunjuk :

- Mohon isi dengan data apa saja yang dimiliki oleh seluruh bidang di OPD anda.

- Untuk dapat mengisi form ini direkomendasikan berkoordinasi dengan seluruh bidang di OPD anda.

A. Ketersediaan Data Primer di Dinas Anda							
No	Nama Data	Field/Atribut	Deskripsi Data	Share Internal Pemkab (Ya/Tidak)	Share Eksternal (Kementerian/ Mitra/ Publik/ Tidak)	Aplikasi Pengelola Data	Keterangan
#	Data Penduduk	NIK, Nama_Lengkap, Jenis_Kelamin, Tempat_Lahir, Tanggal_Lahir, Golongan_Darah, Agama, Pendidikan_Terakhir, Jenis_Pekerjaan, Nama_Ibu_Kandung, Nama_Ayah_Kandung, Alamat, Telp, E-Mail	Data terkait profile individu penduduk	Ya	Tidak	SI/ AK	Tidak di share ke publik. Sudah diatur dalam peraturan no ABC
#	Data Kepegawaian	NIP, Nama, Jabatan, Golongan, Alamat, Instansi	Data terkait profile pegawai	Ya	Kementerian	SI Kepegawaian	Data ini dishare ke BKN
1							

2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							



Petunjuk :

- Mohon isikan data apa saja yang dibutuhkan di Dinas anda dari OPD lain.
- Untuk dapat mengisi form ini direkomendasikan berkoordinasi dengan seluruh bidang yang ada di Dinas anda.

<b>B. Kebutuhan data dari OPD lain</b>					
No	Nama Data	Atribut / Format Struktur Data	Deskripsi Kebutuhan	OPD Pemilik Data	Nama Aplikasi (jika ada)
#	<i>Data Penduduk</i>	<i>NIK, Nama, Alamat, Tanggal Lahir</i>	<i>Verifikasi proses perizinan</i>	<i>DISDUKCAPIL</i>	<i>SIAK</i>
#	<i>Data Tata Ruang</i>	<i>Kategori Wilayah, Keterangan, Koordinat Area</i>	<i>Pembuatan aplikasi GIS materi approval proses ijin IMB</i>	<i>DPUPR</i>	<i>Tidak ada</i>
1					
2					
3					
4					
5					

6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Petunjuk :

- Isikan hanya sistem informasi yang digunakan di Dinas Anda baik itu sistem milik Kementerian maupun milik Pemda.
- Mohon isikan deskripsi sistem informasi, terutama untuk aplikasi yang namanya dengan singkatan (ex : SIAK, SPGDT, SIMARDI dst)

### C. Daftar Sistem Informasi yang digunakan

#	Nama Software (Sistem Informasi)	Deskripsi Singkat	Data Output	Pengembang (Kementerian/Pemda)	Keterangan
#	<i>SI Kepegawaian</i>	<i>Sistem Informasi Pengelolaan Pegawai</i>	<i>data pegawai, data payroll, data kinerja pegawai</i>	<i>BKN</i>	
1					
2					
3					
4					

5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

*Petunjuk :*

- *Isikan hanya informasi terkait masalah yang dinaungi di OPD Anda*
- *Mohon isikan jawaban dari pertanyaan yang ada pada kotak di bawah*

#### **D. Identifikasi Masalah di Sektor OPD Anda**

1. Masalah apa saja yang dihadapi pada sektor pemerintahan yang dibidangi oleh OPD Anda?

2. Bisnis proses apa saja yang ada di OPD Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut?

3. Data pemerintahan apa saja yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut?

4. Apakah data tersebut dapat diakses secara bebas (*openly available*) atau perlu izin khusus (*special permission*)?

5. Apakah data tersebut sudah dikelola dengan sistem informasi?

6. Setiap berapa kali data tersebut di-*update*?













LAMPIRAN C

Pemetaan Masalah dan Solusi Tatakelola Data

Kode	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Masalah / Solusi	Penyusunan kebijakan/standar data	Mengajukan standar data	Mengajukan regulasi terkait manajemen data (MAD)	Penyusunan kebijakan data (PUC, KAWA)	Membentuk Forum Data sebagai wadah koordinasi antar DPO terkait pengumpulan, pengolahan, dan pertukaran data yang melibatkan seluruh pemangku	Mengajukan standar data	Membentuk Tim Tugas Data dan Aplikasi	Membentuk Tim Tugas Data dan Aplikasi	Membentuk Tim Keamanan Informasi	Melakukan audit keamanan	Menyusun rencana program terkait data (MAD)	Mengembangkan infrastruktur data untuk informasi yang terintegrasi dan terpadu	Melakukan audit keamanan	Mengajukan standar pengumpulan, pengolahan, dan pertukaran data	Melakukan scanning data	Mengembangkan sistem manajemen terintegrasi MAD	Mengembangkan standar data	Melakukan audit keamanan
A					ACT 8.5		ACT 9.1	ACT 8.8	ACT 8.9		ACT 10.1							
B			ACT 6.3	ACT 6.4	ACT 6.5	ACT 6.6	ACT 6.7	ACT 6.7				ACT 6.10				ACT 6.9	ACT 6.17	
C			ACT 6.3		ACT 6.5		ACT 6.7	ACT 6.8	ACT 6.8		ACT 10.1							
D	ACT 10.1	ACT 10.2				ACT 10.0												
E						ACT 6.6	ACT 6.7	ACT 6.8				ACT 6.10			ACT 6.16	ACT 6.16	ACT 6.17	
F			ACT 7.3		ACT 7.5	ACT 7.5	ACT 7.7	ACT 7.8										
G							ACT 6.7	ACT 6.8						ACT 6.14	ACT 6.15	ACT 6.16	ACT 6.17	
H	ACT 11.1	ACT 11.2	ACT 11.3	ACT 11.4	ACT 11.5	ACT 11.6	ACT 11.7	ACT 11.8	ACT 11.8	ACT 11.9	ACT 11.11	ACT 11.12	ACT 11.13	ACT 11.14	ACT 11.15	ACT 11.16	ACT 11.17	ACT 11.18
I	ACT 1.1	ACT 1.2				ACT 1.6	ACT 1.7	ACT 1.8				ACT 1.12	ACT 1.13	ACT 1.14		ACT 1.16	ACT 1.17	
J	ACT 1.1			ACT 1.4		ACT 1.5		ACT 1.6	ACT 1.9	ACT 1.10		ACT 1.12			ACT 1.14			ACT 1.18

Kode	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Masalah / Solusi	Perencanaan kebutuhan aplikasi data	Mengikuti standar data pada data	Mengikuti regulasi terkait manajemen data (DAS Data)	Perencanaan kebutuhan data (PUB, KIRING)	Membuat Peta Data yang menggabungkan atau DPO terkait pengelompokan data yang dibutuhkan	Mengikuti standar data dan format	Membuat EIR dengan Data dan Aplikasi	Membuat EIR dengan Data dan Aplikasi	Membuat EIR dengan Data dan Aplikasi	Membuat EIR dengan Data dan Aplikasi	Membuat EIR dengan Data dan Aplikasi	Membuat EIR dengan Data dan Aplikasi	Membuat EIR dengan Data dan Aplikasi	Membuat EIR dengan Data dan Aplikasi	Membuat EIR dengan Data dan Aplikasi	Membuat EIR dengan Data dan Aplikasi	Membuat EIR dengan Data dan Aplikasi	Membuat EIR dengan Data dan Aplikasi	Membuat EIR dengan Data dan Aplikasi
K	Tidak adanya regulasi standar terkait dengan program dan data aplikasi data	ACT B1	ACT C2	ACT B3	ACT K4						ACT K1			ACT B6					
L	Belum ada spesifikasi untuk memastikan aplikasi data bekerja dengan standar data yang ditetapkan	ACT L1				ACT L3	ACT L4	ACT L7	ACT L8	ACT L9		ACT L2		ACT L6					
M	Manajemen data yang belum terintegrasi dengan sistem lain (Data silo) dan belum terintegrasi						ACT M4	ACT M1	ACT M5			ACT M2		ACT M4		ACT M3	ACT M7		
N	Belum terdapat Sistem Portal Data (Data Warehouse)	ACT N1				ACT N5	ACT N6	ACT N7	ACT N8			ACT N9				ACT N4	ACT N7		
O	Terdapat Pemodelan Data & Metadata (Data Modeling)								ACT O4	ACT O3		ACT O2							ACT O5
P	Aplikasi yang dikembangkan dan tidak terintegrasi dengan sistem lain atau tidak terintegrasi						ACT P4	ACT P7	ACT P8		ACT P5	ACT P2		ACT P6	ACT P5	ACT P6			
Q	Aplikasi yang dikembangkan dan belum terintegrasi dengan sistem lain						ACT Q4				ACT Q1	ACT Q2		ACT Q3					
R	Adanya data yang hilang atau rusak	ACT R1				ACT R5	ACT R9		ACT R8	ACT R9	ACT R3		ACT R2		ACT R4				ACT R6



## Lampiran D. Rekomendasi Skema Interoperabilitas

## 1. Bidang Urusan Kepegawaian

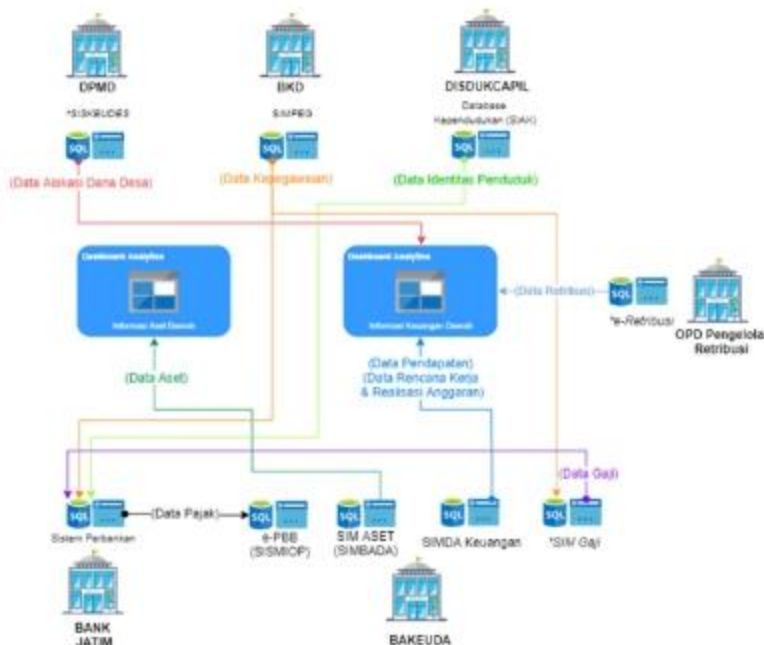


Keterangan :

Skema interoperabilitas yang terkait data urusan kepegawaian ini melibatkan instansi Diskdukcapil, Bag Organisasi, BKD. Data induk/primer yang digunakan antara lain Data Identitas Penduduk, data Profil ASN, Data Kinerja Pegawai.

## 2. Bidang Urusan Keuangan dan Aset

Bidang Urusan Keuangan & Aset	
Komponen	Aset, Keuangan, Penggajian
Deskripsi	Mengeleola Pelayanan Internal & Eksternal
Unit Primer	BAKEUDA, DPMD, OPD Pengelola Restribusi



Keterangan :

Skema interoperabilitas yang terkait data urusan keuangan dan aset ini melibatkan instansi BAKEUDA, DPMD, OPD Pengelola Restribusi. Aplikasi yang belum ada perlu dikembangkan seperti SIM Gaji, Sistem Keuangan Pedesaan (Siskeudes) terlebih dahulu sehingga integrasi bisa dilakukan.





#### 4. Bidang Urusan Perencanaan dan Pembangunan

Bidang Urusan Perencanaan & Pembangunan	
Kategori	Perencanaan, Penganggaran, Monitoring & Evaluasi
Deskripsi	Mengelola Pelayanan Internal
Unit Primer	Bappeda, Inspektorat, Bag. Pengadaan



#### Keterangan :

Skema interoperabilitas yang terkait data urusan Perencanaan dan Pembangunan ini melibatkan OPD utama Bappeda, Inspektorat, Bagian Pengadaan seperti ditunjukkan pada gambar 14. Data induk yang digunakan antara lain data kegiatan pengawasan, data pengadaan ASN, Data Rencana Kerja. Aplikasi yang belum ada perlu dikembangkan terlebih dahulu *SIM Whistle Blowing System*.

## 5. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang Urusan Pendidikan	
Komponen	Pendidikan
Deskripsi	Mengelola Pelayanan Internal & Eksternal
Unit Primer	DISDIKPORA



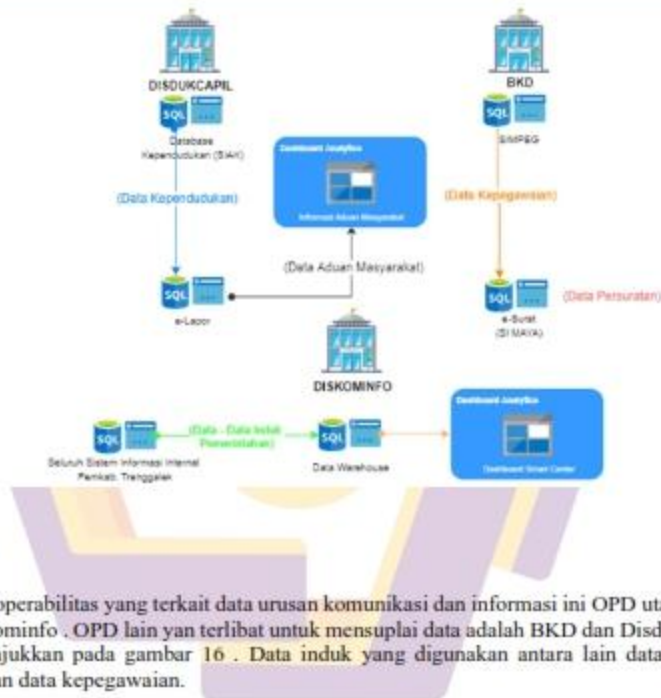
### Keterangan :

Skema interoperabilitas yang terkait data urusan pendidikan unit utamanya adalah DISDIKPORA. OPD lain yang terlibat untuk mensuplai data adalah BKO dan Disdukcapil seperti ditunjukkan pada gambar 15. Data induk yang digunakan antara lain data pokok pendidikan dan data kepegawaian.

## 6. Bidang Urusan Informasi dan Komunikasi

### Bidang Urusan Informasi dan Komunikasi

Komponen	Informasi dan Komunikasi
Deskripsi	Mengelola Pelayanan Internal & Eksternal
Unit Primer	Diskominfo



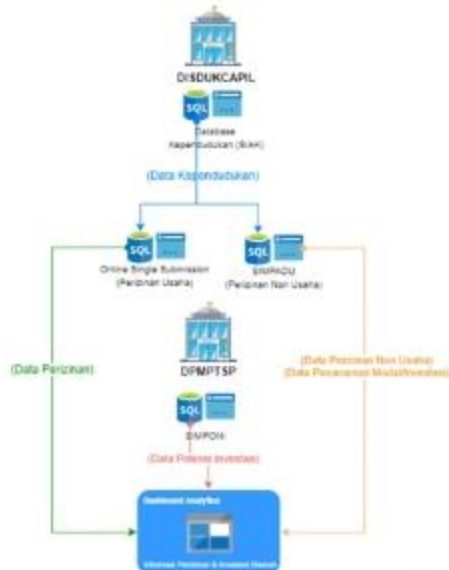
#### Keterangan

Skema interoperabilitas yang terkait data urusan komunikasi dan informasi ini OPD utamanya adalah Diskominfo . OPD lain yan terlibat untuk mensuplai data adalah BKD dan DisdukcapiI seperti ditunjukkan pada gambar 16 . Data induk yang digunakan antara lain data pokok pendidika dan data kepegawaian.

## 7. Bidang Urusan Perizinan dan Penanamann Modal

### Bidang Urusan Perizinan & Penanaman Modal

Komponen	Perizinan
Deskripsi	Mengelola Pelayanan Internal & Eksternal
Unit Primer	DPMPTSP

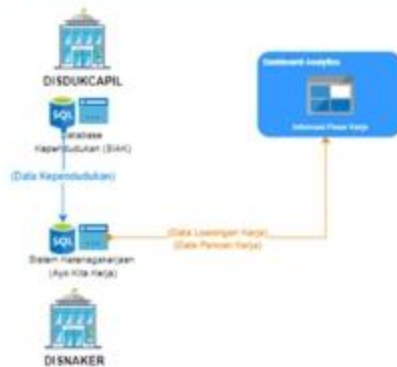


#### Keterangan:

Skema interoperabilitas yang terkait data urusan perizinan dan penanaman modal ini OPD utamanya adalah DPMPTSP. OPD lain yang terlibat untuk mensuplai data adalah Disdukcapil. Data induk yang digunakan antara lain data kependudukan, data perizinan, data penanaman modal/investasi.

## 8. Bidang Urusan Ketenaga Kerjaan

Bidang Urusan Ketenagakerjaan	
Komponen	Ketenagakerjaan
Deskripsi	Menjela Pelayanan Internal & Eksternal
Unit Primer	DISNAKER



Keterangan :

Skema interoperabilitas yang terkait data urusan Ketenaga Kerjaan ini seperti ditunjukkan dalam 18. OPD yang terlibat untuk mensuplai data adalah DISNAKER dan Dukcapil. Data induk yang digunakan antara lain data kependudukan, data lapangan kerja dan data pencari kerja.

## 9. Bidang Urusan Koperasi dan UMKM

Bidang Urusan Koperasi & UMKM	
Komponen	Koperasi & UMKM
Deskripsi	Menegelola Pelayanan Internal & Eksternal
Unit Primer	DISKOMIDAG



Keterangan :

Skema interoperabilitas yang terkait data urus Koperasi dan UMKM ini seperti gambar 19 OPD utamanya adalah DISKOMIDAG. OPD penyuplai data adalah DISPERINAKEK dan DPMPTSP. Data induk yang digunakan antara lain data kependudukan, data usaha mikro, data pasar, data industri kecil dan menengah